

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI KELOMPOK BELAJAR USAHA
DI PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**(Studi kasus di PKBM “Tresna Bhakti” Desa Cinyasag ,
Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis)**

LAPORAN PENELITIAN

Mendapat Bantuan Dana BOPTAN UIN SGD

Tahun 2013



Oleh:

DR. H.A. Rusdiana, MM

NIP: 1961042119863001

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2013**

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala karunia-Nya, sehingga laporan penelitian ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini adalah pemberdayaan dengan judul: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Belajar Usaha di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Tresna Bhakti" Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis.

Judul tersebut dipandang urgen diangkat, sehubungan dengan kondisi masyarakat pada umumnya masih memerlukan perhatian yang serius. Hal ini terlihat secara jelas bahwa angka pengangguran baik di perkotaan maupun di pedesaan jumlahnya masih sangat tinggi. Sehingga dipandang perlu diketahui, dianalisis, serta dicarikan solusi untuk peningkatan kualitas SDM pada masa mendatang.

Pemberdayaan masyarakat merupakan kewajiban seluruh komponen jajaran yang terkait dengan PKBM. Sehingga penelitian ini merupakan upaya strategis untuk menunjang pencapaian visi maupun misi PKBM, pada umumnya dan khususnya PKBM "Tresna Bhakti" Cinyasag untuk menjadi PKBM bermutu unggul dan kompetitif.

Penulis menyadari bahwa Penelitian Pengembangan Masyarakat ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis berharap kajian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam Pengembangan Masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi Pengembangan Kelompok Belajar Usaha di PKBM "Tresna Bhakti" dan bagi peneliti lain.

Bandung, 23 September 2013

Penulis,

Abstraksi

A. Rusdiana; Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kelompok Belajar Usaha di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Tresna Bhakti" Desa Cinyasag Kecamatan Panawangan Kabupaten Ciamis. Penelitian ini dilatarbelakangi Kemiskinan adalah suatu keadaan atau kondisi yang menggambarkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dengan upaya pemenuhannya, sehingga timbul kesulitan dan kekurangan pada berbagai aspek kehidupan yang menyebabkan turunnya kualitas hidup manusia. Di wilayah pedesaan, beberapa kelompok yang termasuk dalam masyarakat miskin adalah petani buruh, pembantu rumah tangga, buruh bangunan, pedagang keliling dan sebagainya yang kebanyakan adalah pekerja sektor informal. Penelitian ini bertujuan; (1) Mengetahui permasalahan yang dihadapi KBU PKBM "Tresna Bhakti"; (2) Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurang-berhasilan KBU PKBM "Tresna Bhakti"; (3) Mengetahui hambatan dan permasalahan warga belajar yang telah mendapatkan keterampilan di KBU PKBM dalam mengembangkan usaha ekonomi produktifnya; (4) Merumuskan strategi pengembangan KBU PKBM "Tresna Bhakti" dimasa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan strategi studi kasus. Studi kasus merupakan pilihan yang relevan untuk mengkaji suatu komunitas, karena karakter pengembangan masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan konteks lokal, dan karena instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah manusia (pengkaji), maka disebut juga studi kasus instrumental. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kelompok Belajar Usaha (KBU) PKBM "Tresna Bhakti" adalah salah satu kelembagaan lokal yang dianggap dapat memberdayakan masyarakat karena memberikan pelayanan keterampilan kerja sekaligus pengalaman berwiraswasta. Beberapa permasalahan yang dihadapi KBU PKBM "Tresna Bhakti" yaitu masih relatif rendahnya motivasi warga belajar dalam mengikuti kegiatan KBU, sarana dan prasarana yang kurang menunjang, dan pemasaran yang tidak berkembang di ekonomi lokal. Sedangkan faktor-raktor yang menyebabkan KBU kurang berkembang adalah: Jenis keterampilan yang tidak aspiratif, kurangnya kerjasama dengan kelembagaan lokal dan swasta, kualitas instruktur yang tidak profesional, dan kurangnya partisipasi atau dukungan dari masyarakat. Upaya pengembangan KBU PKBM "Tresna Bhakti" diawali dengan menampung aspirasi dari warga belajar, pengelola dan instruktur melalui suatu diskusi yang membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan KBU. Berdasarkan hasil diskusi kemudian disepakati untuk mengembangkan KBU yang aspiratif dan partisipatif yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta sesuai dengan konsep *Good Governance* (Tata Kelola Kepemerintahan yang baik). Saran/Rekomendasi, secara substansial; (1) PKBM; agar dapat membuat suatu kebijakan secara tertulis mengenai kesediaan warga belajar untuk mengabdikan dirinya mengembangkan KBU menjahit dan bengkel sepeda motor dalam rangka ikut mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran di Desa Cinyasag; (2) Pemerintah Desa; hendaknya dapat benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai pembina, sekaligus sebagai pengawas yang memonitor pelaksanaan kegiatan KBU, sehingga kegiatan KBU dapat berjalan dengan baik dan produktif; (3) Masyarakat; Warga masyarakat di sekitar PKBM hendaknya dapat memberikan dukungan kepada warga belajar dalam usahanya mengembangkan KBU menjahit dan bengkel sepeda motor. Dukungan penuh dari warga masyarakat akan mendorong semangat dan jiwa wiraswasta dari warga belajar, sehingga nantinya mereka akan lebih siap jika ingin mendirikan usaha secara mandiri.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	j
Daftar Isi	jj
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	
A. Pemberdayaan Masyarakat	7
B. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	10
C. Wiraswasta dan Wirausaha	18
D. Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL)	23
E. Kerangka Pikir Penelitian	25
BAB III METODOLOGI	
A. Pendekatan dan Strategi Penelitian	29
B. Metode Pengumpulan Data	30
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Analisis Data	35
F. Rancangan Penyusunan Program	35
G. Lokasi dan Waktu	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	39
B. Upaya Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”	59
C. Analisis Masalah, Kebutuhan dan Identifikasi Sumber	74
D. Upaya Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”	77
E. Perancangan Program Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” Secara Partisipatif	87
F. Rancangan Program Rencana Aksi Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”	120
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
A. Kesimpulan	130
B. Rekomendasi	131
DAFTAR PUSTAKA	132
Lampiran-lampiran	134

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1.1 Model proses perintisan dan pengembangan kwirausahaan Bygrave (1994) dalam Buchari (2006)	21
1.2 Kemitraan Dalam <i>Good Governance</i> (modifikasi Tjokroamidjojo)	24
1.3 Kerangka Berpikir Kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui KBU PKBM “Tresna Bhakti”	28
4.1 Struktur Organisasi PKBM “Tresna BhaKTI”	48
4.2 Model Pengembangan Kbu Pkbm “Tersna Bhakti” Cinyasag	126
4.3 Kerangka Pikir Strategi Pengembangan Kbu Pkbm Tresna Bhakti	127

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan PKBM	16
3.1 Kelengkapan Metode Penelitian	33
3.2 Jadwal Rencana Pelaksanaan Kajian	37
4.1 Penduduk Desa Cinyasag Berdasarkan Kelompok Umur	40
4.2 Penduduk Cinyasag Berdasarkan Tingkat Pendidikan Error! Bookmark not defined.	
4.3 Penduduk Desa Cinyasag Berdasarkan Mata Pencaharian	42
4.4 Kegiatan PKBM “Tresna Bhakti” Tahun 2012	49
4.5 Keterampilan Yang Dikembangkan Kelompok Belajar Usaha(KBU) PKBM “Tresna Bhakti”	50
4.6 Tenaga Tutor PKBM “Tresna Bhakti”	53
4.7 Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Kegiatan PKBM “Tresna Bhakti” .	54
4.8 Analisis Masalah, Potensi Dan Alternatif Pemecahan Masalah KBU PKBM “Tresna Bhakti”	90
4.9 Program Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” Desa Cinyasag	93
4.10 Program Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” Di Desa Cinyasag	128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah yang selalu menjadi isu sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Meskipun kemiskinan pernah mengalami penurunan yang signifikan pada kurun waktu 1976-1996, dari 40,1% menjadi 11,3% dari total penduduk Indonesia (Huraerah, 2006), akan tetapi pasca krisis ekonomi tahun 1997, Indonesia ibarat sebuah kapal yang tenggelam. Kemiskinan di Indonesia masih tetap saja tinggi, bahkan angka kemiskinan pada dua tahun terakhir menunjukkan peningkatan, yaitu dari 35,10 juta jiwa pada tahun 2005, menjadi 39,05 juta jiwa pada tahun 2006 (BPS, 2006).

Kemiskinan adalah suatu keadaan atau kondisi yang menggambarkan adanya ketimpangan antara kebutuhan dengan upaya pemenuhannya, sehingga timbul kesulitan dan kekurangan pada berbagai aspek kehidupan yang menyebabkan turunnya kualitas hidup manusia. Di wilayah pedesaan, beberapa kelompok yang termasuk dalam masyarakat miskin adalah buruh tani, pembantu rumah tangga, buruh bangunan, pedagang keliling dan sebagainya yang kebanyakan adalah pekerja sektor informal.

Menurut Suharto (2006), setidaknya ada empat kategori kemiskinan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu: (1) kemiskinan absolut, (2) kemiskinan relatif, (3) kemiskinan kultural dan (4) kemiskinan struktural. Dalam perspektif struktural, kemiskinan yang diderita oleh segolongan masyarakat Indonesia disebabkan lemahnya struktur sosial yang ada, sehingga mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Banyak hal yang menunjukkan bahwa, kelompok miskin sulit memanfaatkan peluang, dan kualitas sumber dayanya memang rendah. Secara ekonomis, yang tampaknya menjadi sorotan bahwa seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin adalah karena *lack of resources* (ketiadaan atau ketidakmampuan mengakses sumber daya) yang disebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan, serta kurangnya dukungan pemerintah dan

kelompok kuat (swasta), yang mana hal ini telah memudahkan spirit mereka untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan, sehingga mereka hidup dengan sikap apatis dan putus asa yang pada gilirannya memicu munculnya berbagai permasalahan sosial.

Untuk mengatasi permasalahan ini, menurut Haraerah (2006), setidaknya terdapat empat strategi yang bisa dilakukan dalam mengatasi kemiskinan, yaitu: **Pertama**, karena kemiskinan bersifat multidimensional, maka program pengentasan kemiskinan seyogyanya juga diarahkan untuk mengikis nilai-nilai budaya negatif seperti apatis, apolitis, fatalistik, dan ketidakberdayaan. **Kedua**, untuk meningkatkan kemampuan dan mendorong produktivitas, strategi yang dipilih adalah peningkatan kemampuan dasar masyarakat miskin untuk meningkatkan pendapatan melalui langkah perbaikan kesehatan dan pendidikan, peningkatan keterampilan usaha, teknologi, perluasan jaringan kerja (*networking*), serta informasi pasar. **Ketiga**, melibatkan masyarakat miskin dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, bahkan pada proses pengambilan keputusan. **Keempat**, strategi pemberdayaan, dimana masyarakat miskin dipandang sebagai kelompok yang mampu membangun dirinya sendiri jika pemerintah mau memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur dirinya sendiri.

Salah satu upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat adalah melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Suatu wadah berbagai pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi dan budaya” (Direktori PKBM Provinsi Jawa Barat, 2006). Pengelolaan PKBM diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat (DOUM), artinya bahwa prakarsa penyelenggaraan pembelajaran diharapkan dapat tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan kebutuhan masyarakat sendiri.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai tempat pembelajaran masyarakat telah dirintis dan disosialisasikan pembentukannya oleh Direktorat Dikmas Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas sejak tahun 1998 sebagai respon atas meningkatnya angka anak putus sekolah serta meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia pasca krisis ekonomi.

Dalam perkembangannya, PKBM ternyata tidak sedikit menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Menurut Kartika (2006), ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di PKBM yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak terkait khususnya bagi pengelola PKBM, yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi tentang keberadaan PKBM yang menyelenggarakan Program Pendidikan Kesetaraan (paket A, paket B, paket C), Keaksaraan Fungsional (KF), Kelompok Belajar Usaha (KBU) dan program lainnya.
2. Pandangan miring dari lingkungan masyarakat sekitar yang menganggap pendidikan di PKBM sebagai pendidikan kelas dua yang ijazah lulusannya sekedar "ijazah-ijazahan" dari yang bernama "sekolah-sekolahan".
3. Kesulitan untuk pindah ke jalur pendidikan formal bagi lulusan PKBM paket A dan paket B, disebabkan kurangnya kemampuan pemerintah menegakkan aturan yang ada yaitu PP No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (pasal 10 ayat (2) dan pasal 14 ayat (2) yang menyatakan lulusan paket A dan paket B dimungkinkan untuk pindah ke jalur pendidikan sekolah formal.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang penyelenggaraan berbagai program pembelajaran di PKBM.

Sebagai penelitian awal dapat diketahui, bahwa; Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "Tresna Bhakti" Desa Cinyasag merupakan salah satu PKBM yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis, berdiri pada tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor: 421.9/56/UPTD-Disdik/2008. PKBM "Tresna Bhakti" dibentuk atas prakarsa dari seorang warga RW 18 (OR) yang peduli dan prihatin dengan nasib anak-anak yang terputus dari pendidikan formal karena alasan ekonomi, serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Desa Cinyasag. Berdasarkan laporan potensi Desa Cinyasag tahun 2006, jumlah penduduk miskin di Desa Cinyasag mencapai 2.240 KK atau 23,69 % jumlah KK di Cinyasag (1.565 KK penerima BLT) dan pengangguran mencapai 6.931 orang (usia 15 – 55 tahun) atau 19,48 % dari jumlah penduduk (diantaranya akibat penutupan moneter tahun 1997), dan merupakan permasalahan sosial yang paling menonjol, dengan karakteristik (berdasarkan sampel yang diambil dalam kegiatan pemetaan sosial): Berpendidikan relatif rendah, bergantung pada satu sumber penghasilan

tertentu, tidak memiliki keterampilan, tidak memiliki lahan untuk aktivitas ekonomi, kurang mendapatkan informasi dan tidak punya koneksi. Sedangkan anak putus sekolah di Desa Cinyasag pada tahun 2007 mencapai 192 anak untuk usia 7 – 12 tahun, dan 132 anak untuk usia 13 - 15 tahun (Hasil Pendataan Keluarga BPMKB, 2006). Tujuan didirikannya PKBM “Tresna Bhakti” adalah untuk membantu kelangsungan pendidikan anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, serta memberikan keterampilan kerja bagi warga miskin dan pemuda sekitar yang tidak memiliki pekerjaan.

Dalam usianya yang baru enam tahun, PKBM “Tresna Bhakti” telah menyelenggarakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, yaitu : Program Pendidikan Kesetaraan (Paket B dan Paket C), Program Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Program Kelompok Belajar Usaha (KBU) yang meliputi keterampilan membuat sapu ijuk, keterampilan membuat batako, keterampilan membuat makanan ringan, keterampilan elektro dan keterampilan membuat *spare part* motor yang diikuti pemuda dari Karang Taruna dan warga sekitar.

Peranan KBU PKBM “Tresna Bhakti” dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Cinyasag kiranya menjadi sangat penting dan strategis dengan pertimbangan bahwa keberhasilan program KBU nantinya diharapkan dapat meningkatkan kapasitas warga miskin melalui keterampilan usaha yang mendorong peningkatan ekonomi, dan secara tidak langsung juga berdampak pada berkurangnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi, serta bertambahnya lapangan pekerjaan bagi warga pengangguran di Desa Cinyasag . Melalui kegiatan Kelompok Belajar Usaha PKBM yang pengelolaannya dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber dan potensi lokal, yang secara ekonomi dapat dikembangkan dan mendukung pembangunan ekonomi lokal, diharapkan nantinya warga miskin dapat mempunyai, mengelola dan mengembangkan keterampilan usaha yang telah diperolehnya, baik dalam bentuk Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), industri kecil, maupun usaha secara individu.

Berdasarkan hasil evaluasi Program Pengembangan Masyarakat oleh PKBM “Tresna Bhakti” Desa Cinyasag (Praktikum II pada 13 April–7 Mei 2011) penyelenggaraan Kelompok Belajar Usaha (KBU) PKBM “Tresna Bhakti” masih

menghadapi berbagai kendala, yaitu:

1. Pelayanan KBU masih belum menjangkau seluruh komunitas. Sebagian warga masyarakat Desa Cinyasag masih belum mengenal program-program yang diselenggarakan PKBM, khususnya KBU.
2. Minat masyarakat terhadap program keterampilan di PKBM masih kurang.
3. Kesulitan dalam pemasaran hasil keterampilan, sehingga KBU kurang berkembang.
4. Belum adanya jalinan/kurangnya dukungan dari kelembagaan lokal.
5. Setelah mendapat keterampilan warga belajar belum mampu membuka usaha sendiri (spare part motor dan elektro).

Berdasarkan uraian di atas, maka eksistensi dan keberlanjutan KBU PKBM "Tresna Bhakti" Desa Cinyasag perlu ditata dan dikembangkan melalui kegiatan Kajian Pengembangan Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis menetapkan rumusan masalah kajian sebagai berikut:

1. Apa saja permasalahan yang dihadapi PKBM "Tresna Bhakti" dalam pengelolaan KBU ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kurang-berhasilan KBU PKBM "Tresna Bhakti" ?
3. Apa saja hambatan dan permasalahan yang dihadapi warga belajar dalam mengembangkan usaha ekonomi produktifnya setelah mendapatkan keterampilan di PKBM "Tresna Bhakti" ?
4. Strategi apa yang dapat dikembangkan KBU PKBM "Tresna Bhakti" dalam upaya pemberdayaan masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari kajian atau penelitian ini adalah:

1. Mengetahui permasalahan yang dihadapi KBU PKBM "Tresna Bhakti";
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurang-berhasilan KBU PKBM "Tresna Bhakti" ;
3. Mengetahui hambatan dan permasalahan warga belajar yang telah

mendapatkan keterampilan di KBU PKBM dalam mengembangkan usaha ekonomi produktifnya;

4. Merumuskan strategi pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” dimasa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari kajian ini adalah:

1. Untuk memberikan masukan tentang pengembangan Kegiatan Kelompok Belajar Usaha (KBU) dalam upaya pemberdayaan masyarakat kepada pengelola PKBM “Tresna Bhakti”;
2. Untuk memberikan masukan tentang pengembangan Kegiatan Kelompok Belajar Usaha (KBU) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) “Tresna Bhakti” dalam upaya pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa Cinyasag dan para pegiat masyarakat;
3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis (Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis) untuk pembuatan kebijakan pengembangan pelayanan PKBM di Kabupaten Ciamis, khususnya pengembangan Kegiatan Kelompok Belajar Usaha.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pemberdayaan Masyarakat

Seiring dengan semangat otonomi daerah, paradigma pembangunan di Indonesia telah mengalami pergeseran yang semula berorientasi pada produksi (product centered development), kini beralih pada pembangunan yang berorientasi pada manusia (people centered development). Korten dan Carner (1993) dalam Hikmat (2006) menyatakan bahwa konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat memandang inisiatif dan kreatifitas dari rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan tersebut. Selanjutnya, ada tiga tema penting menurut Korten dan Carner yang dianggap sangat menentukan dalam konsep perencanaan pembangunan yang berpusat pada rakyat, yaitu:

1. Penekanan pada dukungan dan pembangunan usaha-usaha swadaya kaum miskin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
2. Kesadaran bahwa meskipun sektor modern adalah sumber utama bagi pertumbuhan ekonomi yang konvensional, akan tetapi sektor tradisional menjadi sumber utama bagi kehidupan sebagaimana besar rumah tangga miskin.
3. Kebutuhan adanya kemampuan kelembagaan yang baru dalam usaha membangun kemampuan para penerima bantuan yang miskin demi pengelolaan yang produktif dan swadaya berdasarkan sumber-sumber daya lokal, (Hikmat, 2006).

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka pendekatan pemberdayaan masyarakat semakin sangat diperlukan dalam pembangunan Indonesia dewasa ini. Pembangunan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat dipandang sangat penting dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diungkapkan oleh Hikmat (2006):

1. Masyarakat yang sehat adalah produk dari masyarakat yang aktif.
2. Proses perencanaan yang berasal dan diinginkan oleh masyarakat adalah lebih baik ketimbang perencanaan yang berasal dari penguasa.
3. Proses partisipasi dalam pembangunan masyarakat merupakan pencegahan berbagai sikap masa bodoh dari individu-individu dalam masyarakat.
4. Proses pemberdayaan yang kuat dalam upaya-upaya kemasyarakatan

merupakan dasar kekuatan bagi masyarakat yang demokratis.

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment) memiliki pengertian menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan atau lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom) dalam arti bukan hanya bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan
2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya;
3. Mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto, 2006).

Konsep lain mengenai pemberdayaan juga disampaikan Mc Ardle (1987) dalam Hikmat (2006) yang menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Mereka diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung dari pihak luar. Selanjutnya Parsons, (1994) dalam Suharto (2006) mengatakan bahwa "Pemberdayaan menekankan bahwa, orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya". Lebih lanjut Parsons mengatakan bahwa pemberdayaan kebanyakan dilakukan secara kolektif dengan kelompok sebagai media intervensi, seperti pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok sebagai strategi dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap, agar mereka mampu memecahkan berbagai permasalahan kehidupan (Suharto, 2006).

1. Penyebab Ketidak Berdayaan Masyarakat

Adapun penyebab dari ketidak berdayaan masyarakat (kelompok lemah/rentan) disebabkan oleh beberapa faktor, yang oleh Sennet dan Cabb (1972) dan Conway (1979) dalam Suharto (2006) disebutkan antara lain karena ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan

pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik maupun emosional. Menurut Seeman (1985), Seligman (1972), dan Learner (1986) dalam Suharto (2006) ketidakberdayaan kelompok lemah disebabkan hasil interaksi mereka dengan masyarakat, dimana mereka menganggap diri mereka sendiri lemah dan tidak berdaya. Berdasarkan pendapat ini, bagi kebanyakan kelompok miskin bantuan penyediaan lapangan kerja bagi mereka akan dipandang lebih efektif dari pada bantuan modal usaha yang menciptakan lapangan pekerjaan.

2. Indikator Keberdayaan Masyarakat

Menurut Kieffer (1981) dalam Suharto (2006), pemberdayaan mencakup tiga dimensi yang meliputi : Kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik, dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan operasional dari pemberdayaan, maka perlu diketahui atau dibuat indikator keberdayaan yang dapat dipakai sebagai penunjuk apakah seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga ketika sebuah program pemberdayaan masyarakat diberikan, maka kita bisa fokus pada aspek-aspek dari sasaran perubahan yang diharapkan. Schuler, Hashemi dan Riley dalam Suharto (2006) memberikan gambaran tentang indikator pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Kebebasan mobilitas, atau kemampuan individu untuk beraktifitas memenuhi kebutuhannya.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil, seperti barang-barang kebutuhan keluarga (beras, minyak goreng, minyak tanah, sayur dan sebagainya).
- c. Kemampuan membeli komoditas besar, seperti barang-barang sekunder dan alat transportasi (mobil, sepeda motor).
- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan rumah tangga.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga.
- f. Kesadaran hukum dan politik.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yang membela hak-haknya.
- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga.

Sementara Sumardjo (2006) memberikan ciri-ciri masyarakat yang berdaya sebagai berikut:

- a. Mampu memahami diri dan potensinya
- b. Mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan), dan mengarahkan dirinya sendiri
- c. Memiliki kekuatan untuk berunding, bekerjasama secara saling

- menguntungkan dengan bargaining power yang memadai
- d. Bertanggungjawab atas tindakannya sendiri

Ciri lain dari masyarakat yang berdaya juga disampaikan oleh Suhendra (2006) yaitu:

- a. Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat.
- b. Dapat berjalannya “bottom up planning”.
- c. Kemampuan dan aktivitas ekonomi.
- d. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga.
- e. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan.

B. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Menurut Direktori PKBM Provinsi Jawa Barat (2006) bahwa yang disebut dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah “suatu wadah berbagai pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya”. PKBM dibentuk oleh masyarakat, untuk masyarakat dan dikelola oleh masyarakat (DOUM) untuk memperluas pelayanan kebutuhan belajar masyarakat, artinya bahwa prakarsa penyelenggaraan pendidikan (Pendidikan Luar Sekolah) diharapkan dapat tumbuh dan berkembang atas prakarsa dan kebutuhan masyarakat sendiri, sehingga masyarakat setempat akan lebih mempunyai rasa memiliki yang selanjutnya kegiatan belajar tersebut dapat berjalan dan berkelanjutan secara optimal. Pembentukan PKBM dilakukan dengan memperhatikan sumber-sumber potensi yang terdapat pada daerah lokal, terutama jumlah kelompok sasaran dan jenis usaha satu keterampilan yang secara ekonomi, sosial budaya pendidikan dan kesehatan dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga belajar khususnya dan warga masyarakat sekitarnya.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai tempat pembelajaran telah dirintis dan disosialisasikan pembentukannya oleh Direktorat Dikmas Ditjen PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Depdiknas sejak tahun 1998 sebagai respon atas meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia pasca krisis ekonomi. Menurut Bank Dunia (1999) dalam Sularto (2000) diperkirakan jumlah penduduk miskin di Indonesia

telah meningkat 14,1 persen pada tahun 1999 atau ekuivalen dengan munculnya 29 juta penduduk miskin baru. Sementara Biro Pusat Statistik telah mendapatkan data 49 juta penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 1999. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini kemudian diikuti dengan meningkatnya angka putus sekolah anak usia sekolah.

Menurut Mendiknas Yahya Muhaimin (1999) dalam Sularto (2000) jumlah anak putus sekolah di tingkat SD dan menengah meningkat cukup tajam. Jumlah anak SD yang putus sekolah pada tahun 1997 sebanyak 833.000 anak dan pada tahun 1998 meningkat 10,27 persen menjadi 919.000 anak, sedangkan untuk anak SLTP yang mengalami putus sekolah meningkat dari 365.000 anak pada tahun 1997 menjadi 643.000 pada tahun 1998, atau meningkat 76 persen (Sularto, 2000) Berdasarkan kenyataan tersebut, maka keberadaan PKBM yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 26 ayat 4 (empat) memberikan pengaruh dan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan program percepatan Wajib Belajar (Wajar Dikdas) sembilan tahun melalui program Paket A (setara SD) dan Paket B (setara SMP), dan paket C (setara SMA) bagi anak usia sekolah (7 – 18 tahun) yang putus sekolah, baik karena alasan ekonomi maupun karena alasan psikologis. Namun demikian, aktivitas kegiatan PKBM sebenarnya tidak hanya terbatas pada kegiatan pelayanan pendidikan saja melainkan juga mencakup pelayanan keterampilan kerja, layanan informasi, rekreasi, kesehatan dan kebersihan, peningkatan kualitas hidup serta kegiatan keagamaan dan budaya.

1. Fungsi dan Manfaat PKBM

Fungsi PKBM

a. Fungsi Utama

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) mempunyai fungsi utama sebagai wadah berbagai kegiatan belajar masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan masyarakat.

b. Fungsi Pendukung

- 1) sebagai pusat informasi bagi masyarakat sekitar, berkaitan dengan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan juga bagi lembaga pemerintah dan LSM berkaitan dengan sumber daya potensi dan masalah/kebutuhan untuk meluncurkan program yang berkaitan dengan pembelajaran masyarakat.
- 2) Pusat jaringan informasi dan kerjasama bagi kelembagaan lokal yang ada di masyarakat.
- 3) Sebagai tempat koordinasi, konsultasi, komunikasi dan musyawarah para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pembina teknis dalam merencanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Sebagai tempat kegiatan penyebarluasan program teknologi tepat guna.

Manfaat PKBM

Pusat Kegiatan Belajar masyarakat memberikan wahana bagi warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar berupa pengetahuan dan keterampilan yang bermakna bagi kehidupannya.

2. Visi dan Misi PKBM

Visi

Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil, mandiri, berdaya saing dan gemar belajar.

Misi

- a. Mewujudkan program pendidikan luar sekolah yang berbasis masyarakat dan berorientasi pada kecakapan hidup (life skill).
- b. memasyarakatkan belajar dan membelajarkan masyarakat.

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) PKBM

Standar pelayanan minimal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) meliputi:

Dasar Hukum

- a. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar

Sekolah.

- c. Keputusan Mendiknas No. 055/V/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) PKBM.

Tujuan PKBM

Tujuan dibentuknya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah untuk memperluas kesempatan warga belajar masyarakat, khususnya bagi anak keluarga tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya.

4. Azas dan Konsep Dasar PKBM

Azas PKBM

Azas PKBM adalah kemanfaatan, kebersamaan, kemandirian, keselarasan, kebutuhan dan tolong menolong.

Konsep Dasar PKBM

Konsep dasar PKBM adalah dari, oleh dan untuk masyarakat (DOUM), artinya bahwa prakarsa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah dapat diharapkan tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat sendiri, sehingga akan lebih berorientasi pada kebutuhan belajar masyarakat sendiri.

5. Pembentukan dan Pengelolaan PKBM

Pembentukan PKBM

Pembentukan PKBM dimaksudkan untuk memperluas pelayanan kebutuhan dan sumber-sumber potensi yang terdapat disekitarnya terutama jumlah kelompok sasaran jenis usaha/keterampilan yang dibutuhkan secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan kesehatan.

Pengelolaan PKBM

Merujuk kepada fungsi utama dan pendukung PKBM, maka sekurang-kurangnya ada empat bidang kegiatan yang perlu dikelola oleh PKBM, yaitu :

- a. Pendidikan, meliputi: bimbingan, pengajaran dan pelatihan keterampilan.
- b. Pelayanan Informasi: menghimpun dan memberikan layanan informasi dari PKBM kepada masyarakat sekitar dan lembaga luar.

c. Jaringan informasi dan kemitraan, meliputi:

- 1) Mengembangkan jaringan informasi dan kemitraan dengan lembaga lokal maupun di luar masyarakat.
- 2) Memelihara jaringan yang telah terbina.

d. Pembinaan tenaga kependidikan PKBM meliputi: meningkatkan kualitas kinerja tenaga pengelola dan tenaga pendidik (tutor, instruktur maupun narasumber) baik dilakukan secara mandiri maupun difasilitasi dari luar (pemerintah).

6. Program Kegiatan PKBM

Program kegiatan PKBM pada prinsipnya segala bentuk kegiatan belajar masyarakat dapat dilakukan di PKBM. Program pembelajaran yang diselenggarakan di PKBM adalah program-program yang paling dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya, baik program pendidikan luar sekolah maupun program lainnya yang dikembangkan oleh lintas sektoral, yang meliputi:

a. Program Pendidikan Luar Sekolah:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- 2) Paket A setara SD
- 3) Paket B setara SLTP
- 4) Paket C setara SMA
- 5) Kelompok Belajar Usaha (KBU)
- 6) Program Keaksaraan Fungsional
- 7) Pendidikan Perempuan
- 8) Kursus
- 9) Magang

b. Program lain (lintas sektoral):

- 1) Posyandu
- 2) Pelayanan Kesehatan
- 3) Bina Keluarga Balita
- 4) Karang Taruna
- 5) Kepemudaan
- 6) Majelis Ta'lim
- 7) Kegiatan Usaha

7. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan di PKBM merujuk pada keempat bidang kegiatan yang dikelola di PKBM, yaitu :

a. Sarana dan Prasarana Pendidikan, meliputi:

- 1) Ruang atau tempat belajar yang seimbang dengan jumlah warga belajar
- 2) Kurikulum
- 3) Warga belajar dan tenaga pengajar
- 4) Dokumen/administrasi kemajuan perkembangan hasil kegiatan pendidikan
- 5) Bahan ajar dan alat peraga untuk pengajar dan warga belajar

b. Pelayanan informasi:

- 1) Perpustakaan sederhana
- 2) Ruang penyajian informasi (pengumuman, data PKBM, surat kabar, dan lain-lain)
- 3) Dokumen untuk catatan hasil pelayanan informasi

c. Jaringan informasi dan kemitraan:

- 1) Tempat atau ruang pertemuan
- 2) Dokumen untuk catatan perkembangan pelaksanaan kegiatan

d. Pembinaan teknis tenaga kependidikan:

- 1) Tempat atau ruang diskusi
- 2) Pembinaan
- 3) Struktur organisasi PKBM

8. Organisasi PKBM

Organisasi PKBM adalah organisasi yang ramping. Struktur kaya fungsi standar organisasi dalam prakteknya dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kebutuhan masing-masing. Standar organisasi meliputi:

- a. Pembina
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara
- e. Bagian yang menangani pendidikan, jaringan kemitraan dan pelayanan

informasi

- f. Penanggung jawab program (sesuai kebutuhan)
- g. Tenaga Pendidik (tutor, instruktur/pelatih) sesuai kebutuhan.

9. Sumber Dana

Sumber pembiayaan kegiatan PKBM berasal dari:

- a. APBN/APBD
- b. Swadaya masyarakat (warga belajar)
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat/orsos kemasyarakatan
- d. Perusahaan yang peduli dengan pendidikan

10. Peran serta Masyarakat

Peran serta masyarakat perlu dilibatkan, baik lembaga maupun perseorangan agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan PKBM, antara lain dalam bentuk :

- a. Penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar
- b. Penyediaan bantuan biaya penyelenggara
- c. Tenaga pendidik
- d. Penyelenggara atau pengelola PKBM

11. Evaluasi

Evaluasi penyelenggaraan PKBM dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas penyelenggara dan pengelola PKBM

12. Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan PKBM

Tabel 1.1
Indikator Keberhasilan Penyelenggaraan PKBM

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	KEBERHASILAN MINIMAL	KAB/ KOTA
1	2	3	4	5
1.	Program kegiatan PLS dan Program lain	1. Ketersediaan rencanaprogram kegiatan PKBM	Ada	.4
		2. Keterlaksanaan program kegiatan PKBM	Baik	4
		3. Evaluasi program kegiatan PKBM	Baik	

1	2	3	4	5
2.	Sarana dan prasarana:	Pada setiap program terdapat:		
	1. Pendidkan	1. Kurikulum	Ada	4
		2. Bahan belajar (modul, alat belajar, buku sumber)	Ada	4
		3. Tempat/ruang belajar	Ada	4
		4. Kalender akademik	Ada	4
		5. Satuan pembelajaran	Ada	4
		6. Buku induk	Ada	4
		7. Buku hadir	Ada	4
		8. Buku kumpulan nilai	Ada	4
	2. Pelayanan Informasi	1. Terdapat sajian informasi tentang program kegiatan PKBM	Ada	4
		2. Terdapat sajian informasi dari sektor/lembaga di luar PKBM yang terkait dengan program kegiatan di PKBM	Ada	4
		3. Terdapat perpustakaan sederhana	Ada	4
		4. Terdapat ruang pengkajian Informasi	Ada	4
	3. Jaringan Informasi dan Kemitraan	1. Terdapat dokumen kerjasama fungsional	Ada	4
		2. Terdapat program/kegiatan kerjasama	Ada	4
		3. Terdapat laporan pelaksanaan kerjasama	Ada	4
		4. tersedia ruang ata tempat pertemuan	Ada	4
	4. Pembinaan teknis tenaga Kependidikan	1. Tersedia tempat atau ruang diskusi	Ada	4
		2. Terdapat dokumen kegiatan atau pembinaan	Ada	4

1	2	3	4	5
		3. Terdapat struktur organisasi PKBM	Baik	4
3.	Pembiayaan	1. Anggaran pemerintahan	Tersedia	4
		2. Swadaya masyarakat	Ada	4
		3. Pengelolaan	Ada	4
4.	Peran serta masyarakat	1. Pemantauan oleh pembina (disdik)	Ada	4
		2. Pemantauan oleh masyarakat	Ada	4
		3. Pemantauan dunia usaha dan dunia	Ada	4

Sumber : Kepmendiknas No. 055/V/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) PKBM

13. Hasil Belajar

Hasil belajar yang diselenggarakan oleh PKBM, meliputi:

- a. Hasil kegiatan belajar (pendidikan kesetaraan)
- b. Hasil keterampilan warga belajar
- c. Pemasaran hasil keterampilan

14. Tahapan Perkembangan PKBM

Perkembangan PKBM dibagi menjadi empat tahapan, yaitu :

- a. Tahap perintisan pembentukan PKBM
- b. Tahap pembentukan atau pendirian PKBM
- c. Tahap Pemandirian PKBM dan
- d. Tahap Pengembangan PKBM

C. Wiraswasta dan Wirausaha

1. Pengertian Wiraswasta dan Wirausaha

Kata wiraswasta seringkali digunakan tumpang tindih dengan istilah wirausaha. Dari berbagai literatur dapat digambarkan bahwa pengertian wiraswasta dengan wirausaha adalah sama. Namun sesungguhnya kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Menurut Yoesoef (1981) dalam Buchari (2006) seorang wiraswasta adalah :

- a. Orang yang memimpin usaha, baik secara teknis dan atau ekonomis, memiliki modal, mengurus atau berperan sebagai penanggung jawab atau

manager, menerima tantangan dan resiko usaha, memelopori usaha baru, sekaligus sebagai *inovator* (penemu) dan *imitator* (peniru).

- b. Mencari keuntungan dan manfaat secara maksimal
- c. Membawa usaha ke arah kemajuan, perluasan dan perkembangan, melalui jalan kepemimpinan ekonomi.

Pendapat lain tentang wiraswasta disampaikan oleh Djatmiko (1998) dalam Buchari (2006) yang menyatakan bahwa wiraswasta adalah kreativitas dan sikap tindak manusia yang mampu mengkoordinir sumber alam, tenaga manusia dan peralatannya menjadi benda-benda dan jasa-jasa ekonomi. Sedangkan menurut Wijandi (1988) dalam Buchari (2006) pengertian wiraswasta bukanlah teladan dalam usaha swasta, melainkan adalah sifat-sifat keberanian, keutamaan, keteladanan dan semangat yang bersumber dari kekuatan sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dilihat bahwa seorang wiraswasta memiliki 3 karakteristik yang tidak dapat terpisahkan, yaitu : sikap mental wiraswasta, kewaspadaan mental dan keahlian atau keterampilan dalam menekuni suatu usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan wirausaha menurut Josep Schumpeter (1994) dalam Buchari (2006) adalah "*Entrepreneur as the person who destroys the existing economic order by introducing new products and services, by creating new forms of organization, or by exploiting new raw materials*". Artinya, wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Orang tersebut melakukan aktivitasnya melalui suatu organisasi bisnis yang baru atau organisasi bisnis yang sudah ada. Dalam definisi ini ditekankan bahwa seorang wirausaha adalah orang yang mampu melihat adanya peluang kemudian menciptakan organisasi untuk memanfaatkan peluang tersebut. Wirausahawan adalah seorang inovator, sebagai individu yang mempunyai naluri untuk melihat peluang-peluang, mempunyai semangat, kemampuan dan pikiran untuk menaklukkan cara berpikir lamban dan malas. Oleh sebab itu wirausaha merupakan potensi pembangunan, baik dalam jumlah maupun kualitas wirausaha itu sendiri. Pembangunan akan lebih berhasil jika ditunjang oleh wirausahawan yang

dapat membuka lapangan pekerjaan kerana kemampuan pemerintah dalam penyediaan lapangan kerja sangat terbatas. Di negara maju, pertumbuhan wirausaha membawa peningkatan ekonomi yang luar biasa. Pengusaha-pengusaha baru telah memperkaya produk-produk baru yang berdampak terbukanya lapangan kerja baru.

Keberhasilan yang dicapai oleh negara Jepang menurut Heidjrachman Ranu (1982) dalam Buchari (2006) ternyata disponsori oleh wirausahawan yang berjumlah 2 % tingkat sedang, berwirausaha kecil sebanyak 20 % dari jumlah penduduknya. Jika Indonesia harus menyediakan 3 juta wirausahawan besar dan sedang, maka kita harus masih mencetak sekitar 30 juta wirausahawan kecil. Ini adalah suatu peluang besar yang menantang kaum generasi muda untuk berkreasi, mengadu keterampilan untuk membina wirausaha dalam rangka berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan tulisan di atas, maka tujuan yang sebenarnya dari adanya Kelompok Belajar Usaha adalah menumbuhkembangkan semangat berwirausaha bagi warga masyarakat yang tidak memiliki keterampilan tetapi memiliki semangat untuk mengubah nasibnya dengan memanfaatkan peluang-peluang yang difasilitasi oleh pemerintah secara maksimal. Dengan semakin berkembangnya KBU PKBM diharapkan akan muncul para usahawan-usahawan kecil yang mampu menopang perekonomian di tingkat lokal dan bahkan nasional.

2. Faktor Pendorong Dalam Merintis Wirausaha

Beberapa puluh tahun sebelumnya, banyak yang berpendapat bahwa kewirausahaan (*Entrepreneurship*) tidak dapat diajarkan. Akan tetapi, saat ini *Entrepreneurship* merupakan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, perguruan tinggi dan telah tumbuh sangat pesat. Di negara maju, pertumbuhan wirausaha telah membawa peningkatan ekonomi yang luar biasa. Pengusaha-pengusaha baru ini telah memperkaya pasar dengan produk-produk baru yang inovatif. Di Amerika pada tahun 1980-an telah lahir 20 juta wirausahawan baru, mereka menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menopang perekonomian negaranya (Buchari, 2006).

Untuk menjadi seorang wirausahawan atau mencetak para usahawan yang ternyata tidaklah mudah. Menurut Bygrave (1994) dalam Buchari (2006),

terdapat beberapa faktor yang berperan dalam memulai suatu usaha baru, yaitu:

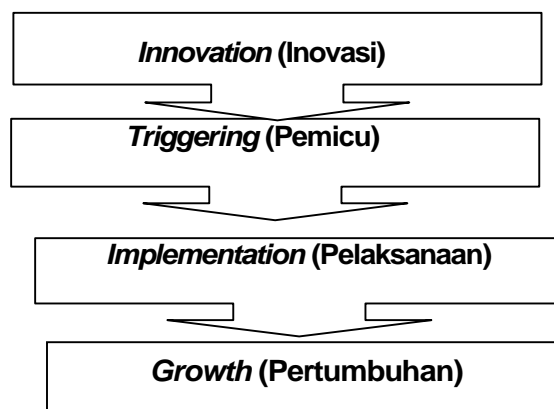
- a. *Personal*, menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang.
- b. *Sociological*, menyangkut masalah hubungan dengan family, teman, guru di sekolah dan sebagainya.
- c. *Environmental*, menyangkut hubungan dengan lingkungan seperti, keadaan ekonomi, keadaan lapangan pekerjaan dan sumber daya yang tersedia.

Sedangkan faktor lain yang berpengaruh dalam memulai sebuah bisnis adalah pertimbangan antara pengalaman dengan spirit, energi dan rasa optimis. Biasanya orang-orang yang berusia muda lebih optimis dan energik dibandingkan dengan orang-orang yang sudah berumur.

Dalam aspek lain, keberanian untuk membentuk kewirausahaan didorong oleh guru sekolah, sekolah yang memberikan mata pelajaran kewirausahaan yang praktis dan menarik dapat membangkitkan minat siswa untuk berwirausaha. Selain itu, dorongan untuk membentuk wirausaha juga datang dari teman sepergaulan, lingkungan keluarga dan kerabat, serta sahabat yang dapat diajak berdiskusi tentang ide-ide wirausaha, masalah yang dihadapi dan cara-cara mengatasi masalahnya.

3. Model Proses Kewirausahaan

Model proses perintisan dan pengembangan kwirausahaan digambarkan oleh Bygrave (Buchari: 2006) dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut:



Gambar 1.1

Model proses perintisan dan pengembangan kwirausahaan Bygrave (1994) dalam Buchari (2006)

a. Proses Inovasi

Beberapa faktor personal yang mendorong seseorang untuk melakukan inovasi adalah adanya keinginan untuk berprestasi, adanya keingintahuan, keberanian menanggung resiko, faktor pendidikan dan pengalaman. Sedangkan faktor-faktor environment mendorong inovasi adalah adanya peluang, pengalaman dan kreativitas.

b. Proses Triggering (Pemicu)

Beberapa faktor personal yang mendorong Triggering Event artinya yang memicu atau seseorang untuk terjun ke dunia bisnis adalah:

- 1) Adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang sekarang.
- 2) Adanya PHK dan tidak ada pekerjaan lain.
- 3) Dorongan karena faktor usia.
- 4) Keberanian menanggung resiko.
- 5) Komitmen atau minat yang tinggi terhadap bisnis.

Faktor-faktor Environment yang mendorong menjadi pemicu bisnis adalah:

- 1) Persaingan dalam kehidupan.
- 2) Adanya sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan.
- 3) Mengikuti latihan-latihan bisnis.

Kebijaksanaan pemerintah, misalnya kemudahan dalam lokasi berusaha ataupun fasilitas kredit, dan bimbingan usaha yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja.

Sedangkan faktor *sociological* yang menjadi pemicu serta pelaksanaan bisnis adalah:

- 1) Adanya hubungan-hubungan atau relasi-relasi dengan orang lain
- 2) Adanya tim yang dapat diajak kerjaasma dalam berusaha
- 3) Adanya dorongan dan bantuan dari keluarga atau kerabat
- 4) Pengalaman-pengalaman dalam dunia bisnis sebelumnya

c. Proses Pelaksanaan

Beberapa faktor personal yang mendorong dilaksanakannya sebuah bisnis adalah:

- 1) Adanya seorang wirausaha yang memiliki kesiapan mental
- 2) Adanya manajer pelaksana sebagai pembantu utama

- 3) Komitmen yang tinggi terhadap bisnis
- 4) Memiliki visi guna mencapai keberhasilan

d. Proses Pertumbuhan (Growth)

Proses pertumbuhan ini didorong oleh faktor organisasi, antara lain:

- 1) Adanya tim yang kompak dalam menjalankan usaha, sehingga semua rencana dan pelaksanaan operasional berjalan produktif.
- 2) Memiliki strategi yang mantap
- 3) Adanya struktur dan budaya organisasi yang sudah membudaya
- 4) Adanya produk yang dibanggakan

Sedangkan faktor *environment* yang mendorong implementasi dan pertumbuhan bisnis adalah :

- 1) Adanya persaingan yang menguntungkan
- 2) Adanya konsumen dan pemasok barang yang kontinu
- 3) Adanya investor bank yang memberikan fasilitas keuangan
- 4) Adanya sumber-sumber yang tersedia, yang masih bisa dimanfaatkan
- 5) Adanya kebijaksanaan pemerintah yang mendukung usaha bisnis.

D. Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL)

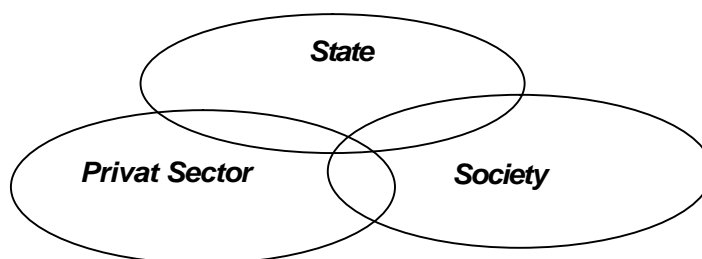
Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) adalah kerjasama seluruh komponen masyarakat di satu daerah (lokal) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic growth*) yang akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi (*economic welfare*) dan kualitas hidup (*quality of life*) seluruh masyarakat di dalam komunitas (Syaukat & Hendrakusumaatmadja, 2006). Pengembangan ekonomi lokal difokuskan pada upaya peningkatan daya saing daerah, peningkatan pertumbuhan dan redistribusi melalui pembentukan usaha kecil dan menengah serta penciptaan lapangan kerja. Sedangkan komponen atau *stakeholders* yang berperan dalam pembangunan ekonomi lokal terdiri dari :

1. Sektor Publik, yaitu Pemerintah Daerah yang berperan menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya perekonomian, Institusi Pendidikan Tinggi, dan penyedia jasa utilities.
2. Sektor swasta, yaitu Asosiasi bisnis/perdagangan, perusahaan besar, UKM dan Koperasi yang berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Sektor Komunitas, yaitu individual, kelompok dan sukarelawan, dan lain-

lain yang berperan sebagai subyek pembangunan, bagaimana agar aspirasi dan keinginannya dapat diakomodasi dan realisasikan dalam pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka KBU PKBM yang merupakan salah satu sektor komunitas yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pemberian keterampilan kerja dan pengalaman belajar usaha yang memungkinkan warga masyarakat, khususnya kelompok miskin memiliki kemampuan dan kesempatan untuk ikut mengelola sumber-sumber pendapatan yang tersedia di tingkat lokal, baik dalam bentuk usaha perorangan maupun kelompok, sudah tentu memiliki peranan yang strategis dalam ikut menopang pembangunan ekonomi di tingkat lokal (Kabupaten Ciamis) berdasarkan potensi dan peluang ekonomi yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pengembangan PKBM, khususnya dalam pengembangan Kelompok Belajar Usaha PKBM sejalan dengan konsep *Good Governance* (Kepemerintahan yang baik) yang merupakan cermin dari tata kelola *Welfare State* dalam konteks pemberdayaan masyarakat (Suhendra, 2006). *Good Governance* memberikan porsi yang setara antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat. Pemerintah dalam konsep *Good Governance* lebih berfungsi sebagai regulator dan fasilitator yang menampung atau mengakomodasikan berbagai keinginan atau aspirasi masyarakat. Sementara masyarakat berperan aktif secara konstruktif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Sedangkan *private sector* (swasta), bertanggung jawab terhadap pembangunan ekonomi, dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Secara sinergis kemitraan ke tiga domain dalam pemerintahan *good governance* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar: 1.2
Kemitraan Dalam Good Governance (modifikasi Tjokroamidjojo)
Sumber: Suhendra (2006)

E. Kerangka Pikir Penelitian

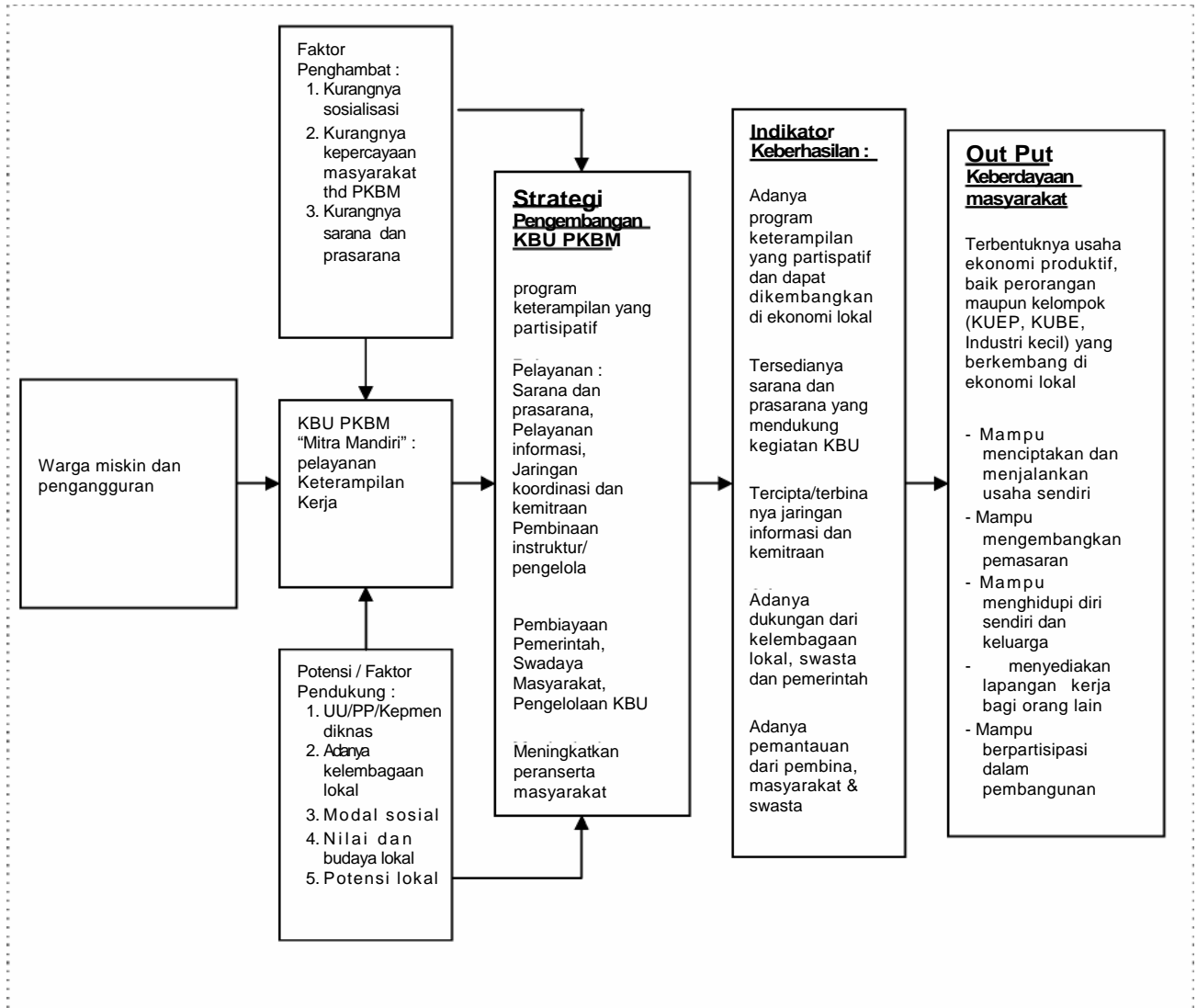
1. Beberapa faktor yang menyebabkan sebagian komunitas Desa Cinyasag hidup dalam kemiskinan adalah karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang tercermin dari kurangnya keterampilan kerja yang dimiliki, sehingga mereka tidak dapat ikut bersaing atau mengakses sumber daya dan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan hidupnya.
2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat “Tresna Bhakti” adalah salah satu lembaga pemberdayaan masyarakat yang disamping memberikan pelayanan pendidikan kesetaraan (Paket B setara SMP, paket C setara SMA), juga memberikan pelayanan keterampilan kerja melalui Kegiatan Kelompok Belajar Usaha (KBU). Melalui KBU diharapkan kelompok masyarakat miskin dapat mengembangkan kemampuan dan kapasitas dirinya, sehingga dapat memiliki satu keterampilan kerja dan pengalaman berusaha yang dapat dikembangkan pada ekonomi lokal, baik secara individu maupun secara berkelompok. Namun demikian, keberhasilan KBU dalam memberdayakan masyarakat miskin sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan. Beberapa faktor yang menghambat perkembangan KBU yaitu :
 - a. Kurangnya sosialisasi keberadaan PKBM, khususnya program KBU yang dikembangkan PKBM, hal ini disebabkan karena PKBM merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat yang masih relatif baru di komunitas (berdiri tahun 2004) sehingga belum banyak warga yang mengetahui keberadaan dan program kegiatannya.
 - b. Masyarakat masih menganggap PKBM merupakan program pendidikan luar sekolah (PLS) sebagai suatu alternatif pendidikan dan bukan sebagai bagian dari pelayanan pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, sehingga kepercayaan warga terhadap PKBM masih kurang.

Disamping faktor penghambat, juga terdapat potensi yang dapat mendukung pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” yaitu:

- a. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP. No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, dan Kepmendiknas No. 055/v/2001 tanggal 19 april 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) PKBM.
 - c. Adanya kelembagaan lokal yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kegiatan PKBM, seperti (PKK, IKPSM, Karang Taruna, LPM, BKM, dan lembaga pemerintah yang terkait dengan kegiatan PKBM, termasuk pemerintah Desa Cinyasag).
 - d. Adanya modal sosial, berupa kepercayaan, ikatan-ikatan dalam komunitas, rasa solidaritas sosial diantara warga.
 - e. Nilai dan budaya lokal yang memandang kemiskinan merupakan masalah sosial yang harus ditanggulangi secara bersama-sama.
 - f. Potensi lokal.
3. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan KBU PKBM, maka perlu dirumuskan atau dilakukan strategi pengembangan kelembagaan tersebut secara partisipatif dan berdasarkan prinsip *Good Governance* yang melibatkan warga belajar, instruktur/pengelola, pemerintah Desa Cinyasag , pengurus kelembagaan/organisasi lokal, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, BPMKB Kabupaten Ciamis, Dinas Perekonomian dan Koperasi, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis, dan swasta. Strategi pengembangan KBU PKBM mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (Kepmendinas No. 055/v/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM PKBM) yang diarahkan pada :
- a. Pengembangan program keterampilan kerja yang partisipatif dan berorientasi ekonomi lokal.
 - b. Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan KBU.
 - c. Peningkatan layanan informasi program kegiatan KBU ke masyarakat.
 - d. Peningkatan jaringan dan koordinasi dan kemitraan dengan kelembagaan lokal dan swasta.
 - e. Peningkatan SDM instruktur/pengelola.

- f. Pembiayaan dari pemerintah, swadaya masyarakat dan pengelolaan KBU.
 - g. Peningkatan peran serta masyarakat (pemantauan dari pembina, tokoh masyarakat dan swasta).
 - h. Adanya potensi untuk memulai suatu usaha yang meliputi aspek :
 - 1) *Personal*, yaitu adanya kemauan untuk bekerja keras, kemauan untuk mandiri, kemauan untuk merintis masa depan, rasa percaya diri dan sebagainya
 - 2) *Sociological*, yaitu adanya dukungan dari teman belajar, keluarga dan saudara, dari para instruktur dan pengelola PKBM
 - 3) *Environmental*, yaitu adanya lingkungan yang mendukung usaha, dimana PKBM berdekatan dengan daerah industri yang sebagian besar bergerak di bidang tekstil, *garment*, dan bordir. Selain itu, keberadaan industri juga mendorong perkembangan sarana transportasi yang memerlukan sarana pendukung berupa usaha perbengkelan.
4. Berdasarkan hasil perumusan strategi pengembangan KBU PKBM ini, nantinya diharapkan layanan KBU dapat lebih berkualitas, memberikan pendidikan keterampilan dan pengalaman kerja yang mampu mendorong terbentuknya usaha ekonomi produktif dari warga belajar, baik secara perorangan maupun kelompok seperti Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (KUEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ataupun Industri Kecil yang berkembang di ekonomi lokal dan mampu meningkatkan kemandirian dan keberdayaan warga belajar (warga miskin dan pengangguran).

Gambar: 1.3
Kerangka Berpikir Kajian Pemberdayaan Masyarakat Melalui KBU
PKBM “Tresna Bhakti”



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Peta Sosial Desa Cinyasag

a. Letak Geografis

Desa Cinyasag adalah salah satu wilayah administratif di Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis dengan luas wilayah 479.749 Ha atau 11.993 Km², dengan kepadatan 85 jiwa/Ha atau 467 jiwa/Km². Jarak dari Desa Cinyasag ke Ibu Kota Kecamatan ± 3 KM, jarak ke ibu Kota Kabupaten Ciamis ± 35 KM dan jarak ke ibu Kota Provinsi Jawa Barat ± 175 KM. Kondisi wilayah Desa Cinyasag sebagian besar adalah tanah miring. Wilayah Desa Cinyasag dilalui jalan raya Propinsi yang menghubungkan Kota Tasikmalaya dengan Kota Cirebon,

Batas wilayah Desa Cinyasag adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan Desa Gardujaya dan GiriJara
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Panawangan
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Indragiri
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jagabaya

Desa Cinyasag terbagi dalam 7 Dusun 16 RW dan 48 RT, sebagian penduduknya bekerja sebagai petani. Seluruh penduduk sudah dapat memanfaatkan penerangan listrik dan memasak dengan menggunakan bahan bakar minyak tanah. Masih terdapat lahan terbuka hijau untuk persawahan dengan tingkat kesuburan tanah sedang, hasil dari bercocok tanam hanya dikonsumsi sendiri dan tidak dijual. Aktivitas warga dihubungkan dengan jalan beraspal dan ditunjang sarana transportasi ojeg. Penduduknya beragama Islam, sehingga kehidupan spiritual mereka diisi dengan acara-acara pengajian yang dilaksanakan secara rutin pada setiap minggunya.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk Desa Cinyasag pada Desember 2012 sebanyak 5.610 jiwa atau 1.728 KK, terdiri dari 2.708 laki-laki dan 2.902 perempuan dengan Rasio Jenis Kelamin (RJK) sebesar 98, artinya dalam setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk usia produktif

(15– 64 tahun) sebesar 3.622 jiwa atau 64,60 % dari jumlah penduduk, dengan Rasio Beban Tanggungan (RBT) Usia Produktif sebesar 64, artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 64 penduduk usia non produktif. Komposisi penduduk berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Penduduk Desa Cinyasag Berdasarkan Kelompok Umur

N O	KELOMPOK	JENIS KELAMIN		JUMLAH JIWA/ORG	PERSEN TASE (%)
	UMUR	LK	PRP		
1.	0 – 12 bulan	22	44	66	1.2
2.	1 – 4 Tahun	154	184	338	6.0
3.	5 – 6 Tahun	91	98	189	3.4
4.	7 – 12 Tahun	212	266	478	8.5
5.	13–15 Tahun	71	94	165	2.9
6.	16–18 Tahun	89	72	161	2.9
7.	19–25 Tahun	502	509	1011	18.0
8.	26–35 Tahun	467	415	882	15.7
9.	36–45 Tahun	341	353	694	12.4
10.	46–50 Tahun	165	181	346	6.2
11.	51–60 Tahun	288	240	528	9.4
12.	61–65 Tahun	145	181	326	5.8
13.	66–75 Tahun	99	155	254	4.5
14.	76< Tahun	62	109	171	3.0
	J U M L A H	2708	2902	5610	100

Sumber: Laporan Potensi Desa Cinyasag 2012

Jumlah penduduk Angkatan Kerja sebesar 3.948 orang dan Angka Reit Partisipasi Angkatan Kerja (RPAK) sebesar 39, artinya pada setiap 100 penduduk usia kerja terdapat 39 orang penduduk yang telah bekerja, hal ini melukiskan bahwa tingkat pengangguran di komunitas Cinyasag cukup tinggi. Berdasarkan laporan Kependudukan Desa Cinyasag 2012, terdapat 748 penduduk usia 16–65 tahun yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, yang terdiri dari pengangguran tetap sebesar 330 jiwa dimana mereka tidak mempunyai mata pencaharian sama sekali. Yang termasuk dalam kelompok ini digambarkan oleh Sekretaris Desa (Bapak ASP):

“Pengangguran di Desa Cinyasag kebanyakan adalah anak-anak muda yang telah selesai menamatkan pendidikan sekolah Lanjutan Atas atau putus sekolah tetapi tidak tertampung dalam lapangan pekerjaan karena tidak memiliki keterampilan.

Sedangkan yang termasuk dalam kelompok pengangguran tidak kentara berjumlah 523 jiwa, mereka adalah yang bekerja tetapi tidak tetap atau musiman, seperti buruh bangunan, tukang gali sumur, buruh angkut, buruh tani, dan para pekerja borongan.

Penduduk Desa Cinyasag berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Penduduk Cinyasag Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1.	Tidak Tamat SD	56	1
2.	Tamat SD	2250	49
3.	Tamat SLTP	1206	27
4.	Tamat SLTA	907	20
5.	Akademi / D3	52	1
6.	S1 / Sarjana	49	1
7.	S2	14	0
8.	S3	5	0
	J U M L A H	4.539	100

Catatan:

Jumlah Penduduk Seluruhnya = 5.610

Jumlah Penduduk usia 0-12 Tahun = 1.071

Jumlah Penduduk berdasarkan Pendidikan= 4.539

Sumber: Laporan Potensi Desa Cinyasag 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Cinyasag masih relatif rendah dimana penduduk yang menamatkan SD dan tidak melanjutkan ke tingkat SLTP cukup tinggi yaitu sebanyak 2.290 jiwa atau 40,81 %. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan SLTP tetapi tidak melanjutkan ke SMA berjumlah 907 jiwa atau 17,92 %. Relatif rendahnya tingkat pendidikan penduduk berpengaruh pada kecilnya kesempatan untuk bisa bersaing memperoleh lapangan pekerjaan di tingkat lokal yang jumlahnya sangat terbatas, terlebih dalam komunitas masyarakat Cinyasag juga tercatat 56 jiwa yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Komunitas penduduk Desa Cinyasag seluruhnya beragama Islam (100 %), (Data Potensi Desa BPS Kabupaten Ciamis 2012).

c. Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Desa Cinyasag sangat heterogen, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Desa Cinyasag Berdasarkan Mata Pencaharian

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (ORANG)	PERSENTASE (%)
1	2	3	4
1.	Petani	771	34.07
2.	Buruh tani	695	30.71
3.	Tukang Kayu/Batu	51	2.25
4.	Buruh bangunan	94	4.15
5.	Tukang Jahit	16	0.71
6.	Tukan Cukur	8	0.35
7.	Pedagang	52	2.30
8.	PNS	244	10.78
9.	TNI/POLRI	11	0.49
10.	Pensiunan TNI/POLRI	74	3.27
11.	Warung	78	3.45
12.	Home Industri	21	0.93
13.	Jasa Angkutan Speda	78	3.45
14.	Sewa Alat Pesta	6	0.27
15.	Tukang Rias	4	0.18
11	TKI	60	2.65
		2263	100

Sumber : Laporan Potensi Desa Cinyasag 2012

Tabel di atas menunjukkan mayoritas penduduk Desa Cinyasag bekerja sebagai petani (47,11 %) yang meliputi petani dan buruh tani yang lebih mengandalkan tenaga dari pada pendidikan, sehingga upah yang diterima kurang memenuhi kebutuhan keluarga. Penduduk yang bekerja sebagai buruh industri sangat kurang, kebanyakan bekerja di luar wilayah Desa Cinyasag, karena di Cinyasag hanya ada 10 buah industri kecil (Pengerajian Kayu dan huler Gabah). Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai buruh tukang sebagian bekerja di luar wilayah Cinyasag. Mata pencaharian penduduk yang menonjol lainnya adalah PNS (10.78 %) baik yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Ciamis, maupun di luar lingkungan pemerintah

Kabupaten majalengka. Keberadaan industri di Cinyasag kemudian memunculkan usaha sektor informal perdagangan, dan pelayanan jasa transportasi, seperti ojek, becak, delman dan angkot. Usaha perdagangan meliputi warung atau toko kelontong (436 buah) warung makan atau restoran (78 buah), wartel 1 buah, jasa angkutan ojeg (memiliki 2 pangkalan ojeg dan ada 75 unit motor/orang yang bekerja sebagai tukang ojeg), angkutan barang (4 orang), 4 unit perbengkelan dan 30 buruh.

d. Sumber Daya Lokal

Sumber daya lokal yang ada di Desa Cinyasag bisa dilihat dari sumber daya alam (lahan yang tersedia), kepemilikan aset tempat tinggal dan produksi, sumber daya manusia (SDM), dan kepemilikan kendaraan bermotor yang bernilai ekonomis. Dari luas wilayah Lahan yang tersedia 479.749 Ha, telah dipergunakan untuk pemukiman umum 89 Ha, pertanian sawah 202 Ha, lading/tehalan 56, 3949 ha, pekuburan 3.1 Ha. dan perkantoran dan sekolah 2.3 Ha. Dilihat dari kepemilikan tempat tinggal, penduduk yang telah mempunyai rumah sendiri sebanyak (1628 KK).

Sumber daya manusia atau tenaga kerja (usia produktif) di komunitas Desa Cinyasag cukup potensial. Meskipun sebagian besar penduduk berpendidikan relatif rendah, akan tetapi penduduk yang telah berhasil menamatkan SMA juga cukup besar, yaitu sebanyak 33,71 %, dan penduduk yang memiliki jenjang pendidikan di atas SMA sebanyak 11,17 %, hal tersebut memungkinkan mereka memiliki daya saing untuk memasuki lapangan pekerjaan di sektor formal Kelompok ini kebanyakan adalah warga yang tinggal di kompleks-kompleks perumahan.

e. Struktur Sosial

Struktur sosial komunitas masyarakat Cinyasag dicirikan oleh adanya sistem pelapisan sosial yang terjadi di dalamnya. Pelapisan sosial yang terbentuk dapat diamati dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki minat tertentu didasarkan pada:

- 1) Jabatan yang disandang baik formal maupun informal. Jabatan formal seperti perangkat Desa, pengurus RW dan pengurus RT. Sedangkan jabatan informal seperti orang yang duduk dalam kepengurusan organisasi baik organisasi keagamaan atau tokoh agama (ulama), maupun organisasi sosial-kemasyarakatan (PKK, IKPSM, BKM, LPM, BPD dan Karang Taruna).

- 2) Ketokohan kharismatik, yaitu orang-orang atau tokoh masyarakat yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat.
- 3) Jenis pekerjaan, seperti anggota komunitas yang bekerja di pemerintahan sebagai PNS, Polisi dan TNI, kemudian pengusaha.
- 4) Pendidikan formal yang ditempuh dan kekayaan yang dimiliki.
- 5) Sistem pelapisan sosial di komunitas Cinyasag juga memperhatikan jenjang pendidikan formal yang ditempuh anggotanya, karena pendidikan ini berkaitan dengan jenis pekerjaannya. Selain itu, kekayaan seseorang juga mempengaruhi cara pandang masyarakat kepada dirinya yang ditempatkan di kelas yang tinggi, terlebih kekayaan yang dimilikinya memberikan manfaat bagi warga sekitar.

f. Tanggapan Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Lokal

Masyarakat Desa Cinyasag memberi dukungan dan kepercayaan yang tinggi kepada tokoh masyarakat yang dianggap memiliki kepedulian dan perhatian terhadap masalah-masalah yang dihadapi warganya. Kepemimpinan formal dalam hal ini aparat Desa, Dusun, Ketua RW dan Ketua RT memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas kehidupan komunitas yang kondusif dan bersinergi dengan para pimpinan organisasi sosial dan keagamaan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak NNG Sekretaris Desa Cinyasag :

“Selama saya bekerja di Desa Cinyasag kurang lebih 13 tahun Kepatuhan masyarakat Cinyasag terhadap pemimpin dalam hal ini pemerintah Desa, Dusun, Ketua RW dan Ketua RT cukup tinggi karena mereka memang dipilih oleh warganya. Namun demikian bagi Ketua RW atau Ketua RT yang kurang memberikan perhatian dan kurang peduli dengan masalah warganya terutama warga yang kurang mampu, biasanya warga menjadi kurang menghormati kepemimpinannya”.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Kadus Puhun:

“Masyarakat Desa Cinyasag , khususnya di Kampung/dusun Puhun umumnya patuh dengan kepemimpinan Kadus RW dan Ketua RTnya, karena Ketua RW dan Ketua RT adalah tokoh masyarakat yang menjembatani atau memfasilitasi kebutuhan warga dengan program-program pemerintah, baik yang bersifat program bantuan seperti bantuan Raskin, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Askeskin maupun program pembangunan”.

Berdasarkan informasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Cinyasag melihat seorang figur pemimpin sebagai orang yang dianggap memiliki kedudukan atau jabatan, serta mempunyai kepedulian

kepada warga miskin, serta dapat dipercaya mampu mengakomodir berbagai aspirasi yang berasal dari masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Rosidin (Karang Taruna dan Bapak ADT (waga Dusun Puhun desa Cinyasag)

“Kami Warga Dusun Puhun Desa Cinyasag disini melihat dan menghargai pemimpin sebagai seorang wakil warga masyarakat yang bisa dijadikan contoh dan tauladan yang baik, serta memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap orang miskin”

Selain sebagai tokoh masyarakat yang bersifat formal, Kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT bersama dengan tokoh agama juga berperan mengaktifkan warga dalam hal memupuk kebersamaan melalui kegiatan kerja bakti sebulan sekali dan juga dalam menyambut perayaan-perayaan nasional maupun keagamaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari aparat Desa Cinyasag tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang diharapkan oleh warga adalah pemimpin yang bisa dijadikan figur dan tauladan, sekaligus memiliki kepekaan sosial terhadap warganya.

g. Kelembagaan dan Organisasi

Kelembagaan sosial yang ada di komunitas terbentuk berdasarkan inisiatif dari warga dan dari pihak luar (Pemerintah), misalnya PKK (memiliki kader 967 orang), Dasa Wisma (508 orang) Pos yandu (memiliki kader 107 orang), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Karang Taruna (memiliki kader 214 orang), Taman Kanak-kanak (3 buah), Sekolah Dasar Negeri dan Swasta (4 buah), SLTP negeri dan swasta (1 buah), SMA negeri (1 buah), pondok pesantren (2 buah), penyelenggara perguruan tinggi swasta (1 buah), dan Poliklinik atau Balai Kesehatan Desa 1 buah.

Kelembagaan-kelembagaan yang dimunculkan dalam bentuk organisasi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan komunitas di antaranya kebutuhan spiritual, pendidikan, kesehatan, politik, mata pencaharian, dan kebutuhan sosial, juga sebagai tempat proses sosialisasi tentang norma-norma, aturan-aturan yang berlaku dan harus ditaati oleh warga. Berikut kelembagaan yang ada di komunitas Desa Cinyasag:

- 1) Lembaga keagamaan : DKM, IPMA, MUI, Majelis ta'lim
- 2) Lembaga politik : Organisasi Partai politik
- 3) Lembaga Kesehatan : Posyandu, poliklinik,
- 4) Lembaga pendidikan : Sekolah SD, SLTP & SLTA, Pondok Pesantren, PKBM,
- 5) Lembaga keuangan : Bank, Koperasi Pondok Pesantren

- 6) Lembaga Kesenian : Calung
- 7) Lembaga Pemerintahan : Desa, kantor pemerintah
- 8) Lembaga sosial : PKK, IKPSM, KT, Orsos, Ormas, LSM
- 9) Lembaga kemasyarakatan : gotong royong (kerja bakti), Arisan.

h. Permasalahan Sosial

Permasalahan sosial yang paling menonjol di Desa Cinyasag adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk miskin di Desa Cinyasag sebanyak 173 KK atau 10 % dari 1.728 KK yang ada di wilayah Desa Cinyasag (165 KK adalah penerima BLT), atau 9 % dari jumlah seluruh keluarga miskin yang ada di Kabupaten Ciamis (14.078 KK). Kantong-kantong kemiskinan di Desa Cinyasag tersebar di Dusun Puhun, Kaliwon, Cirikip, Kondang, Gudang dan Cenkirmanis besar warganya bekerja sebagai buruh tani.

Contoh lain dari keluarga miskin adalah keluarga Bapak STRM (75 tahun) warga RT 04 RW 02 Dusun Puhun, ayah dua anak yang bekerja sebagai buruh tani (tukang macul) penarik becak di kompleks perumahan ABRI Desa Baros:

“Saya buburuh macul sudah 30 tahun lamanya, sebelumnya saya bekerja sebagai tukang batu. Pendapatan perhari dari nyangkut 15.000,- sampai dengan 30 ribu per hari. Dengan penghasilan tersebut saya hanya bisa menyekolahkan anak hingga SD, bahkan yang paling kecil DO kelas 1 SD. Saya tidak punya keterampilan lain untuk mencari pekerjaan yang pendapatannya lebih baik, sedangkan untuk masuk pabrik tidak bisa karena pendidikan saya hanya sampai SD kelas 4.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik gambaran bahwa keluarga miskin di Desa Cinyasag memiliki karakteristik:

- 1) Berpendidikan relatif rendah (tidak tamat Sekolah Dasar).
- 2) Bergantung pada sedikit sumber penghasilan tertentu.
- 3) Tidak memiliki keterampilan.
- 4) Tidak memiliki lahan untuk aktivitas ekonomi.
- 5) Kurang mendapatkan informasi dan tidak mempunyai koneksi.

Dengan melihat karakteristik dari keluarga miskin di Desa Cinyasag ini, maka strategi atau program pengentasan kemiskinan yang dianggap relevan adalah dengan meningkatkan keterampilan kerja yang mendorong produktivitas keluarga miskin yang salah satunya adalah melalui Kelompok Belajar Usaha (KBU) di PKBM “Mitra Mandiri” Desa Cinyasag.

2. Evaluasi Program Pengembangan Masyarakat Oleh PKBM “Tresna Bhakti” Desa Cinyasag

Terdapat beberapa kegiatan pengembangan masyarakat yang pernah

dan masih dilakukan di wilayah Desa Cinyasag yang ditandai dengan terbentuknya kelembagaan/organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Kelompok Usaha Bersama (KU BE pembuatan tutup botol dari kaleng, KUBE pembuatan sapu ijuk, dan KUBE pembuatan Sapu Ijuk), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, IKPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat), BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang terkait dengan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mempunyai dua program, yaitu program pendidikan kesetaraan (Paket B dan Paket C) dan program Kelompok Belajar Usaha (KBU

Sejalan dengan visi Jawa Barat 2008-2013 yang mencanangkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80 pada tahun 2010 dengan pengertian bahwa kehidupan masyarakat Jawa Barat diharapkan dapat lebih sejahtera dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli), maka upaya meningkatkan pendidikan dan keterampilan usaha ekonomi masyarakat merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Ciamis yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan dan program pendidikan keterampilan dan usaha (Kelompok Belajar Usaha) memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan pendidikan dan kemampuan warga miskin untuk mengembangkan keterampilan dan usaha ekonomi produktifnya yang diharapkan nantinya warga miskin mampu menjalankan fungsi sosialnya secara ekonomi yang secara langsung diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Evaluasi Kegiatan PKBM “Tresna Bhakti”

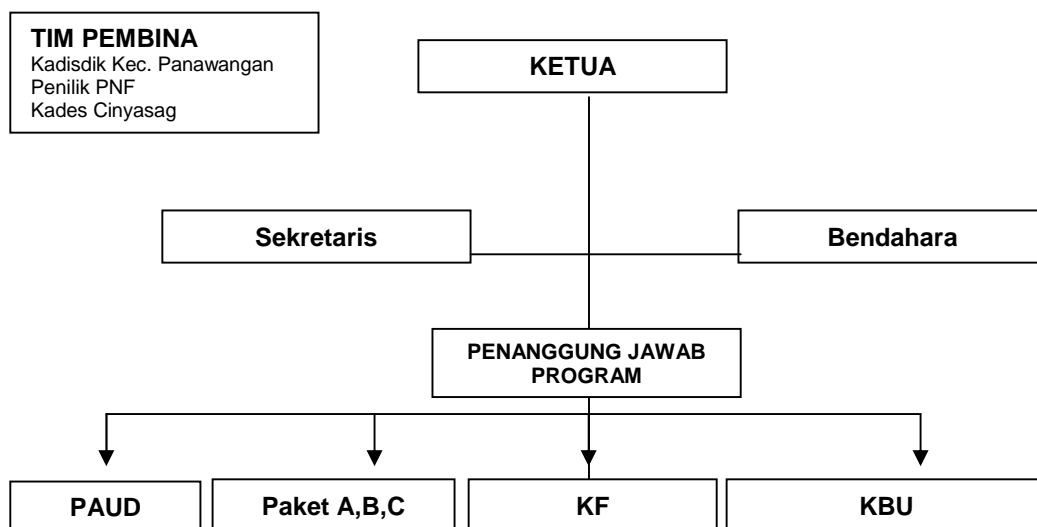
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ‘Tresna Bhakti’ Desa Cinyasag adalah salah satu PKBM yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis , berdiri pada tahun 2004 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Nomor: 421 .9/56/UPTD-Disdik/2008. PKBM “Tresna Bhakti” atas prakarsa dari seorang warga Dusun Puhun. (OR) yang peduli dengan masalah pendidikan dan banyaknya anak-anak muda yang tidak tertampung dalam dunia kerja karena tidak memiliki keterampilan kerja. Hasil pendataan keluarga yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Keluarga Berencana Kabupaten Ciamis tahun 2010 dan 2011, mencatat anak usia sekolah yang berumur 7–12 tahun yang tidak bersekolah mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir, yaitu dari 170 anak pada tahun 2010, meningkat menjadi 192 anak pada tahun 2011. Sedangkan pada usia 13 – 15 tahun dari 172 anak pada tahun 2012 meskipun menurun menjadi 132 anak pada tahun 2011, namun angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan angka putus sekolah di Desa lainnya. Fenomena anak putus sekolah di Desa Cinyasag memberikan gambaran tingginya jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut. Menurut catatan BPMKB jumlah keluarga miskin di Desa Cinyasag pada tahun 2010 mencapai (240 KK di antaranya adalah penerima BLT) atau 23,69 % dari 1728 KK yang ada di 7 Dusun. Sedangkan untuk pengangguran BPMKB mencatat sekitar 165 KK tidak memiliki pekerjaan termasuk di dalamnya warga yang sebelumnya bekerja.

b. Struktur Organisasi PKBM Mitra Mandiri.

PKBM “Tresna Bhakti” didirikan dengan maksud untuk membantu kelangsungan pendidikan anak usia sekolah yang putus sekolah karena alasan ekonomi maupun karena alasan psikologis, sekaligus sebagai wadah pembelajaran keterampilan usaha ekonomi yang dibutuhkan warga masyarakat miskin dan pengangguran.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PKBM “Tresna BhaKTI”



Sumber: Pengelola PKBM “Tresna Bhakti” 2012

c. Tujuan dan Fungsi PKBM “Tresna Bhakti”

Tujuan

PKBM “Tresna Bhakti” bertujuan untuk memberikan pendidikan pengetahuan dan keterampilan usaha kepada anak putus sekolah dan warga masyarakat melalui program: Paket B (setara SLTP), Paket C (setara SMA) dan kegiatan Kelompok Belajar Usaha (KBU).

Fungsi

Fungsi dari PKBM “Tresna Bhakti” adalah :

- 1) Sebagai sumber informasi dan tempat belajar bagi warga masyarakat yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja
- 2) Sebagai ajang pertukaran berbagai pengetahuan dan keterampilan diantara warga masyarakat

d. Kegiatan PKBM ‘Tresna Bhakti’

Kegiatan yang dilaksanakan di PKBM “Tresna Bhakti meliputi: Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Program pendidikan kesetaraan Paket B, Paket C dan Program Kelompok Belajar Usaha (KBU) yang kesemuanya dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu.

Tabel 4.4
Kegiatan PKBM “Tresna Bhakti” Tahun 2012

N O	PROGRAM KEGIATAN	HARI	WAKTU	KETERANGAN
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Senin – Rabu	08.00 – 10.00	Usia 3 – 4 tahun
			10.00 – 12.00	Usia 5 – 6 tahun
2	Paket B	Kamis– Sabtu	13.00 – 17.00	Setara SMP
3	Paket C	Jum’at–Sabtu	13.00 – 17.00	Setara SMA
4.	Keaksaraan Fungsional (KF)	Sabtu	10.00 – 13.00	Dewasa
5.	Kelompok Belajar Usaha (KBU)	Senin – Rabu		Membuat Batako, Sapu ijuk dan Makanan ringan

Sumber : Laporan Kegiatan PKBM “Tresna Bhakti” tahun 2012

e. Sumber Dana

Sumber dana yang menunjang kegiatan PKBM “Tresna Bhakti” berasal dari Ditjen PLS Depdiknas RI (APBN), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis (APBD), dan swadaya dari warga belajar sebagaimana diungkapkan oleh Bapak ES (Pengelola PKBM Tresna Bhakti):

“Dana operasional untuk kegiatan pendidikan kesetaraan PKBM diperoleh dari APBN melalui Ditjen PLS Depdiknas sebesar Rp. 10.000.000,- per Triwulan dan juga dari swadaya warga masyarakat yaitu dari murid PAUD sebesar Rp. 10.000,- bagi yang mampu dan Rp. 5.000,- bagi yang kurang mampu, kemudian dari siswa program Paket C sebesar Rp. 650.000,- bagi kelas I, Rp. 750.000,- bagi kelas 2 dan Rp. 850.000,- bagi kelas 3”. Sedangkan untuk KBU kita pernah mendapatkan dana bantuan untuk pengembangan KBU dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 600.000,-, alat dan bahan ijuk dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dana untuk pelatihan spare part motor dan elektro dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 50.000.000,-“

f. Jenis Keterampilan KBU

Kegiatan keterampilan yang pernah dan masih dikembangkan di KBU PKBM “Tresna Bhakti” sebagai berikut:

Tabel 4.5
Keterampilan Yang Dikembangkan Kelompok Belajar Usaha(KBU)
PKBM “Tresna Bhakti”

NO	KETERAMPILAN	TAHUN	SUMBER DANA/MODAL	KETERANGAN
1.	PembuatanSapu ijuk	Desember 2008	Bantuan alat dan bahan ijuk dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat	Masih berjalan tetapi tidak rutin, karena keterbatasan pemasaran (hanya disetorkan ke sekolah-sekolah)
2.	Pembuatan Batako	April 2009	Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis (Rp. 600 ribu)	Masih berjalan tetapi tidak rutin karena keterbatasan pemasaran (hanya melaESIA permintaan warga sekitar),
3	<i>Spare part</i> motor dan Elektro	Juni 2010	Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat (Rp. 50 juta)	Sudah tidak berjalan sejak Maret 2006, karena kendala pemasaran dan alat-alat produksi rusak

NO	KETERAMPILAN	TAHUN	SUMBER DANA/MODAL	KETERANGAN
4.	Pembuatan Makanan Ringan (rrangginang/opak ketan)	Desember 2011	Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis (Rp. 200 ribu)	Produk KBU tidak dipasarkan atau hanya dikonsumsi sendiri, (hanya untuk menambah pengetahuan saja)
5.	Kursi Bambu Hitam	Mei 2012	Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis (Rp. 750 ribu)	Produk KBU tidak dipasarkan atau hanya dikonsumsi sendiri, (hanya untuk menambah pengetahuan saja)

Sumber : Pengelola PKBM "Tresna Bhakti" 2012

g. Rekrutmen Warga Belajar

Sebelum mendirikan PKBM "Tresna Bhakti" Bapak OHR adalah Kepala Sekolah di SD Nagrajati I, dan menjadi tutor di PKBM "Tunas Siliwangi Dikmas" Desa Cinyasag. Setelah itu ia kemudian mendirikan PKBM "Tresna Bhakti" yang warga belajarnya sebagian berasal dari PKBM Tunas Siliwangi

Dikmas yang tinggal di luar wilayah Desa Cinyasag. Cara rekrutmen warga belajar lainnya dilakukan melalui para tutor yang memberikan informasi ke sekolah-sekolah dan pemasangan spanduk yang memuat informasi tentang penerimaan murid baru PKMB "Tresna Bhakti". Sedangkan untuk rekrutmen warga belajar program KBU pengelola menawarkan kepada peserta paket B dan paket C juga kepada warga disekitar PKBM, sebagaimana diungkapkan Bapak ES:

"Rekrutmen warga belajar kami lakukan dengan cara penyebarluasan informasi melalui para Tutor ke sekolah-sekolah, pemasangan spanduk dan penyebarluasan informasi oleh warga belajar di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Dalam rekrutmen warga belajar KBU kami tawarkan kepada anak-anak warga belajar paket B dan Paket C, sedangkan untuk warga belajar KBU seperti *spare part* motor dan elektro kami tawarkan ke para pemuda DUSUN PUHUN yang berminat di lingkungan sekitar PKBM. Dalam rekrutmen warga belajar maupun dalam pelaksanaan Kegiatan kami belum mengadakan kerjasama dengan organisasi lokal seperti PKK, Karang Taruna, IKPSM, BKM, dan LPM"

h. Warga Belajar

Warga belajar PKBM “Tresna Bhakti” terdiri dari:

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini sebanyak 40 anak
- 2) Program Paket B :
 - Kelas 1 sebanyak 20 anak,
 - Kelas 2 sebanyak 22 anak,
 - Kelas 3 sebanyak 25 anak,
- 3) Program Paket C sebanyak 16 anak
- 4) Kelompok Belajar Usaha (KBU) :
 - Batako 2 orang
 - Makanan ringan 10 orang
 - Sapu ijuk 10 orang
 - Spare part motor 16 orang (sudah keluar)
 - Elektro 10 orang (sudah keluar)

KBU PKBM telah memberikan pelatihan ketrampilan *spare part* motor (16 orang) dan keterampilan elektro (10 orang) untuk memperbaiki amplifier, travo, adaptor dan lain-lain) kepada warga (Karang Taruna) di Dusun Puhun Desa Cinyasag pada tanggal 7 – 18 Desember 2009.

i. Latar Belakang Warga Belajar.

Warga belajar yang bersekolah di PKBM hampir seluruhnya karena alasan ekonomi, tetapi ada juga yang karena alasan psikologis sebagaimana diungkapkan oleh beberapa warga belajar:

- 1) SM (14 tahun) siswa Paket B Kelas 2:

“Saya masuk ke PKBM mulai bulan Maret 2007 pindahan dari SMP MTs Kawali. Orang tua saya terkena PHK 2 tahun lalu, orang tua saya tidak mampu lagi membiayai saya di sekolah umum”.

- 2) HYT (14 tahun) Siswa Paket B Kelas 2:

“Saya sekolah di PKBM sejak Januari 2007 pindahan dari SMPN Panawangan. Di Wiyata Bakti gurunya galak-galak, dan sering memarahi saya, sehingga saya tidak merasa kerasan dan sering sakit, akhirnya saya dipindahkan sekolah ke PKBM oleh orang tua”.

- 3) LKS (laki-laki, 18 tahun) siswa Paket C kelas 3:

“Dulu saya bersekolah di MTs Cinyasag, tetapi waktu di kelas 2 saya dikeluarkan karena tertangkap miras oleh guru, karena tidak ada sekolah yang mau menerima saya, akhirnya orang tua saya memasukkan ke PKBM”.

Sedangkan warga belajar yang mengikuti KBU adalah warga belajar paket B dan paket C yang menginginkan pendidikan tambahan berupa keterampilan, serta warga masyarakat sekitar yang tidak memiliki pekerjaan,

meskipun keterampilan yang ada kurang sesuai dengan keinginan mereka akan tetapi mereka mengikuti juga dengan alasan karena ada upahnya, sebagaimana diungkapkan oleh SFL 17 tahun, salah seorang warga belajar KBU pembuatan sapu ijuk :

“Bagus sekali di PKBM ada keterampilannya, jadi disamping belajar di sekolah kita juga bisa belajar keterampilan untuk bekal cari kerja, cuma keterampilan disini masih tradisional, kurang menarik untuk anak muda, kamipun sebenarnya kurang semangat. Untungnya di KBU kami mendapat upah, jadi meskipun kurang senang tetapi hasilnya bisa buat ongkos ke sekolah”.

j. Tenaga Tutor dan Instruktur

Tenaga Tutor di PKBM diambil dari para guru yang mengajar di sekolah-sekolah formal, pensiunan guru maupun mereka yang peduli dengan masalah pendidikan.

Tabel 4.6
Tenaga Tutor PKBM “Tresna Bhakti”

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1	Enah Sukanah, S.Pd.	Tutor PAUD	S1
2	Koko Komariah, S.Pd	Tutor PAUD	S1
3	Tating Suhartini	Tutor PAUD	SMA
4	Uun Unasih	Tutor PAUD	S1
5	Asih, S.Pd, M.M.Pd	Tutor Paket B & C	S2
6	Ohen Rohaendi, S.Pd	Tutor Paket B & C	S1
7	Enah Sukaenah, S.Pd	Tutor Paket B	S1
8	Udin Jamaludin, S.Pd.I	Tutor Paket B & C	S1
9	Ade Hendarwati	Tutor Paket B	D1
10	Heri Herlina	Tutor Paket B & KBU	SMA
11	Uum Uminah, S.Pd	Tutor Paket B & KBU	S1
12	Tati Mulyana	Tutor Paket B	SMA
13	Yoyo Herdiana, S.Pd	Tutor Paket B & C	S1
14	Udey Mulyana, S.Pd	Tutor Paket B & C	S1
15	Aj. IKIN ASIKIN	Tutor Paket, C & KBU Sapu ijuk	SMA
16	Emah Fatimah, S.Pd	Tutor KBU Makanan Ringan	S1
17	Dede A. Hasanuddin	Tutor KBU Komputer	SMA

Sumber : Laporan Kegiatan PKBM 2012

k. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung proses belajar, baik program pendidikan kesetaraan maupun KBU PKBM “Tresna Bhakti” menggunakan gedung pendidikan dan beberapa gedung kecil untuk kantor dan ruang keterampilan yang pernah dibangun Yayasan Swadaya Masyarakat Tresna Bhati di atas tanah seluas 1750 M². PKBM “Tresna Bhakti”.yang memiliki ruangan atau 3 kelas dan beberapa gedung kecil lainnya untuk kantor dan tempat praktek keterampilan. Sarana dan prasarana yang ada masih dirasakan kurang oleh pihak pengelola, khususnya untuk pengembangan keterampilan dan belajar usaha yang hanya memiliki 1 ruang kelas berukuran 5 x 5 meter.

Tabel 4.7
Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Kegiatan
PKBM “Tresna Bhakti”

NO	FASILITAS	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Luas Tanah	1750 M2	Milik PKBM
2	Gedung Belajar PAKET	2 Kelas	Milik PKBM
3	Gedung Belajar PAUD	2 kelas	Milik PKBM
4	Gedung Kantor	2 kelas	Milik PKBM
5	Gedung Keterampilan	1 kelas	Milik PKBM
6	Gedung Perpustakaan	1 kelas	Milik PKBM
7	Meja + Kursi Belajar	5 buah	Milik PKBM
8	Kursi belajar	140 buah	Milik PKBM
9	Meja Kursi Guru	14 buah	Milik PKBM
10	Kursi Tamu	5 stel	Milik PKBM
11	Lemari buku	11 buah	Milik PKBM
12	Rak buku	13 buah	Milik PKBM
13	Loker guru	13 buah	Milik PKBM
14	Mesin Tik	1 buah	Milik PKBM
15	Komputer	4 unit	Milik PKBM
16	Mesin Jahit Biasa	3 buah	Milik PKBM

1	2	3	4
17	Mesin Jahit JUKI	2 buah	Milik PKBM
18	Excel	2 buah	Milik PKBM
19	Buku Modul	46 set	Milik PKBM

Sumber: Laporan Kegiatan PKBM Tresna Bhakti 2011

1. Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh PKBM “Tresna Bhakti” baik dalam program pendidikan kesetaraan maupun dalam program Kelompok Belajar Usaha, meliputi:

- a. Pada program pendidikan kesetaraan PKBM “Tresna Bhakti” dihadapkan oleh masalah ketidakhadiran warga belajar (murid Paket B dan Paket C) sebagaimana diungkapkan oleh Bapak OHR :

“Masalah yang kami hadapi berkaitan dengan program pendidikan kesetaraan disini terutama adalah kehadiran warga belajar. Anak-anak sering tidak masuk sekolah, kehadiran mereka rata-rata setiap pertemuan kurang dari 10 orang pada setiap kelas. Alasannya, mereka tidak mempunyai uang transport untuk datang ke sekolah”.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak ANT, seorang Tutor Bahasa Inggris yang mengajar di PKBM ”Tresna Bhakti” :

“Hingga saat ini kami belum bisa mempertahankan kehadiran murid seluruhnya untuk selalu hadir dalam kelas, alasan mereka tidak dapat datang ke sekolah dikarenakan tidak mempunyai uang transpot atau karena lelah setelah bekerja”.

Informasi lain tentang masalah ketidakhadiran warga belajar juga diperoleh dari salah seorang warga belajar DWY, 19 tahun (murid Paket C kelas 3)

“Saya dulu lulusan sebuah SMP swasta di Garut, karena tidak mempunyai biaya, saya kemudian bekerja sebagai tenaga administasi di sebuah Rumah Bersalin milik saudara saya di Ciamis. Saya melanjutkan sekolah ke PKBM karena saya tidak cukup punya waktu untuk bersekolah di sekolah formal. Sedangkan di PKBM sekolahnya seminggu hanya dua kali, Jum’at dan Sabtu. Sejak saya masuk di PKBM Januari 2010 murid yang hadir hanya enam atau tujuh orang saja”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa masalah ketidakhadiran warga belajar sebenarnya disebabkan sebagian besar warga belajar tinggal di tempat yang agak jauh dari PKBM yang

perjalanannya membutuhkan ongkos, sehingga meskipun mereka tidak dibebankan biaya sekolah akan tetapi mereka kesulitan untuk menyediakan uang transport ke sekolah. Untuk menutupi kebutuhan uang transport beberapa warga belajar bekerja sebagai pedagang keliling seperti berjualan cilok, berjualan kresek di pasar, berjualan rokok, menjadi buruh angkut barang, bahkan ada yang menjadi pengamen yang mana membuat mereka kelelahan setelah bekerja dan akhirnya sering tidak datang ke sekolah. Namun demikian berdasarkan sumber dari tutor yang lain ada juga warga belajar yang sering tidak hadir ke PKBM karena merasa malu bersekolah di PKBM.

- b. Masalah kesulitan mendapatkan informasi (data) untuk rekrutmen warga belajar, sebagaimana diungkapkan Bapak ES:

“Dalam hal rekrutmen warga belajar kami juga merasa kesulitan dengan ketiadaan informasi atau data anak putus sekolah di Desa Cinyasag , sehingga sosialisasi rekrutmen calon warga belajar kami sampaikan melalui para tutor yang mengajar di sekolah-sekolah, warga belajar dan pemasangan spanduk”.

Permasalahan ini timbul karena dalam operasional kegiatan PKBM, khususnya dalam rekrutmen calon warga belajar pihak pengelola kurang menjalin kerjasama dengan kelembagaan lokal dan instansi pemerintah terkait yang mempunyai akses data anak putus sekolah misalnya BPMKB Kabupaten Ciamis, organisasi PKK dan IKPSM yang sasaran garapannya berkaitan dengan masalah kesejahteraan sosial berbasis keluarga.

- c. Sedangkan pada program KBU berdasarkan hasil wawancara dengan para tutor dan pengelola PKBM beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan KBU meliputi: (1) Masih kurangnya minat masyarakat terhadap program KBU di PKBM Tresna Bhakti (2) Masih kurang mendukungnya sarana dan prasarana (3) Kesulitan dalam hal pemasaran, sehingga KBU sulit berkembang sebagaimana diungkapkan oleh Bapak ES:

“Permasalahan KBU di PKBM “Tresna Bhakti” sebenarnya cukup banyak, yaitu : Masih kurangnya minat masyarakat terhadap program KBU, padahal warga miskin dan pemuda yang belum bekerja di Desa Cinyasag, terutama di Dusun Puhun cukup banyak, tetapi sepertinya mereka kurang tertarik untuk ikut belajar keterampilan di PKBM. Kebanyakan dari mereka inginnya bekerja di pabrik dan dapat gaji daripada belajar berwiraswasta. Pernah kami memberikan pelatihan elektro kepada

warga sekaligus menyediakan fasilitas tempat usaha, akan tetapi baru berjalan satu bulan mereka sudah tidak mau dan keluar dari KBU, sehingga akhirnya KBU elektro terhenti. Masalah yang kedua masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan KBU. Disini kami hanya mempunyai satu ruang keterampilan sedangkan keterampilan yang kami kembangkan lebih dari satu. Ketiga adalah masalah pemasaran, hingga saat ini kami masih merasa kesulitan dalam hal memasarkan hasil KBU, baik batako maupun sapu ijuk, semuanya sulit masuk pasar, karena pasar sudah mempunyai rekanan sendiri. bahkan untuk KBU *spare part* motor dan elektro sudah lama terhenti karena kesulitan pemasaran, ditambah alat-alat produksinya sudah banyak yang rusak dan kami tidak punya dana untuk memperbaikinya”.

Apa yang disampaikan oleh pengelola PKBM tentang minat masyarakat terhadap program KBU, ternyata warga masyarakat mempunyai anggapan lain, seperti yang diungkapkan oleh ADR (23 tahun) salah seorang pemuda Karang Taruna warga DUSUN PUHUN yang mengetahui adanya KBU di PKBM “Tresna Bhakti” :

”Kami warga RW 18, khususnya para pemuda yang belum memiliki pekerjaan sebenarnya senang dengan adanya KBU PKBM, akan tetapi keterampilan yang dikembangkan oleh pengelola menurut saya kurang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga masyarakat, seperti membuat batako dan sapu ijuk. Jika pengelola PKBM mengembangkan Keterampilan seperti perbengkelan sepeda motor atau mobil mungkin kami akan berminat karena sepertinya memiliki prospek yang lebih baik”.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Ibu TJ (60 tahun) Ketua IKPSM Desa Cinyasag yang menyatakan:

”Sebenarnya kurangnya minat warga untuk belajar keterampilan di PKBM belum tentu karena mereka tidak mau, akan tetapi bisa juga karena warga belum tahu tentang adanya kegiatan KBU PKBM. Kebanyakan masyarakat hanya tahu kalau PKBM itu adalah lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan bagi warga yang putus sekolah saja”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis keterampilan yang dikembangkan di PKBM “Tresna Bhakti” belum bersifat partisipatif dan masih ditentukan oleh pihak pengelola yang belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat. Disamping itu keberadaan PKBM di komunitas Desa Cinyasag juga belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat yang tersebar di 7 Dusun , 48 RT hal tersebut memberikan gambaran bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pengelola belum optimal.

2. Ikhtisar

PKBM “Tresna Bhakti” Desa Cinyasag merupakan salah satu lembaga

pemberdayaan masyarakat yang memberikan pelayanan atau bertujuan meningkatkan pendidikan dan keterampilan masyarakat. Meskipun pembentukan PKBM berdasarkan aspirasi dari masyarakat, namun pada pelaksanaan program pelayanannya masih bersifat *top down*, khususnya pada pelaksanaan program Kelompok Belajar Usaha (KBU) yang mana pemilihan jenis keterampilan yang dikembangkan belum berdasarkan aspirasi atau kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi lokal, melainkan berdasarkan kebijakan pemerintah dan pihak pengelola, akibatnya keterlibatan warga belajar dalam KBU kurang optimal, seperti tidak terlibat dalam pemasaran. Kegagalan KBU *spare part* motor dan elektro sesungguhnya juga disebabkan kebijakan yang bersifat *top down*. Dalam perspektif *Good Governance* (tata kelola kelembagaan yang baik), pelaksanaan program KBU di PKBM “Tresna Bhakti” sebenarnya sudah melibatkan tiga ruang kekuasaan yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta, akan tetapi masih belum optimal, dan jika dilihat dari tahapan perkembangan PKBM, maka PKBM “Tresna Bhakti” belum bisa dikatakan mandiri.

Mengingat betapa penting dan strategisnya peran PKBM dalam pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Kelompok Belajar Usaha (KBU) yang memberikan pendidikan keterampilan dan pengalaman belajar usaha bagi warga miskin dan pengangguran, agar mereka memperoleh kesempatan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, maka eksistensi KBU PKBM “Tresna Bhakti” perlu terus ditata dan dikembangkan, sehingga KBU nantinya diharapkan benar-benar dapat menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas dirinya dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Berdasarkan hasil evaluasi penulis pelaksanaan kegiatan Kelompok Belajar Usaha di PKBM “Tresna Bhakti” masih menghadapi berbagai kendala, antara lain yaitu :

1. Pelayanan KBU masih belum menjangkau seluruh komunitas. Warga masyarakat Desa Cinyasag masih banyak yang belum mengenal PKBM atau program-program yang diselenggarakan PKBM.
2. Kurangnya sarana penunjang kegiatan KBU berupa ruang keterampilan yang memadai.
3. Minat masyarakat terhadap program keterampilan di PKBM masih kurang.
4. Kesulitan dalam pemasaran hasil keterampilan, sehingga KBU kurang

berkembang.

5. Belum adanya jalinan/kurangnya dukungan dari kelembagaan lokal.
6. Setelah mendapat keterampilan warga belajar belum mampu membuka usaha sendiri (*Spare part* motor dan elektro).

B. Upaya Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”

1. Permasalahan KBU “Tresna Bhakti”

Sejak dikembangkannya KBU PKBM “Tresna Bhakti” pada April 2005, KBU .belum juga menampakkan hasil yang menggembirakan, output terwujudnya keberdayaan masyarakat masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan karena dalam kegiatannya, KBU PKBM “Tresna Bhakti” menghadapi beberapa permasalahan. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan KBU setidaknya terdapat tiga aspek penting yang akan dilihat, yaitu motivasi warga belajar dalam mengikuti KBU, sarana dan prasarana yang mendukung, dan pemasaran hasil KBU.

a. Motivasi Warga Belajar

Motivasi memegang peranan penting dalam kegiatan KBU. Jika warga belajar memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan KBU, maka KBU akan berjalan dengan dinamis dan akan menghasilkan proses belajar yang optimal, dan KBU akan berkembang sebagaimana yang diharapkan. Akan tetapi, tidak demikian dengan apa yang terjadi pada warga belajar yang mengikuti kegiatan KBU sapu ijuk dan batako, sebagaimana diungkapkan oleh pihak pengelola (Bapak ES) :

“Warga belajar KBU sapu ijuk sebanyak 10 orang semuanya laki-laki, mereka warga belajar paket B dan paket C yang kami tawarkan mengikuti KBU, sedangkan yang mengikuti KBU batako hanya 2 orang, mereka adalah warga masyarakat sekitar. Motivasi anak-anak dalam kegiatan KBU sapu ijuk sebenarnya kurang antusias, mereka enggan dalam memasarkan hasil produksi, mungkin karena masih anak-anak yang masih senang bermain, maka respon mereka dalam kegiatan KBU kurang serius. Untuk merangsang semangat, kami beri upah Rp. 600,- per sapu yang mereka buat. Pada KBU batako, warga belajar juga tidak mau ikut dalam memasarkan hasil KBU, bahkan kadang-kadang mereka tidak mau datang membantu membuat batako pesanan warga”.

Apa yang disampaikan oleh pengelola PKBM dibenarkan oleh instruktur KBU sapu ijuk dan batako sebagaimana disampaikan oleh Bapak DRY :

“Kecuali keterampilan membuat makanan ringan yang diikuti oleh anak-

anak perempuan, saya akui bahwa anak-anak memang kurang menyukai keterampilan membuat sapu ijuk, tetapi kami terus memberikan nasehat dan pengertian bahwa keterampilan ini sangat penting bagi mereka untuk bekal hidup mandiri setelah keluar dari PKBM”.

Motivasi adalah daya dorong yang ada di dalam diri manusia yang mempengaruhi dirinya untuk bertingkah laku tertentu. Sedangkan seluruh aktivitas mental yang dirasakan dan memberikan kondisi hingga terjadinya perilaku disebut sebagai motif (Adi, 1994). Menurut McClelland (1953) dalam Adi (1994) motivasi seseorang itu dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mencapai sesuatu, artinya jika seseorang mempunyai motif untuk mencapai sesuatu yang cukup menantang dan menjanjikan kesuksesan, maka dorongan yang ada dalam dirinya akan semakin besar, dan ia akan cenderung untuk terus menerus memperbaiki kinerjanya. Karena keterampilan yang dikembangkan KBU PKBM “Tresna Bhakti” kurang sesuai dengan keinginan warga belajar, maka kegiatan KBU tidak berjalan secara partisipatif dimana pengelola dan instruktur memegang peranan paling dominan daripada warga belajar mulai dari pengadaan peralatan dan bahan sampai pada pemasaran hasil KBU. Padahal dalam proses belajar di KBU diharapkan warga belajar yang memegang peranan paling dominan, pengelola dan instruktur hanyalah berperan sebagai fasilitator saja.

b. Sarana dan prasarana

PKBM “Tresna Bhakti berdiri di atas lahan seluas 1750 M², dengan beberapa bangunan besar dan kecil, terdiri dari 2 ruang kelas (berukuran 4 x 6 M², 1 ruang kantor, 1 ruang pendidikan untuk PAUD, 1 ruang keterampilan (berukuran 2 x 4 M²), 1 ruang perpustakaan (berukuran 2 x 4), dan 2 ruang untuk tempat tinggal pengelola dan instruktur. Ruang keterampilan yang ada sebelumnya digunakan untuk KBU *spare part* motor, setelah KBU *spare part* motor berhenti karena alat-alat produksi banyak yang rusak, tempat itu kemudian digunakan untuk penyimpanan peralatan KBU yang rusak, mesin jahit, serta alat dan bahan membuat sapu ijuk. Untuk pembuatan sapu ijuk sendiri dilakukan di teras ruang keterampilan dan untuk pembuatan batako dilakukan di luar gedung beratapkan asbes. Terbatasnya ruang keterampilan untuk kegiatan KBU dirasakan mempengaruhi kenyamanan dan kesungguhan warga belajar dalam mengikuti KBU, sebagaimana diungkapkan oleh JRM (22 tahun) salah satu warga belajar KBU Sapu ijuk yang diwawancarai penulis:

“Membuat sapu ijuk di luar ruangan rasanya kurang nyaman pak, kalo bisa pihak pengelola membuat satu ruang keterampilan lagi supaya pembuatan sapu ijuk bisa dilakukan dengan lebih serius”.

Selain sarana ruang keterampilan, alat produksi yang dimiliki KBU juga masih sangat minim, terutama pembuatan Batako yang hanya memiliki satu buah alat cetak Batako, sehingga pembuatan Batako dilakukan secara bergantian.

Hal ini membuat proses produksi menjadi lebih lama, sebagaimana diungkapkan oleh instruktur Batako Bapak MAF:

“Berkaitan dengan sarana dan prasarana KBU, khusus KBU Batako kita hingga saat ini hanya memiliki satu buah alat cetak, sehingga untuk memenuhi permintaan warga membutuhkan waktu yang lebih lama daripada jika KBU memiliki dua alat cetak, karena warga kebanyakan menginginkan permintaannya cepat segera dipenuhi, karena akan dipakai untuk membangun”.

c. Pemasaran

Pemasaran hasil KBU merupakan hal yang sangat penting dalam pengelolaan KBU, karena akan menentukan keberlanjutan KBU yang mana modal awalnya diperoleh dari bantuan stimulan pemerintah, sehingga bagi pengelola KBU diharapkan benar-benar dapat menyelenggarakan KBU yang bisa berkembang diekonomi lokal. Sulitnya pemasaran KBU akan berdampak pada terhambatnya putaran dana produksi, sehingga lama-kelamaan modal yang diperoleh dari pemerintah semakin menyusut dan KBU lama-kelamaan akan mati. Kesulitan pemasaran ini dirasakan baik oleh pengelola maupun para instruktur, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak ES:

“Pemasaran adalah masalah kami yang paling besar. Untuk Sapu ijuk kami hanya mampu menjual ke sekolah-sekolah sekitar, ada 9 SD yang bersedia membeli setahun sekali, sedangkan untuk Batako bergantung dari pesanan masyarakat. Sulitnya pemasaran juga menyebabkan KBU spare part motor dan elektro tidak berkembang, Kami masih sangat terbatas dalam hal kemitraan dengan swasta atau pasar yang dapat menampung hasil KBU, karena mereka sudah mempunyai rekanan sendiri. Untuk spare part motor, hasil KBU-nya kami jual ke toko ALFA di Ciamis tetapi melalui usaha pembuatan spare part motor milik Bapak H. Dadan di Cipageran yang menjadi makloon toko ALFA, sehingga produksi sangat tergantung permintaan dari Bapak H. Dadan”.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak AHA, seorang tutor penanggung jawab KBU *spare part* motor dan elektro :

“Penyebab utama terhentinya KBU spare part motor adalah sulitnya

pemasaran, karena spare part kita tidak punya merek, bengkel-bengkel tidak ada yang mau menerima produksi kami. Pemasaran spare part motor hanya bergantung pada usaha pembuatan spare part motor milik Bapak H. Dadan. Permintaan dari Bapak H. Dadan juga tergantung dari permintaan toko ALFA, bila permintaan dari toko ALFA tidak bisa dipenuhi oleh Bapak H. Dadan yang memiliki 6 orang karyawan, maka Bapak H. Dadan akan meminta KBU untuk membantu memproduksi barang yang diminta toko ALFA. Sedikitnya permintaan dari Bapak H. Dadan dan banyaknya barang produksi kami yang gagal seleksi toko ALFA, menyebabkan pengeluaran usaha tidak seimbang dengan pemasukan, hingga kami kehabisan modal dan akhirnya berhenti ditambah alat cetak spare part mengalami kerusakan yang membutuhkan dana cukup besar”.

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan KBU

Dalam upaya pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” yang paling utama adalah bahwa keberadaan KBU haruslah memberikan manfaat yang positif dan memberikan pengaruh yang signifikan bagi peningkatan keterampilan kerja yang dapat memperluas peluang bagi warga miskin di Desa Cinyasag untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KBU meliputi:

a. Jenis Keterampilan

Pemilihan jenis keterampilan yang akan dikembangkan KBU merupakan faktor yang sangat penting, karena akan menentukan peluang berhasil atau tidaknya KBU. Untuk itu pengelola PKBM dituntut untuk mampu memperhitungkan atau memprediksi bahwa keterampilan yang akan dikembangkan dalam KBU nantinya dapat berkembang di ekonomi lokal, serta dapat membawa manfaat yang cukup berarti bagi peningkatan keterampilan usaha dan pendapatan warga belajar. Oleh karenanya, dalam menentukan jenis keterampilan KBU pengelola hendaknya melihat aspirasi dan ketertarikan warga belajar terhadap teknologi, melakukan kajian singkat mengenai potensi ekonomi lokal atau meminta saran dari kelembagaan lokal mengenai peluang ekonomi di tingkat lokal, khususnya pemerintah Desa. Dengan demikian jenis keterampilan yang dipilih bersifat aspiratif, mendapat dukungan dari kelembagaan lokal dan memiliki peluang keberhasilan yang cukup besar. Akan tetapi tidak demikian yang terjadi di KBU PKBM “Tresna Bhakti”, keterampilan yang dikembangkan tidak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana

diuraikan di atas, melainkan berdasarkan keinginan pengelola. Hal tersebut terungkap dari hasil wawancara dengan pengelola KBU Bapak ES:

“Keterampilan yang dikembangkan KBU semua kami yang tentukan, kebetulan disini ada tutor yang bisa membuat sapu ijuk dan batako jadi kami kembangkan keterampilan Sapu ijuk dan Batako, termasuk juga keterampilan membuat makanan ringan. Sedangkan untuk spare part motor dan elektro itu sudah program dari atas berikut dana untuk pelatihan dan pengembangannya. Kami belum bisa menyelenggarakan keterampilan berdasarkan keinginan masyarakat atau warga belajar karena keterbatasan dana”.

Informasi yang hampir sama juga disampaikan oleh instruktur KBU sapu ijuk Bapak DRY :

“Kami memilih keterampilan membuat sapu ijuk dengan pemikiran bahwa barang tersebut merupakan kebutuhan rumah tangga yang setiap rumah pasti membutuhkan, kebetulan kami mendapatkan bantuan KUBE berupa bahan ijuk dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melalui BPMKB Kabupaten Ciamis atas rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis . Disamping itu kita tidak perlu mencari instruktur, tetapi memanfaatkan kemampuan tutor yang ada. Memang pada akhirnya kami kesulitan dalam merekrut warga belajar, warga sekitar kurang berminat ikut KBU membuat Sapu ijuk, jadi kami tawarkan ke warga belajar paket B dan paket C”.

Apa yang dirasakan oleh instruktur KBU Sapu ijuk sebenarnya merupakan gambaran dari respon warga masyarakat sekitar berkaitan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak pengelola KBU, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak RS Kadus Puhun :

“Keberadaan KBU PKBM bisa membantu warga yang tidak mempunyai pekerjaan untuk belajar keterampilan kerja, hanya saja keterampilan yang dikembangkan pihak pengelola saya anggap kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saya kira warga disini akan lebih senang jika pengelola mengembangkan keterampilan bengkel atau menjahit, karena Cinyasag ini banyak kendaraan dan berdekatan dengan daerah industri yang kebanyakan adalah industri tekstil, bordir dan garment, daripada sapu ijuk yang orang beli, tetapi enam bulan atau satu tahun tidak akan beli lagi”.

Warga belajar sendiri sebenarnya memberikan tanggapan yang serupa dengan Bapak RS bahwa, meskipun KBU PKBM memberikan manfaat yang positif bagi mereka untuk menambah pengetahuan dan keterampilan, akan tetapi mereka kurang termotivasi dalam kegiatan KBU karena keterampilan yang ada dianggap tradisional, kurang mengikuti perkembangan teknologi dan kurang cocok untuk anak muda yang tinggal di perkotaan, sebagaimana disampaikan Saeful 17 tahun, salah seorang warga belajar KBU sapu ijuk:

“Bagus sekali di PKBM ada pendidikan keterampilannya, jadi disamping

belajar di sekolah kita juga bisa belajar keterampilan untuk bekal cari kerja, Cuma disini keterampilannya masih tradisional, kurang menarik untuk anak muda, kamipun sebenarnya kurang semangat. Untungnya di KBU kami mendapat upah, jadi meskipun kurang senang tetapi hasilnya bisa buat ongkos ke sekolah”.

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh AB warga belajar KBU batako:

“Batako itu bahan bangunan alternatif bata merah, jarang orang yang membeli. Seandainya ada juga kebanyakan lebih baik datang ke toko bangunan dari pada ke KBU. Jadi sebenarnya KBU Batako itu agak sulit untuk berkembang. Akan tetapi daripada tidak ada pekerjaan, usaha membuat Batako ini bisa dijadikan pekerjaan sambilan. Kalau diajak dan tidak sedang punya pekerjaan ya saya ikut untuk nambah penghasilan”.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menghambat kemajuan KBU PKBM adalah karena jenis keterampilan yang dikembangkan oleh pihak pengelola tidak aspiratif dan kurang sesuai dengan potensi ekonomi lokal.

b. Jejaring/koordinasi Dengan Kelembagaan Lokal

Menurut Goldsmith (1992) yang dimaksud dengan kelembagaan yang berkelanjutan (Sustainable Institutional) adalah kemampuan suatu organisasi dalam menghasilkan masukan (input) untuk berkembang dan memproduksi dengan stabil, sehingga organisasi itu menghasilkan nilai output yang optimal (keluaran yang tinggi). Sedangkan merujuk pada pendapat Uphoff (1986) bahwa kelembagaan yang berkelanjutan menekankan pada adanya: (1) partisipasi anggota dalam menjaga kelestarian sumber daya, (2) adanya dukungan atau kontribusi dari pihak luar, dan (3) kemampuan dari anggota dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat digambarkan bahwa lembaga atau organisasi yang produktif dan berkelanjutan salah satunya adalah yang banyak mendapatkan dukungan dan bantuan sumber daya dari pihak luar, dalam artian semakin banyak dukungan dari pihak luar kepada suatu lembaga atau organisasi, maka lembaga atau organisasi itu akan mampu berkembang dan memproduksi secara optimal, serta berkelanjutan. Oleh karenanya membuka jaringan seluas mungkin atau kerjasama dengan lembaga atau organisasi luar sangat penting dalam rangka memperoleh dukungan dan sumber daya.

Salah satu faktor yang menyebabkan kurang berkembangnya KBU

PKBM “Tresna Bhakti” adalah karena kurangnya pihak pengelola menjalin koordinasi dengan kelembagaan atau organisasi lokal, seperti PKK, IKPSM dan Karang Taruna dan BKM yang sebenarnya memiliki data kelompok sasaran garapan PKBM, termasuk dengan pemerintah Desa yang sebenarnya juga berperan sebagai pembina PKBM. Latar belakang pengelola yang berasal dari dunia pendidikan menyebabkan jaringan atau kerjasama yang dibina cenderung hanya dengan lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah di sekitar Cinyasag dalam hal merekrut warga belajar dan pemasaran sapu ijuk, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak ES :

“Untuk memperoleh warga belajar maupun dalam pelaksanaan kegiatan PKBM, kami belum mengadakan kerjasama dengan organisasi sosial dan Pemerintah Desa, kami hanya bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar, baik dalam hal informasi tentang penerimaan murid baru program pendidikan kesetaraan maupun penawaran hasil KBU sapu ijuk. Kerjasama dengan usaha spare part motor milik Bapak H. Dadan juga karena saya kenal dengan istrinya yang pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat”.

Informasi yang disampaikan oleh pengelola PKBM dibenarkan oleh Sekretaris Desa bapak ASP:

“Sejauh ini pengelola PKBM memang jarang berkomunikasi dengan Desa mengenai kegiatan di PKBM. Kalau kerjasama antara PKK, IKPSM, BKM dan Karang Taruna sudah berjalan dengan baik, mereka sering datang dan punya tempat sekretariat di kantor Desa. Menurut saya sangat penting bagi pengelola PKBM untuk bertukar informasi juga, karena siapa tahu kami bisa membantu kesulitan yang dihadapi oleh PKBM, khususnya dalam pengembangan KBU yang belum banyak dikenal warga”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu ADR Ketua Pokja III PKK Desa Cinyasag :

“Kami disini PKK, IKPSM, BKM dan Karang Taruna sudah menjalin kerjasama yang baik, jika salah satu dari kami mempunyai kegiatan, kami sering mengajak teman-teman untuk membantu kebetulan kami semua mempunyai tempat sekretariat di Desa sehingga sering ketemu, jadi pertukaran informasi antar pengurus orsos bahkan dengan instansi terkait menjadi lebih mudah”.

Ditemui di tempat kediamannya, Ibu TJ yang juga Ketua IKPSM menyampaikan bahwa :

“Saya baru tahu kalau di PKBM juga mengembangkan keterampilan membuat sapu ijuk, padahal kami sudah memiliki KUBE sapu ijuk RAHAYU jadi bentrok soal pemasarannya, seandainya kami tahu lebih awal mungkin kami akan membuat sikat dari ijuk supaya pemasaran tidak bentrok. Saya sangat menyambut baik jika diantara sesama lembaga lokal bisa saling bertukar informasi. dan ini seharusnya tugas LPM untuk mengkoordinirnya”.

c. Kualitas Instruktur

Dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan, kualitas instruktur memegang peranan yang sangat penting untuk menghasilkan tenaga-tenaga yang terampil, memiliki nilai jual dan mendapat kepercayaan masyarakat. Untuk itu dibutuhkan instruktur yang kompeten dan juga profesional, artinya instruktur tersebut berasal dari suatu lembaga pendidikan kursus profesional yang mengeluarkan sertifikat kelulusan, sehingga peserta didik nantinya memiliki nilai jual dan kepercayaan dari masyarakat berkaitan dengan keterampilan yang telah dipelajari, bahkan kadang lembaga kursus bisa membantu peluang pemasaran dengan cara memberikan rekomendasi ke suatu perusahaan swasta yang membutuhkan suatu barang tertentu berkaitan dengan keterampilan tersebut, atau membantu menyalurkan tenaga kerja ke perusahaan swasta. Salah satu faktor lain yang menyebabkan KBU PKBM kurang berkembang adalah karena instruktur yang ada (keterampilan membuat *spare part* motor dan elektro) direkrut bukan dari suatu lembaga pendidikan kursus, akan tetapi dari rekanan pengelola, ditambah dengan waktu pendidikan dan pelatihan yang relatif singkat, sebagaimana disampaikan oleh pengelola KBU Bapak ES :

“Dalam kegiatan KBU kami tidak mengambil instruktur dari luar, tetapi memanfaatkan tutor yang memiliki keterampilan, kebetulan pak Daryu punya pengalaman membuat sapu ijuk, pa Mujahit bisa membuat Batako, Ibu Eli pernah sekolah Tata Boga. Untuk instruktur pelatihan *spare part* motor kami bekerjasama dengan Ibu Ai staf Dinas Pendidikan Priovinsi Jawa Barat yang suaminya mempunyai usaha membuat *spare part* motor, bahkan alat produksinya juga kita beli dari Bapak H. Dadan. Sedangkan untuk instruktur pelatihan elektro kebetulan pegawai Dinas Pendidikan ada yang bisa elektro dan menawarkan diri, jadi kami pakai”.

Perekrutan instruktur yang tidak kompeten, ditambah waktu pelatihan yang relatif singkat, maka hasil dari pendidikan dan pelatihan membuat *spare part* motor dan elektro juga kurang berhasil dilihat dari kualitas barang produksi yang dihasilkan warga belajar rendah dan tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak AHA penanggung jawab KBU *spare part* motor dan elektro :

“Faktor utama tidak berkembangnya KBU *spare part* motor adalah karena hasil produksi warga belajar tidak punya merek, sehingga tidak di terima bengkel-bengkel swasta. Sedangkan *spare part* yang dipasarkan melalui Bapak H. Dadan banyak yang dikembalikan karena dianggap tidak layak jual,

baik hasil seleksi oleh Bapak H. Dadan sendiri maupun oleh toko ALFA, padahal hanya dua jenis barang yang diproduksi warga belajar, tetapi hanya kurang dari 30 % yang bisa diterima jadi kami merugi”.

Kurangnya kualitas instruktur juga dirasakan oleh warga belajar yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan *spare part* motor dan elektro, sebagaimana disampaikan oleh GP (24 tahun) salah seorang alumni warga belajar KBU spare part motor yang memberikan tanggapan tentang kesesuaian instruktur terhadap materi keterampilan kepada penulis :

“Menurut saya, instruktur yang memberikan pelatihan spare part motor kurang ahli di bidangnya, kami banyak yang masih belum mengerti, terutama teknis cara pembuatannya. Setelah mendapatkan pelatihan kami juga tidak mendapat sertifikat kelulusan tingkat dasar, terampil atau mahir, tetapi hanya surat keterangan telah mengikuti pelatihan membuat spare part motor dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis ”.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh EMS (21 tahun) salah seorang alumni warga belajar KBU Elektro :

“Menurut saya selain waktunya yang singkat, instruktur yang memberikan materi pelatihan elektro juga sepertinya kurang bagus, kami masih banyak yang belum mengenal komponen-komponen elektro apalagi harus membuat atau memperbaiki alat-alat elektro yang rusak seperti amplifier atau adaptor, rasanya kami masih harus belajar lebih banyak lagi”.

Berdasarkan wawancara di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pihak pengelola kurang selektif dalam rekrutmen instruktur, sehingga hasil yang diperoleh warga belajar tidak optimal, hal ini berdampak pada masih rendahnya keterampilan warga belajar dalam memproduksi barang yang berkualitas.

d. Partisipasi Masyarakat

Faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan KBU adalah adanya dukungan dari masyarakat, baik dari pimpinan suatu organisasi, pembina maupun tokoh masyarakat yang memberikan perhatian terhadap perkembangan dan permasalahan yang dihadapi PKBM “Tresna Bhakti”. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola diketahui bahwa partisipasi masyarakat terhadap KBU PKBM “Tresna Bhakti” masih kurang, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak ES :

“Sejak PKBM “Tresna Bhakti” terbentuk, belum ada tokoh masyarakat yang datang kesini, bahkan Kadus Puhun juga belum pernah melihat kegiatan kami, begitu juga pembina dari Desa, tetapi kalau pembina dari Dinas

Pendidikan Kabupaten Ciamis sudah pernah datang meskipun tidak secara berkala. Sejauh ini warga masyarakat yang memberikan perhatian kepada PKBM baru sedikit diantaranya Bapak Gumun Ketua RT 04, Bapak Umar yang bersedia menyewakan lahannya untuk kegiatan PKBM”.

Apa yang disampaikan Bapak Tasliman sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Bapak ESAD dan Kepala Seksi Pemberdayaan Desa Cinyasag Bapak YHN :

“Sebagai Kepala Desa saya memang mempunyai tugas membina seluruh organisasi sosial yang ada di Desa Cinyasag , termasuk PKBM “Tresna Bhakti”. Akan tetapi dengan begitu banyaknya peran dan tugas saya, sangat sedikit waktu bagi saya untuk melakukan pembinaan secara rutin, kebetulan kepada PKBM saya memang belum sama sekali berkunjung ke mereka”. (Bapak ES Kuwu Cinyasag)

“Kami memang belum melihat secara langsung kegiatan setiap organisasi sosial yang ada di Cinyasag disebabkan banyak program- program pembangunan yang dibawa dinas-dinas dari Pemerintah Kabupaten Ciamis yang harus segera ditindaklanjuti. Kalau untuk PKK, IKPSM, Karang Taruna, BKM dan LPM saya bisa memantau kegiatan mereka karena mereka sering datang ke Kantor Desa dan ada tempat sekretariatnya, tapi untuk PKBM kami belum ada komunikasi, pihak PKBM sendiri juga jarang berkomunikasi dengan pihak Desa”. (Bapak YHN: Kepala Seksi Pemberdayaan Desa Cinyasag)

Kurangnya perhatian dan pembinaan dari Pemerintah Desa terhadap KBU PKBM, ternyata juga didapat dari Pembina PKBM Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Bapak MZ yang menyatakan bahwa:

“Pembinaan PKBM oleh Dinas Pendidikan dilakukan oleh pegawai fungsional yang telah ditunjuk wilayah tugasnya. Tetapi bidang yang dibina tidak hanya PKBM melainkan mencakup bidang Keolahragaan, Kebudayaan dan Pendidikan Masyarakat, termasuk di dalamnya PKBM. Tugas pembina adalah melakukan monitoring, supervisi dan evaluasi serta memberikan rekomendasi atau dukungan yang selanjutnya dikoordinasikan dengan pejabat struktural. Dengan beban tugas demikian, pembinaan kepada PKBM tidak bisa saya lakukan secara berkala, tetapi berdasarkan kebutuhan. PKBM sendiri saya harapkan dapat aktif dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan KBU”. Berdasarkan pemantauan saya, KBU PKBM “Tresna Bhakti” memang belum berkembang sebagaimana diharapkan, padahal sudah banyak jenis keterampilan yang dikembangkan, tetapi belum ada satupun warga belajar yang mampu mempunyai usaha secara mandiri”.

3. Permasalahan Warga Belajar Dalam Mengembangkan Usaha Ekonomi

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak pengelola, PKBM telah menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan membuat *spare part* motor dan elektro kepada 26 orang pemuda Karang Taruna yang berasal

dari Dusun Puhun Desa Cinyasag . Pelatihan tersebut dilaksanakan selama sepuluh hari dari tanggal 7–18 Desember 2010 dengan dana sebesar 50 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pengembangan KBU, yang tujuannya adalah memperluas lapangan kerja melalui peningkatan keterampilan kerja bagi warga usia produktif. Setelah mendapatkan pelatihan, warga belajar diharapkan dapat menjalankan usaha berdasarkan keterampilan yang telah diperoleh melalui KBU PKBM. Akan tetapi setelah warga belajar mendapatkan pelatihan dan membuka usaha yang difasilitasi oleh PKBM, ternyata usaha ekonomi produktif yang dijalankan tidak berkembang, bahkan akhirnya mati. Untuk mengetahui permasalahan ini penulis menggali informasi kepada alumni warga belajar yang pernah mendapatkan pelatihan *spare part* motor dan elektro, pengelola, dan pihak-pihak yang terkait dalam usaha produktif yang dijalankan oleh warga belajar seperti Bapak HD pemilik usaha pembuatan spare part motor yang menjadi penampung hasil produksi warga belajar. Adapun untuk mengetahui hambatan yang dihadapi warga belajar dalam menjalankan kegiatan KBU *spare part* motor, akan dilihat pada aspek motivasi berwirausaha, dana dan tempat usaha, pemasaran, serta jaringan kerja :

a. Motivasi Berwirausaha

Produktivitas suatu pekerjaan atau usaha sangat tergantung kepada kemauan para pekerja atau para usahawan. Agar pekerja bisa lebih giat melakukan pekerjaan, maka mereka perlu diberi motivasi dengan berbagai cara. Pada umumnya tingkah laku manusia secara sadar didorong oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu. Disinilah letak peran pentingnya motivasi berwirausaha. Motivasi adalah kemauan untuk berbuat sesuatu, sedangkan motif adalah kebutuhan, keinginan mencapai sesuatu atau dorongan untuk mencapai tujuan. Jadi motivasi seseorang sangat tergantung pada kekuatan motifnya (Buchari, 2006).

Menurut Buchari (2006) adanya frustrasi akibat suatu hambatan bisa mempengaruhi kekuatan motif, dimana rasa frustrasi tersebut bisa menimbulkan patah semangat dan muncul rasa pesimis untuk melanjutkan usaha, sehingga akhirnya ia berhenti untuk mencoba berusaha. Hal inilah yang terjadi pada warga belajar KBU *spare part* motor dan elektro, sebagaimana diungkapkan oleh alumni penanggung jawab KBU *spare part*

motor, Bapak AHA :

Sejak awal pengembangan KBU, para pemuda disini kurang respon dengan keterampilan spare part motor, tetapi dana bantuan yang turun sudah satu paket dengan jenis keterampilannya. Setelah dibujuk Bapak, akhirnya mereka ikut pelatihan juga karena dalam kegiatan itu ada uang sakunya. Sesudah pelatihan selesai dan KBU mulai berjalan, lamakelamaan motivasi mereka mulai menurun, penyebabnya produksi mereka banyak yang ditolak oleh Bapak H. Dadan pemilik usaha pembuatan spare part motor yang menjadi instruktur pelatihan sekaligus penyedia alat-alat dan penampung produksi warga belajar. Karena produksi barang yang terjual hanya sedikit, kami coba menawarkan ke bengkel-bengkel, tetapi tidak ada yang mau menerima. Sejak itu lamakelamaan warga belajar enggan ikut memasarkan spare part motor, dan ketika alat-alat produksi mengalami kerusakan yang cukup berat dan kami tidak mempunyai dana lagi untuk perbaikan, akhirnya KBU spare part motor berhenti sampai sekarang”.

Hal yang sama ternyata juga terjadi pada warga belajar KBU elektro, sebagaimana diterangkan oleh Bapak ES :

“Setelah mendapatkan pelatihan, warga belajar kemudian membuka KBU elektro. Karena ruang keterampilan yang ada dipakai untuk KBU spare part motor, maka KBU elektro kami sewakan kios ukuran 2 x 3 M di tepi jalan dekat PKBM dan mereka juga kami bekali dengan alat-alat reparasi. Akan tetapi KBU elektro hanya bertahan selama kurang lebih satu bulanm mereka membubarkan diri alasannya karena selama mereka membuka usaha tidak ada satupun warga masyarakat yang datang memanfaatkan jasa mereka”.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai motivasi warga belajar dalam kegiatan KBU, penulis mencoba menggali informasi langsung dari alumni warga belajar KBU *spare part* motor (GP 24 tahun, EH 24 tahun, dan WLN 20 tahun) dan alumni warga belajar KBU elektro (ES 21 tahun, ABD 24 tahun, dan HRD 26 tahun). Dari hasil wawancara dengan alumni warga belajar diketahui bahwa mereka sebenarnya memang kurang senang dengan keterampilan *spare part* motor, akan tetapi daripada menganggur dan karena ajakan dari pengelola, akhirnya mereka ikut dalam pelatihan tersebut. Berkaitan dengan tanggapan mereka tentang kualitas instruktur yang memberikan pelatihan, ke tiga responden mengatakan masih kurang bagus, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang dari mereka (EH):

“Sebenarnya saya lebih senang jika keterampilan yang dikembangkan PKBM adalah bengkel motor, kalau spare part motor resiko kerugiannya terlalu besar. Kita sudah cape-cape produksi, tetapi barangnya susah dijual, kita banyak rugi bahan dan biaya, akhirnya teman-teman jadi males. Harusnya pihak pengelola kalau mau mengadakan pelatihan keterampilan harus dengan perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan warga

masyarakat. Seandainya yang dikembangkan adalah bengkel motor saya kira lebih bagus, asalkan pelatihannya benar-benar dan instruktur nya juga harus bagus”.

Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh alumni warga belajar KBU elektro, sebagaimana diungkapkan oleh HRD (26 tahun) :

“Sebetulnya kami kurang percaya diri untuk membuka usaha jasa elektronik, karena kami merasa belum mengetahui banyak tentang elektornik, tetapi pihak pengelola terus memberikan motivasi kepada kami untuk tetap membuka usaha, bahkan kami disewakan tempat. Karena sudah satu bulan tidak ada kemajuan, akhirnya kami berhenti usaha dan mencari pekerjaan lain. Kami sudah meminta kepada Bapak ES agar pelatihannya ditambah lagi dengan instruktur yang lebih baik, tetapi katanya dananya sudah habis”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan alumni warga belajar, maka penulis berkesimpulan bahwa kurangnya motivasi berwirausaha dari warga belajar adalah dikarenakan jenis keterampilan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, waktu pelatihan dan kualitas instruktur yang dinilai kurang sehingga mereka kurang percaya diri dengan kemampuannya, serta kegagalan dalam pemasaran yang membuat mereka putus asa.dan akhirnya berhenti.

b. Dana dan tempat usaha

Dana dan tempat usaha merupakan faktor yang sangat penting bagi dimulainya suatu usaha. Menurut Bygrave (1994) dalam Buchari (2006) ada beberapa faktor kritis yang berperan dalam membuka usaha baru, yaitu:

- 1) *Personal*, menyangkut aspek-aspek kepribadian seseorang.
- 2) *Sociological*, menyangkut masalah hubungan dengan keluarga, kerabat, teman dan sebagainya.
- 3) *Environmental*, menyangkut hubungan dengan lingkungan.

Apabila seseorang berniat untuk memulai membuka usaha baru, maka ia akan mencari faktor-faktor yang bisa mendorong usahanya, diantaranya adalah dukungan dari keluarga, teman, kondisi ekonomi, peluang lapangan pekerjaan dan sumber daya yang tersedia, yaitu modal dan tempat usaha.

Berkaitan dengan modal awal KBU dan tempat usaha sebenarnya tidak terlalu menjadi masalah. Dana bantuan yang diterima oleh pengelola telah dialokasikan disamping untuk biaya pelatihan, juga untuk pembelian alat-alat produksi dan sewa tempat untuk usaha, sebagaimana disampaikan oleh Bapak ES :

“Dana bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat saya bagi tiga,

sebagian untuk biaya pelatihan dan uang saku peserta, pembelian bahan dan alat-alat produksi, serta sewa tempat untuk KBU elektro. Hanya saja ruang keterampilan untuk KBU spare part motor terlalu kecil, hanya berukuran 2 x 4 meter kurang luas untuk menampung 16 orang warga belajar, jadi kita masih membutuhkan sarana penunjang”.

Apa yang disampaikan oleh Bapak ES juga diakui oleh warga belajar sebagaimana diungkapkan oleh ABD (24 tahun) salah satu warga belajar KBU elektro :

“Untuk tempat usaha elektro kami sudah difasilitasi oleh PKBM dengan menyewa tempat ukuran 3 x 3 M, di pinggir jalan dekat PKBM dan saya kira cukup luas untuk tempat usaha, begitu juga dengan alat-alat reparasi semua diberi oleh PKBM”.

c. Pemasaran

Pemasaran merupakan kegiatan yang amat penting dalam operasional suatu usaha, apakah usaha itu bergerak dalam sektor industri kecil, menengah atau besar, atau bahkan usaha eceran. Pemasaran menempati posisi utama, untuk membuka suatu usaha harus disusun dahulu rencana pemasarannya. Menurut Hisrich-Peters (1905) dalam Buchari (2006) untuk menyusun rencana pemasaran maka perlu dijawab tiga pertanyaan:

- 1) *Where have we been ?*
- 2) *Where do we want to go ?*
- 3) *How do we get there ?*

Pertanyaan di atas perlu diidentifikasi dan dijawab dari mana kita berangkat? Untuk itu harus diperhatikan latar belakang usaha, kekuatan dan kelemahan usaha itu, dan bagaimana keadaan persaingan dalam usaha itu, serta bagaimana peluang dan kendala yang dihadapi. Kemudian ke mana arah yang dituju? Di sini perlu ditetapkan sasaran pemasaran untuk masa yang akan datang. Selanjutnya adalah bagaimana mencapai sasaran itu?. Konsep seperti inilah yang tidak diterapkan oleh pengelola dalam mengembangkan KBU *spare part* motor dan elektro. Usaha spare part motor didasari atas kerjama antara pengelola dengan usaha pembuatan spare part motor milik Bapak HD yang merupakan makloon toko ALFA, dimana Bapak HD bersedia menampung produksi *spare part motor* warga belajar apabila ia menjadi instruktur dan penyedia alat-alat produksi. Padahal usaha *spare part* motor Bapak HD memiliki 6 orang pegawai dan barang pesanan dari Toko ALFA seringkali relatif sedikit, sehingga

jarang Bapak HD melempar pesanan barang Toko ALFA ke KBU PKBM, sebagaimana diungkapkan oleh penanggung jawab KBU *spare part* motor Bapak AHA :

“Rencana pemasaran *spare part* motor, kami bekerjasama dengan rekanan Bapak ES yang memiliki usaha pembuatan *spare part* motor ke toko ALFA. Dalam kerjasama itu Bapak HD bersedia menampung *spare part* motor warga belajar, penyedia alat-alat produksi dan sekaligus bertindak sebagai instruktur pelatihan. Namun ternyata *spare part* motor dari kami sangat sedikit tertampung, alasannya banyak barang kami yang tidak layak, sehingga tidak bisa diteruskan ke toko ALFA karena akan merusak kepercayaan dari toko ALFA.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang hambatan pemasaran yang dihadapi KBU *spare part* motor, penulis mengunjungi tempat usaha pembuatan *spare part* motor milik Bapak HD, ia membenarkan bahwa *spare part* motor buatan PKBM banyak yang tidak sempurna sehingga terpaksa dikembalikan lagi :

“*Spare part* motor buatan warga belajar Bapak ES kebanyakan masih kasar dan terdapat cacat, sehingga kami tidak berani meneruskan ke toko ALFA karena disana juga pasti akan gagal seleksi. Karena banyak yang gagal, maka kami hanya memberikan order yang sedikit kepada PKBM, sayang jika banyak bahan karet yang terbuang”.

Berbeda dengan warga belajar yang menjalankan usaha pembuatan *spare part* motor, warga belajar usaha elektro tidak memasarkan produk dalam bentuk barang, melainkan dalam bentuk jasa. Hambatan yang dihadapi dalam pemasaran adalah kurangnya mendapat kepercayaan dari masyarakat disebabkan mereka tidak memiliki sertifikat keterampilan elektro, sebagaimana diungkapkan oleh ABD salah seorang warga belajar yang membuka usaha jasa elektro :

“Hambatan yang kami hadapi dalam menjalankan usaha elektro sebenarnya berkaitan dengan keterampilan yang kami miliki, rasanya masih terlalu sedikit dan kami tidak yakin bisa berhasil dalam usaha ini. Pernah ada seorang warga yang menanyakan di Lembaga Pendidikan Kursus mana kami belajar, padahal kami hanya belajar di PKBM yang waktunya sangat singkat sekali”. Hal ini membuat kami merasa tidak pede dan akhirnya kami memilih untuk membubarkan diri, kebetulan usaha kami juga tidak berkembang”.

d. Jejaring dengan Kelembagaan Lokal

Membina hubungan dengan lembaga lokal sebenarnya merupakan hal yang sangat penting bagi warga belajar yang sedang memulai usaha dan menghadapi berbagai hambatan. Uphoff (1986) menyebutkan bahwa kelembagaan yang berkelanjutan menekankan pada adanya: (1) partisipasi

anggota dalam menjaga kelestarian sumber daya, (2) adanya dukungan atau kontribusi dari pihak luar, dan (3) kemampuan dari anggota dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dukungan dari kelembagaan lokal sangat penting, khususnya dari Pemerintah Desa Cinyasag dan organisasi sosial dalam hal promosi usaha supaya mendapat kepercayaan masyarakat, dukungan moril, informasi yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan dan sebagainya. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, penyebabnya adalah karena mereka tidak mempunyai pemikiran ke arah itu dan belum memiliki pengalaman bagaimana cara menjalin kerjasama dengan suatu organisasi atau lembaga pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh HRD salah seorang warga belajar KBU elektro :

“Dalam menjalankan usaha jasa elektro kami belum mengadakan hubungan kerjasama dengan kelembagaan lokal, khususnya dengan aparat Desa. Hal tersebut tidak terpikirkan oleh kami, dan Kami juga tidak tahu bagaimana cara memulainya karena kami belum pernah berhubungan dengan aparat Desa, dengan organisasi sosial yang ada di Desa Cinyasag ataupun dengan dan Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Ciamis ”.

C. Analisis Masalah, Kebutuhan dan Identifikasi Sumber

1. Analisis Masalah

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan yang mempengaruhi pengembangan KBU PKBM “Mita Mandiri” di Desa Cinyasag , baik pada jenis keterampilan yang masih berjalan, maupun pada jenis keterampilan yang sudah tidak berjalan lagi. Permasalahan tersebut meliputi :

a. Kurangnya minat dan motivasi warga belajar dalam kegiatan KBU.

Masih kurangnya minat dan motivasi warga belajar ditunjukkan dari kurangnya keaktifan warga belajar dalam mengikuti kegiatan KBU dan kepedulian terhadap upaya pengembangan KBU, khususnya keterlibatan dalam hal pemasaran. Hal ini disebabkan karena jenis keterampilan yang dikembangkan oleh pengelola belum bersifat aspiratif (Top Down), bahkan untuk jenis keterampilan *spare part* motor dan elektro merupakan kebijakan dari atas (Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat). Keterampilan membuat batako dan sapu ijuk dianggap kurang modern dan kurang menjanjikan masa depan oleh warga belajar yang berusia antara 16–22

tahun, apalagi membuat sapu dan batako dianggap sebagai pekerjaan kasar, sehingga mereka malu untuk memasarkannya. Selain itu batako dan sapu ijuk juga dianggap termasuk barang lama pakai sehingga produksi berjalan lambat. Sedangkan *Spare part* motor dan elektro dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan warga belajar yang merupakan warga sekitar, karena disamping sulit dalam pembuatan juga sulit dalam pemasaran karena tidak mempunyai merek. Mereka beranggapan jenis keterampilan perbengkelan dan menjahit lebih berpeluang untuk berkembang di ekonomi lokal mengingat wilayah Desa Cinyasag berada di daerah pusat industri Kabupaten Ciamis (Kecamatan Panawangan) terutama industri *garment* dan tekstil. Selain jenis keterampilan yang tidak aspiratif, minat dan motivasi warga belajar juga dipengaruhi oleh kualitas instruktur yang kurang baik. Instruktur Keterampilan tidak berasal dari lembaga pendidikan kursus profesional, sehingga keterampilan yang dikuasai oleh warga belajar masih dirasakan kurang dan mempengaruhi rasa percaya diri mereka ketika menjalankan usaha.

b. Pemasaran tidak Berkembang

Permasalahan yang paling dirasakan dalam pengelolaan KBU adalah pemasaran. Sapu ijuk baru bisa dipasarkan di sekolah-sekolah, sedangkan batako belum bisa akses ke toko-toko bangunan, melainkan baru bisa dipasarkan di wa rga sekitar yang berminat. Penyebabnya adalah pasar sudah mempunyai rekanan sendiri dan kurang cocok dengan harga yang ditawarkan oleh pihak pengelola. Untuk *Spare part* motor juga tidak bisa akses ke bengkel-bengkel karena tidak punya merek, pemasaran bergantung pada usaha *spare part* motor milik bapak H. Dadan yang merupakan maklon dari toko Alfa dimana produk KBU disaring dua kali sehingga produk yang bisa terjual relatif sedikit (hanya 30 %) tidak sebanding dengan biaya produksi dan upah. Sedangkan pada usaha Elektro juga tidak berjalan karena merasa belum cukup trampil dalam pelayanan jasa service elektro sehingga kurang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Penyebab lain dari tidak berkembangnya pemasaran adalah karena belum optimalnya dukungan dari kelembagaan lokal, baik pemerintah maupun masyarakat.

c. Keterbatasan Modal

Sumber modal dalam pengembangan KBU masih bergantung dana bantuan dari pemerintah yang sebenarnya bersifat stimulan dan terbatas.

Sedikitnya modal dan sulitnya pemasaran menyebabkan pihak pengelola kesulitan membiayai alat-alat produksi yang rusak, sehingga kegiatan produksi menjadi terhenti.

d. Keterbatasan Sarana

Selain keterbatasan modal, pengelolaan KBU juga belum cukup mempunyai sarana yang mendukung proses belajar usaha warga belajar. Dari empat jenis keterampilan yang dikembangkan pihak pengelola baru mempunyai satu ruang keterampilan, ditambah peralatan keterampilan yang masih terbatas sehingga mempengaruhi keseriusan dan kenyamanan warga belajar dalam kegiatan KBU.

e. kemiskinan

Masih banyak warga miskin dan pengangguran yang belum mengetahui tentang program KBU yang dikembangkan PKBM. Hal ini menyebabkan hanya warga sekitar PKBM dan warga belajar peserta program pendidikan kesetaraan saja yang baru bisa mengikuti kegiatan KBU di PKBM "Tresna Bhakti".

2. Analisis Kebutuhan

Berdasarkan analisis masalah di atas, maka dapat diidentifikasi kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut :

- a. Perlu dikembangkan KBU sesuai dengan aspirasi (minat dan kebutuhan) warga belajar dengan instruktur keterampilan yang profesional melalui program pendidikan dan pelatihan keterampilan yang aspiratif.
- b. Perlu dikembangkan KBU yang bisa berkembang di pasar ekonomi lokal, serta mendapat dukungan dari lembaga lokal melalui pengembangan jenis keterampilan baru yang bisa berkembang di pasar ekonomi lokal.
- c. Perlu dilakukan peningkatan jaringan kerjasama dengan pemerintah dan *stakeholder* yang bisa memberikan bantuan baik dalam bentuk modal atau program yang mendukung pengembangan KBU
- d. Perlu diciptakan hubungan kerjasama/koordinasi antara PKBM melalui suatu kelembagaan baru dengan kelembagaan lokal yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang saling menguntungkan dalam rangka memperluas pelayanan dan dukungan.

3. Identifikasi Sumber

Sumber-sumber atau potensi yang dapat dimanfaatkan dalam

pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” meliputi:

a. Sumber informal

Sumber informal yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan KBU berupa dukungan emosional dari keluarga, teman-teman, warga di sekitar PKBM, serta tokoh masyarakat disamping adanya kemauan dari warga belajar dan pihak pengelola untuk tetap mengembangkan KBU di PKBM “Tresna Bhakti”.

b. Sumber formal

Sumber formal yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan KBU ke depan meliputi : Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Panawangan , Pemerintah Kabupaten Ciamis (Dinas terkait), Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Departemen Pendidikan Nasional (Ditjen PLS),

c. Sumber kemasyarakatan

Sumber kemasyarakatan yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan KBU meliputi : Lembaga Pendidikan Kurus (LPK) ESIA dan BERDIKARI yang bisa menyediakan tenaga instruktur yang berkualitas, usaha bengkel motor lokal, usaha penjahit lokal, perusahaan swasta (di Kabupaten Ciamis terdapat 365 perusahaan besar dan kecil yang terkonsentrasi di wilayah Kecamatan Panawangan , termasuk perusahaan *garment*, bordir dan tekstil) yang mendorong perkembangan sektor informal perdagangan dan jasa angkutan (transportasi).

D. Upaya Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”

Berdasarkan hasil analisis masalah, berkaitan dengan pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” baik pada jenis keterampilan yang masih berjalan maupun keterampilan yang sudah tidak berjalan lagi, maka penulis mengajak warga belajar (sapu ijuk dan batako), pengelola, dan instruktur, serta alumni warga belajar *spare part* motor dan elektro melalui forum diskusi untuk mengevaluasi kegiatan KBU yang telah dilaksanakan (analisis masalah dan kebutuhan), sekaligus membuat rencana model pengembangan KBU yang akan datang, yang nantinya akan dibahas dan disempurnakan dalam diskusi yang dihadiri oleh seluruh *stake holder* yang terkait dengan usaha pengembangan KBU.

Kegiatan diskusi (intern) dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Nopember

2007 bertempat di ruang kelas PKBM “Tresna Bhakti”. Acara dimulai pada pukul 10.00 – 11.30 WIB. Adapun prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Proses Jalannya Diskusi

- a. Diskusi dihadiri oleh 19 orang peserta, terdiri dari Ketua PKBM, instruktur 3 orang (Batako, makanan ringan dan Sapu ijuk), warga belajar sapu ijuk 4 orang, warga belajar pembuatan makanan ringan 5 orang, warga belajar Batako 1 orang, alumni warga belajar *spare part* motor 3 orang dan elektro 3 orang,
- b. Pembukaan oleh Ketua PKBM Bapak ES, sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan diskusi
- c. Presentasi oleh penulis berkaitan dengan kegiatan KBU yang telah dilaksanakan
- d. Membuat identifikasi masalah dan kebutuhan secara bersama. Pada kesempatan ini penulis menawarkan kepada peserta apakah KBU akan dilanjutkan dengan jenis keterampilan yang sudah ada (batako dan sapu ijuk) atau dengan jenis keterampilan baru berdasarkan aspirasi dari warga belajar dan potensi ekonomi lokal
- e. Menyusun draf rencana pengembangan KBU untuk disampaikan dalam forum diskusi yang dihadiri oleh stakeholder terkait dengan pengembangan KBU dengan tujuan mendapatkan model KBU PKBM “Tresna Bhakti” yang berkembang dan berkelanjutan sekaligus memberdayakan masyarakat miskin
- f. Kesepakatan hasil diskusi, dan acara penutupan diskusi

2. Presentasi Permasalahan KBU oleh Fasilitator

Beberapa permasalahan KBU yang diangkat oleh penulis yang bertindak sebagai fasilitator adalah:

- a. Minat dan motivasi warga belajar dalam mengikuti kegiatan KBU masih kurang, warga belajar enggan terlibat dalam usaha pemasaran (pemasaran oleh pengelola PKBM) penyebabnya jenis keterampilan yang dikembangkan dianggap kurang modern dan kurang sesuai untuk anak muda (Batako dan sapu ijuk).
- b. Kesulitan dalam hal pemasaran, penyebabnya: (1) instruktur keterampilan yang memberikan pelatihan *spare part* motor kurang kompeten (tidak berasal dari lembaga profesional), sehingga kualitas

barang produksi kurang bagus, sehingga sulit dipasarkan sendiri melainkan bergantung pada makloon dari Toko ALFA (usaha *spare part* motor milik Bapak HD) dimana produk *spare part* motor KBU disaring dua kali, sehingga produk yang terjual relatif sedikit (tidak lebih dari 30 %). Produk batako juga belum bisa akses ke toko-toko bangunan karena harga yang ditawarkan terlalu rendah (Rp. 250,-/bata), sehingga baru bisa dipasarkan di lingkungan warga sekitar dengan harga Rp. 400,-/bata. Demikian juga dengan sapu ijuk baru bisa dipasarkan di sekolah-sekolah (setahun sekali), (2) lembaga-lembaga lokal dan *stakeholder* belum sepenuhnya memberikan dukungan

- c. Keterbatasan akses modal: Sumber modal berasal dari pemerintah yang sifatnya stimulan (tidak rutin) dan terbatas. Kondisi saat ini peralatan produksi spare part motor dalam keadaan rusak dan tidak ada dana untuk perbaikan.
- d. Kurangnya sarana penunjang
- e. Masih banyak warga di Desa Cinyasag yang belum mengetahui program KBU yang dikembangkan PKBM, warga belajar yang mengikuti KBU baru berasal dari warga sekitar dan warga belajar yang mengikuti program pendidikan kesetaraan.

Selanjutnya fasilitator menawarkan kepada audiens apakah kegiatan KBU akan tetap dilanjutkan dengan keterampilan yang lama atau dengan keterampilan yang baru mengikuti keinginan atau aspirasi warga belajar dan masyarakat.

3. Tanggapan Peserta Diskusi

a. ESN (alumni warga belajar bengkel):

"Kalo saya boleh usul pak, karena usaha spare part motor barangnya sulit dipasarkan sendiri sebab tidak punya merk dan kalah dengan produk spare part dari luar ditambah alat-alat produksinya juga sudah rusak, bagaimana kalau kegiatan KBU ke depan diganti dengan keterampilan bengkel motor".

b. EH (Alumni warg belajar spare part motor):

"Saya sependapat dengan Rahmat, sebenarnya kita dulu juga sangat ingin sekali belajar dan usaha bengkel sepeda motor, tapi program yang ada di PKBM malah buat spare part motor, akhirnya kita malah kesulitan".

c. SS (warga belajar):

"Kalo saya cenderung lebih memilih keterampilan menjahit prospeknya lebih bagus, dan kalau bengkel motor wanita sulit ikutan, tetapi kalau menjahit perempuan atau laki-laki bisa ikutan belajar dan usaha".

d. Bapak DRY (Instruktur):

"saya rasa peluang mengembangkan usaha menjahit lebih menjanjikan, pertama di Cinyasag belum ada KUBE menjahit, dan usaha penjahitnya juga masih relatif sedikit, kedua kita berdekatan dengan industri Garment, ketiga kita sudah memiliki 3 buah mesin jahit biasa dan 2 buah mesin Juki dan kebetulan saya juga sedikit tahu tentang mesin jahit jadi kalau ada kerusakan perbaikannya bisa dilakukan sendiri".

e. Bapak ES (pengelola) :

"Sebenarnya usaha menjahit atau bengkel motor memiliki peluang yang baik, namun dilihat dari potensi yang ada kita paling siap mengembangkan usaha jahitan karena kita sudah memiliki beberapa mesin jahit, tetapi kalo dananya mencukupi bisa juga kita mengembangkan keduanya, menjahit dan bengkel sepeda motor".

f. Fasilitator:

"Kalau memang warga belajar menginginkan keterampilan menjahit dan sepeda motor, sebaiknya instrukturnya bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Kursus misalnya LPK ESIA, jangan seperti kemarin tidak ada sertifikatnya karena nantinya yang akan dijual KBU PKBM adalah SDM-nya. Kalau tenaga-tenaga penjahit dan bengkelnya memiliki sertifikat dari LPK terkenal kepercayaan masyarakat akan besar dan usaha kita mudah-mudahan akan berjalan dengan lancar. Selain itu, untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihannya, kita juga sebaiknya bekerjasama dengan perusahaan swasta atau penjahit dan bengkel sepeda motor swasta untuk PKL atau magang warga belajar sekitar dua minggu sampai satu bulan ditambah materi tentang kewirausahaan untuk meningkatkan motivasi dan wawasan warga belajar dalam berwiraswasta. Selain itu, sebaiknya kita juga membuat model pengelolaan KBU yang berkelanjutan, karena bantuan dari pemerintah biasanya hanya bersifat stimulan jadi harus benar-benar bisa dikembangkan".

4. Hasil Diskusi yang Disepakati

- a. Untuk pengembangan KBU PKBM "Tresna Bhakti" di masa yang akan datang direncanakan mengembangkan keterampilan dan usaha menjahit dan bengkel sepeda motor sesuai dengan aspirasi atau keinginan warga belajar.
- b. Identifikasi dan seleksi calon warga belajar menjahit dan bengkel motor.
- c. Dalam kurikulum pelatihan disertakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan atau magang di perusahaan swasta (Garment), penjahit swasta dan bengkel swasta selama dua minggu atau satu bulan untuk memberikan pengalaman berwiraswasta bagi warga belajar.
- d. Melakukan pendekatan atau penjangjagan kepada stake holders yang terkait dengan pengembangan KBU menjahit dan bengkel sepeda motor
- e. Menyusun rancangan model pengelolaan KBU (konsep atau draf dibuat oleh fasilitator) yang nantinya dipresentasikan dalam diskusi perancangan program secara partisipatif dengan *stake holder* terkait,

direncanakan pada hari Kamis 15 Pebruari 2013

5. Keterlibatan Stakeholder Dalam Upaya Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”

Kelompok Belajar Usaha (KBU) PKBM “Tresna Bhakti” pada dasarnya merupakan suatu wadah untuk meningkatkan keterampilan bagi warga miskin, khususnya di komunitas Desa Cinyasag yang bergantung hanya pada satu sumber penghasilan tertentu atau tidak memiliki lapangan pekerjaan disebabkan kurangnya keterampilan yang dimiliki. Selama bisa diciptakan lapangan pekerjaan atau kegiatan usaha, maka warga miskin akan mempunyai kesempatan untuk memutuskan lingkaran rantai kemiskinannya. Pada pelaksanaan kegiatannya, KBU menghadapi berbagai hambatan dan keterbatasan yang menyebabkan dirinya tidak dapat berkembang secara mandiri. Untuk itu diperlukan keterlibatan atau dukungan dari berbagai pihak yang terkait dengan pengembangan KBU, sebagaimana diungkapkan oleh Sedarmayanti (2004):

“Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi disegala bidang, dewasa ini di Indonesia dituntut untuk dapat membentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat maani secara nyata yang terlibat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam berbagai bidang, antara lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam rangka pengelolaan bersama prasarana dan sarana publik antara pemerintah, swasta dan masyarakat”.

Pernyataan di atas, sesuai dengan konsep *Good Governance* dalam konteks pemberdayaan masyarakat, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik, yang memberikan kesetaraan yang sejajar antara pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karenanya, dalam pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” diperlukan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat dan swasta (*private sector*). Adapun *stake holder* yang terkait dengan pengembangan KBU adalah:

a. Pemerintah Desa Cinyasag

Desa Cinyasag merupakan salah satu pemerintah lokal yang memiliki tugas membina dan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat dapat aktif berperan serta dalam pembangunan berkaitan dengan program-program yang ada di wilayahnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, pihak Desa akan berupaya membantu pengembangan KBU dimasa yang akan datang, asalkan dari pihak PKBM sendiri aktif untuk

berkoordinasi dengan pihak Desa berkaitan dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Karena bagaimanapun PKBM merupakan aset Desa Cinyasag yang bisa dijadikan wadah untuk pemberdayaan masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak ASP:

“Pada prinsipnya kami akan berusaha membantu pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”, karena memang tugas kami adalah melaESIA masyarakat, apalagi tujuannya untuk memberdayakan warga miskin. Sebetulnya kami telah mencoba berkomunikasi dengan para pimpinan lembaga/organisasi yang ada di Desa Cinyasag melalui kegiatan Musyawarah Desa yang isinya menampung aspirasi masyarakat berkaitan program pembangunan yang akan diusulkan ke Musyawarah Tingkat Kecamatan. Akan tetapi tidak semua lembaga/organisasi mau hadir dalam kegiatan itu. Mungkin perlu dibuat kegiatan tersendiri yang mempertemukan para pimpinan organisasi yang berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial, dan ini harusnya dikoordinir oleh LPM, pihak Desa hanya memfasilitasi saja”. Berkaitan rencana KBU untuk mengembangkan keterampilan menjahit dan bengkel motor saya setuju saja, karena Desa Cinyasag ini berdekatan dengan daerah industri tekstil, bordir dan Garment, jadi peluangnya saya kira cukup baik”.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

LPM Desa adalah lembaga independen yang mempunyai tugas mengawasi program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Berkaitan dengan pengembangan KBU, LPM yang merupakan wakil masyarakat bisa memberikan masukan saran dan pertimbangan kepada pengelola KBU berkaitan dengan kebutuhan warga masyarakat yang bisa dipenuhi oleh KBU PKBM “Tresna Bhakti”, sebagaimana diungkapkan oleh MZK (anggota LPM).

“Saya sangat senang sekali jika dalam kegiatan pengembangan KBU, pengelola PKBM mau berkoordinasi dengan kami, dan kamipun pasti akan membantu sebisanya. Berkaitan dengan rencana PKBM untuk mengembangkan keterampilan menjahit dan bengkel motor, saya kira prospeknya juga lumayan bagus, terutama menjahit cuma kalau bisa pendidikan dan pelatihannya yang benar-benar agar anak-anak bisa bekerja dengan terampil”.

c. Lembaga/organisasi sosial di Desa Cinyasag

Yang dimaksud penulis dengan lembaga/organsiasi sosial disini adalah lembaga/organsasi sosial yang ada di Desa Cinyasag yang mempunyai tugas dan tujuan berkaitan dengan penanggulangan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat, seperti PKK, BKM, IKPSM, Karang Taruna, Badan Keswadayaan

Masyarakat, dan LSM Peduli Cimahi yang bergerak di bidang pencegahan pemuda dari bahaya narkoba. Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan pengurus lembaga/organisasi sosial tersebut, seluruhnya menyambut baik jika diantara sesama organisasi lokal bisa saling bertukar informasi dan bekerjasama, karena pada dasarnya mereka mempunyai sasaran garapan yang sama yaitu warga miskin yang ada di Desa Cinyasag , sebagaimana diungkan oleh Ibu TJ Ketua IKPSM Desa Cinyasag:

“Memang seharusnya seluruh organisasi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus saling bertukar informasi dan kerjasama, jadi kita sama-sama bisa tahu masing-masing program kegiatan yang sedang dilaksanakan dan siapa sasarannya. Sekarang ini banyak program-program pemberdayaan yang di bawa oleh instansi pemerintah, tetapi penerima program orangnya itu-itu saja, jadi kesannya tumpang tindih dan tidak merata. Kalau kita bisa saling koordinasi nantinya kita akan tahu warga miskin mana yang ikut pada program KUBE, mana yang ikut Program KBU PKBM, mana yang ikut program UP2K dan sebagainya. Seharusnya LPM Desa Cinyasag mengerakkan kitakita bagaimana supaya bisa saling berkoordinasi paling tidak sebulan sekali berkumpul bersama membahas masalah sosial yang ada di Desa Cinyasag terutama masalah penanggulangan kemiskinan”.

d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Ciamis

BPMKB adalah salah satu dinas teknis yang mempunyai tiga bidang tugas, yaitu bidang pemberdayaan masyarakat, bidang masalah sosial dan bidang Keluarga Berencana. Bidang yang menangani masalah kemiskinan adalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Masalah Sosial. Program pengentasan kemiskinan yang ada di Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada tahun 2013 ini adalah program UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang pada pelaksanaan teknisnya bekerjasama dengan PKK Tingkat Desa. Sedangkan program pengentasan kemiskinan yang ada di Bidang Masalah Sosial menurut Kepala Bagian Masalah sosial Bapak Drs. Edi Setiawan adalah program KUBE yang dananya berasal dari Departemen Sosial melalui Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat. Beberapa program atau kegiatan lain yang ada di Bidang Masalah Sosial meliputi : Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat, dan Pembinaan Manajemen Sumber Daya Manusia Karang Taruna, IKPSM dan Organisasi Sosial. Berkaitan dengan upaya

pengembangan KBU, maka BPMKB Kabupaten Ciamis , khususnya Bidang Masalah Sosial yang mempunyai program KUBE memiliki keterkaitan dalam kegiatan KBU, dimana nantinya warga belajar yang membuka usaha secara berkelompok diupayakan bisa mendapatkan akses bantuan KUBE dari Departemen Sosial RI melalui Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat atas rekomendasi BPMKB berdasarkan usulan dari KBU PKBM yang telah mendapat rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

e. Dinas Perekonomian dan Koperasi

Dinas Perekonomian dan Koperasi Kabupaten Ciamis adalah salah satu dinas teknis yang mempunyai tiga bidang tugas, yaitu Bidang Perdagangan dan Industri, Bidang Koperasi dan Bidang Pengembangan Pariwisata. Keterkaitan Dinas Perekonomian dan Industri Kabupaten Ciamis pada upaya pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” adalah pada Bidang perdagangan dan Industri, yaitu Seksi Perdagangan dan Industri dan Seksi Bantuan untuk KUKM. Salah satu program pada Seksi Perdagangan dan Industri yang terkait dengan pengembangan KBU adalah Program Peningkatan Kemitraan antara UKM dan Swasta, dimana Dinas Perekonomian dan Industri berupaya dan membantu menciptakan dan memfasilitasi hubungan kemitraan antara UKM dengan swasta untuk mempermudah pemasaran. Dalam hal ini menurut Kepala Seksi Perdagangan dan Industri Drs. Hapid Wismansyah, Dinas Perekonomian dan Koperasi bisa membantu warga belajar yang telah mendapatkan Pelatihan Menjahit JUKI untuk menjadi makloon suatu perusahaan yang membutuhkan, dan untuk pengembangan usaha KBU PKBM juga bisa bermitra dengan Rumah Model “Sentra Sakinah” binaan Dinas Perekonomian dan Industri Kabupaten Ciamis. Selain itu Seksi Bantuan untuk KUKM menurut Bapak Dadan Sugistha juga bisa memberikan bantuan modal bagi warga belajar yang telah membuka usaha secara mandiri baik individu maupun kelompok berdasarkan rekomendasi dari PKBM “Tresna Bhakti” dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis .

f. Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Ciamis

Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Ciamis adalah dinas teknis yang memberikan pelayanan dibidang Ketenaga Kerjaan dan Bidang

Kependudukan. Bidang yang berkaitan dengan upaya pengembangan KBU PKBM adalah Bidang Ketenaga Kerjaan yang membawahi Seksi Pelatihan Tenaga Kerja, yang menyelenggarakan program-program Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja dengan tujuan memperluas lapangan pekerjaan melalui peningkatan keterampilan tenaga kerja. Jenis Pelatihan keterampilan yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan diantaranya adalah Pelatihan Menjahit, Bengkel Motor, Manufaktur Industri, Sablon, Pengelasan, Pertukangan, Kerajinan dan sebagainya yang dananya berasal dari APBD atau APBN. Menurut Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Ciamis Bapak Drs, Engkos Kosasih Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Ciamis bisa membantu mengikut sertakan warga belajar untuk mendapatkan program Keterampilan sesuai yang dibutuhkan berdasarkan program kegiatan yang ada dan atas permintaan atau rekomendasi dari PKBM “Tresna Bhakti”.

g. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis adalah salah satu dinas teknis yang memberikan pelayanan di bidang Pendidikan Dasar TK/RA-SD, bidang Pendidikan Menengah, dan bidang Pendidikan Luar Sekolah. PKBM adalah lembaga pendidikan masyarakat yang bersifat non formal yang pendiriannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. Oleh karenanya tugas pembinaan PKBM berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis yang dilaksanakan oleh seorang pejabat fungsional. Adapun tugas pembina Pendidikan Luar Sekolah adalah melakukan monitoring, supervisi, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang keolahragaan, pendidikan masyarakat dan kebudayaan. Hasil pembinaan akan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Seksi pendidikan Luar Sekolah. Dalam upaya pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” Selain sebagai pembina, penilik juga berfungsi memberikan rekomendasi yang menguatkan usulan atau proposal yang diajukan oleh lembaga pendidikan luar sekolah termasuk PKBM kepada dinas pendidikan Kabupaten Ciamis yang merupakan salah satu sumber dana operasional kegiatan KBU PKBM,

h. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat adalah lembaga pemerintah

yang mengkoordinir pembangunan di bidang pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Barat, termasuk di dalamnya pembangunan melalui pendidikan luar sekolah yang berada di bawah Kepala Sub Dinas PLS. Selain sebagai pembina PKBM di tingkat Provinsi, Dinas Pendidikan juga merupakan salah satu sumber dana bagi pengembangan KBU PKBM

i. Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Pendidikan Luar Sekolah

Departemen Pendidikan Nasional RI adalah lembaga pemerintah yang mengkoordinir pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia. Untuk pengembangan KBU PKBM Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah pada Direktorat Pendidikan Masyarakat meluncurkan Program Latihan Keterampilan Kerja dengan memberikan Dana Bantuan Khusus (DBK) yang berorientasi pada pemecahan masalah pekerjaan.

j. LPK ESIA

Lembaga Pendidikan Kursus ESIA merupakan Lembaga Pendidikan Kursus Profesional yang memberikan pelayanan pelatihan keterampilan menjahit, bengkel sepeda motor dan computer, sudah dikenal oleh masyarakat luas. LPK ESIA mempunyai 58 Cabang tersebar di Provinsi Jawa Barat termasuk di Kabupaten Ciamis. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak LPK ESIA, mereka bersedia untuk bekerjasama membantu penyediaan tenaga instruktur secara privat (instruktur datang ke PKBM) dengan rasio 1 : 10 warga belajar.

k. Usaha Penjahit Lokal (Remaja Taylor dan Penjahit Mekar Remaja)

Selain mengadakan kerjasama dengan perusahaan swasta, upaya pengembangan KBU PKBM "Tresna Bhakti" juga melibatkan usaha penjahit lokal untuk tempat magang warga belajar yang menggunakan mesin jahit biasa. Pendekatan dengan usaha penjahit lokal dilakukan ke Remaja Taylor dan Penjahit Mekar Remaja yang lokasinya berada di sekitar Desa Cinyasag. Melalui beberapa kali pendekatan, akhirnya mereka bersedia menjadi tempat magang bagi satu orang warga belajar, dengan syarat warga belajarnya adalah hasil pendidikan sebuah LPK, karena jika tidak, biasanya keterampilan siswa magang masih sangat minim dan pihak penjahit harus banyak membimbing, dan itu menghabiskan banyak waktu sedangkan mereka dikejar order dari langganan.

l. Usaha Bengkel Motor

Sebagai tempat magang bagi warga belajar yang nantinya mengikuti KBU Bengkel sepeda motor, penulis bersama dengan pengelola PKBM mengadakan pendekatan dengan beberapa usaha bengkel motor yang ada di sekitar Desa Cinyasag. Dari beberapa bengkel yang dimintai kesediannya, ada beberapa bengkel yang bersedia menerima warga belajar untuk magang di tempat mereka dengan maksimal 2 orang warga belajar. Usaha bengkel tersebut adalah: Sule Motor dan Atim Motor.

E. Perancangan Program Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” Secara Partisipatif

Untuk melakukan perubahan terhadap program kegiatan KBU PKBM “Tresna Bhakti” di masa yang akan datang, maka perlu disusun suatu model atau strategi baru pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”, yang dapat menjadi wadah bagi upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Penyusunan rancangan program pengembangan KBU dilakukan secara partisipatif yang melibatkan stake holders terkait, melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion).

Diskusi kelompok terarah dilakukan berdasarkan keinginan dari warga belajar, pengelola PKBM “Tresna Bhakti” dan instruktur yang menghendaki agar kegiatan KBU di PKBM “Tresna Bhakti” tetap dapat berjalan dan berkembang dengan lebih baik, serta atas kesediaan dari *stake holder* terkait untuk bersama-sama mewujudkan satu wadah yang mampu memberdayakan masyarakat miskin. Adapun peserta yang hadir dalam diskusi tersebut sebanyak 31 orang, terdiri dari:

1. Warga belajar (Sapu ijuk dan Batako)
2. Alumni Warga belajar (Spare part motor, elektro dan makanan ringan)
3. Instruktur
4. Ketua PKBM
5. Sekretaris Desa Cinyasag
6. Perwakilan dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)
7. Perwakilan dari LPM (Lembaga Pembedayaan Masyarakat)
8. Perwakilan dari pengurus PKK
9. Perwakilan dari pengurus IKPSM
10. Karang Taruna dan warga masyarakat

11. Pembina PKBM dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
12. Perwakilan dari penjahit Mekar Remaja
13. Aparat Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Ciamis
14. Aparat Dinas Perekonomian dan Koperasi

Diskusi kelompok terarah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2013 sesuai waktu yang telah disepakati, dengan agenda:

1. Membahas berbagai permasalahan yang dihadapi KBU PKBM “Tresna Bhakti” untuk dapat dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama.
2. Mencari model pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” yang partisipatif sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi lokal dan sumber daya yang ada berdasarkan pemikiran dan kesepakatan bersama seluruh *stake holder*
3. Menyusun rencana aksi atau program pengembangan KBU di masa yang akan datang berdasarkan hasil diskusi bersama *stake holder* terkait.

Proses Jalannya Diskusi

Diskusi dilaksanakan dari pukul 10.00 s.d 12.30 WIB. Adapun proses jalannya diskusi adalah sebagai berikut :

1. Diskusi diawali dengan sambutan dari aparat Pemerintah Desa Cinyasag yang diwakili oleh Sekretaris Desa Bapak Nanang yang menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan PKBM “Tresna Bhakti” dan seluruh peserta yang telah bersedia hadir, sekaligus menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya kegiatan diskusi ini. Beliau menyambut gembira diadakannya diskusi ini yang dianggap mencerminkan terbangunnya kebersamaan diantara seluruh komponen masyarakat Desa Cinyasag dalam menyelesaikan suatu permasalahan, khususnya dalam penanggulangan masalah kemiskinan.
2. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh penulis yang menyampaikan :
 - a. Usulan untuk disepakatinya prinsip-prinsip pengelolaan KBU yang berkelanjutan, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan KBU di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip tersebut meliputi :
 - 1) KBU dikembangkan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dengan tujuan pemberdayaan masyarakat

- 2) KBU dikembangkan dengan melihat potensi lokal, sehingga diharapkan dapat berkembang di pasar lokal
 - 3) Pada dasarnya bantuan pemerintah hanya bersifat stimulan yang diharapkan dapat dikembangkan secara berkelanjutan dalam KBU, oleh karena itu pengembangan KBU harus melalui suatu perencanaan yang matang dan partisipatif
 - 4) Koordinasi dan pertukaran informasi dengan kelembagaan lokal, khususnya dengan pemerintah Desa sangat penting untuk meningkatkan peluang keberhasilan KBU PKBM "Tresna Bhakti".
- b. Hasil diskusi pertama yang dihadiri oleh warga belajar, instruktur dan pengelola, disepakati KBU PKBM "Tresna Bhakti" tetap diteruskan dengan model pengelolaan KBU baru yang aspiratif dan partisipatif.
 - c. Permasalahan KBU PKBM "Tresna Bhakti" yang telah dilaksanakan, potensi yang dimiliki dan kebutuhan untuk pengembangan KBU PKBM ke depan.

Tabel 4.8
Analisis Masalah, Potensi Dan Alternatif Pemecahan Masalah KBU PKBM “Tresna Bhakti”

NO	MASALAH	PENYEBAB	DAMPAK	POTENSI	KEBUTUHAN	PEMECAHAN MASALAH
1.	Minat dan motivasi warga belajar dalam kegiatan KBU masih kurang (Batako dan sapu ijuk dianggap kurang modern, <i>Spare part</i> motor dan elektro dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan warga belajar)	Jenis keterampilan yang dikembangkan KBU belum bersifat partisipatif (<i>Top Down</i>) Instruktur Keterampilan tidak berasal dari Lembaga Pendidikan Kursus Profesional Kurang koordinasi dengan lembaga lokal yang bisa memberikan masukan tentang prospek pengembangan KBU	Keterampilan yang dimiliki warga belajar kurang optimal Warga belajar kurang peduli dengan upaya pengembangan KBU, khususnya keterlibatan dalam hal pemasaran	Adanya kemauan dari warga dan warga belajar untuk belajar keterampilan usaha, Adanya kemauan dari pengelola PKBM untuk tetap menghidupkan KBU	Perlu dikembangkan KBU sesuai dengan minat dan kebutuhan warga belajar dengan instruktur keterampilan yang berkualitas	Pendidikan dan pelatihan keterampilan yang aspiratif sesuai minat dan kebutuhan warga
2.	Jaringan pemasaran tidak berkembang	Lembaga-lembaga lokal dan <i>stakeholder</i> belum sepenuhnya mendukung Kualitas produksi (Batako dan spareparts motor) masih dianggap kurang bagus oleh swasta	Sapu ijuk baru bisa dipasarkan di sekolah-sekolah, di Cinyasag juga ada KUBE sapu ijuk RAHAYU yang diedarkan ke warga sekitar dan instansi pemerintah	Adanya lembaga lokal dan <i>stakeholder</i> yang dapat memberikan dukungan	KBU yang bisa berkembang di pasar ekonomi lokal yang mendapat dukungan dari lembaga lokal	Pengembangan jenis keterampilan baru yang bisa berkembang di pasar ekonomi lokal dengan instruktur yang profesional (keterampilan Menjahit dan Bengkel Motor bekerjasama dengan LPK ESIA, LPK

NO	MASALAH	PENYEBAB	DAMPAK	POTENSI	KEBUTUHAN	PEMECAHAN MASALAH
		Waktu pelatihan relatif singkat, & Instruktur keterampilan tidak berasal dari lembaga kursus profesional (LPK)	Batako belum bisa akses ke toko-toko bangunan (bisa tetapi dengan harga yang rendah di bawah biaya produksi), baru bisa dipasarkan di warga sekitar yang berminat <i>Spare part</i> motor tidak bisa akses ke pasar (bengkelbengkel) karena tidak punya merk, pemasaran bergantung pada maklon dari Alfa dimana produk KBU disaring dua kali sehingga produk yang bisa terjual relatif sedikit (hanya 30 %) tidak sebanding dengan biaya produksi dan upah.			Berdikari dan swasta yang bersedia terlibat dalam proses pendidikan dan latihan)
3.	Keterbatasan akses modal	Sumber modal berasal dari pemerintah yang sifatnya stimulan (tidak rutin) dan terbatas	Usaha Elektro tidak berjalan karena merasa belum cukup tram pil dalam pelayanan jasa service elektro	Adanya sumber-sumber dana yang bisa diperoleh dari pemerintah (Depdiknas,	Tersedianya modal yang cukup untuk pengembangan dan inovasi produk yang baru	Pengelola PKBM dan pemerintah Desa berupaya membentuk jaringan dengan <i>stakeholders</i> yang bisa memberikan bantuan baik dalam bentuk modal

NO	MASALAH	PENYEBAB	DAMPAK	POTENSI	KEBUTUHAN	PEMECAHAN MASALAH
			Tidak mampu membiayai kerusakan pada alat-alat produksi dan biaya pemasaran	Disdik, BPMKB, Disperekop, Disnakerduk Ciamis dan swadaya masyarakat		atau program yang mendukung pengembangan KBU
4.	Keterbatasan sarana Masih banyak warga miskin dan pengangguran yang belum mengetahui tentang program KBU yang dikembangkan PKBM	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang keterampilan dan produksi relatif kecil dan jumlahnya sedikit (hanya 1) sehingga kurang leluasa untuk pengembangan KBU - Alat-alat keterampilan masih terbatas (spare part Kurang sosialisasi tentang program KBU - Kurang koordinasi dengan lembaga/organisasi lokal terkait dengan kegiatan KBU motor) 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses produksi kadang dilakukan di luar ruangan (sapu ijuk) - Terjadi kerusakan pada alat produksi yang memerlukan biaya Yang mengikuti program KBU baru hanya warga sekitar dan warga belajar yang mengikuti program pendidikan kesetaraan besar 	<ul style="list-style-type: none"> - PKBM Tresna Bhakti mempunyai lahan yang cukup luas (1750 M2) - Adanya ruang kelas yang cukup luas yang bisa dipakai untuk pemberian materi (se-nin, selasa rabu) 	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan KBU - Tersebar nya informasi kegiatan KBU ke seluruh warga masyarakat yang berdampak 	Pembangunan ruang keterampilan baru untuk pengembangan KBU Perlu diciptakan hubungan kerjasama/koordinasi antara PKBM melalui suatu kelembagaan baru dengan kelembagaan lokal yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang saling menguntungkan

Tabel 4.9
Program Pengembangan KBU PKBM "Tresna Bhakti" Desa Cinyasag

No	Program	Kegiatan	Pelaksana	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Dana
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Menjahit dan Bengkel Motor	Seleksi Calon Warga Belajar	PKBM, BKM	Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis , Pemerintah Desa Cinyasag	Pebruari 2008	Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis , Pemerintah
		Pendidikan dan Pelatihan Menjahit dan Bengkel Motor	LPK ESIA dan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Ciamis	Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis , Pemerintah Desa Cinyasag , PKBM "Tresna Bhakti"	Maret s.dAgustus 2008 (enam bulan)	Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis , Swadaya masyarakat
		Magang/PKL	PKBM, PT Katrine Tatali Pratama, Usaha penjahit lokal dan usaha	PKBM "Tresna Bhakti" Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan	September 2008	
		Bimbingan Sosial (Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial warga belajar dalam penanggulangan	BPMKB Kabupaten Ciamis (Bagian sosial)	BPMKB Kabupaten Ciamis	September 2008	

No	Program	Kegiatan	Pelaksana	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Dana
2.	Pengembangan Usaha KBU	Usaha Menerima Jahitan dan Bengkel Sepeda Motor	Warga Belajar	PKBM, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	Oktober 2008 s.d Maret 2009	
		Pendampingan	Pembina PKBM Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Pemerintah Desa LPM dan BKM	Dinas Pendidikan Pemerintah Desa Cinyasag		
3	Pengembangan Usaha Mandiri	Mengusahakan pinjaman modal dari :	Dinas Perekonomian dan Koperasi,	PKBM Pemerintah Desa Cinyasag	Mulai April 2009	
		Fasilitasi jaringan pemasaran dengan swasta	Dinas Perekonomian dan Koperasi	PKBM, Pemerintah Desa Cinyasag		
4	Peningkatan pelayanan informasi PKBM dan kerjasama dengan kelembagaan lokal	Forum rembug	LPM	Pemerintah Desa Cinyasag	Setiap 1 bulan sekali mulai Pebruari 2008	Pemerintah Desa, Swadaya masyarakat

Tanggapan Peserta Diskusi

Dalam proses diskusi, seluruh peserta mengikuti dengan seksama. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya peserta yang memberikan tanggapan, baik berupa pertanyaan maupun masukan kepada fasilitator. Adapun peserta yang memberikan tanggapan adalah:

1. Bapak ED dari BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat):

“Sebelum saya menanggapi permasalahan KBU PKBM lebih lanjut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan : pertama siapakah sebenarnya kelompok sasaran dari KBU PKBM, apakah warga belajar yang mengikuti pendidikan kesetaraan atau lingkungannya untuk seluruh warga masyarakat Cinyasag . Kedua, dari hasil evaluasi dan kajian yang diungkapkan Bapak Gito tadi, warga belajar menginginkan keterampilan menjahit dan bengkel motor, berapa orang yang akan diambil untuk mengikuti pendidikan keterampilan tersebut dan bagaimana cara rekrutmentnya ? kebetulan saya adalah pengurus BKM yang mempunyai tugas menyiapkan kelompok sasaran terkait dengan program-program pemerintah, sehingga diharapkan tidak ada warga yang mendapatkan program secara ganda sementara ada warga lain yang tidak dapat”.

2. Bapak NNg (Sekretaris Desa)

“Saya sebagai aparat Desa setuju dan mendukung aspirasi warga untuk mengembangkan usaha jahit dan bengkel motor. Saya rasa kedua keterampilan tersebut memang memiliki prospek yang cukup baik. Akan tetapi bagaimana membuat KBU yang berkelanjutan, diminati dan diakses oleh warga ?”.

3. Ibu TJ (Ketua IPKSM Desa Cinyasag)

“Berkaitan dengan masalah biaya, bagaimana dan kemana cara kita memperoleh dana untuk pelatihan dan pengembangan KBU. Kedua kalau pelatihan warga belajar bekerjasama dengan LPK, apakah nantinya mereka tidak akan lebih memilih bekerja di perusahaan swasta atau usaha sendiri daripada menjalankan KBU, bagaimana cara mengatasi masalah ini”.

4. Ibu ELS (aparat Dinas perekonomian dan Koperasi Kabupaten Ciamis)

“Sebelum KBU nanti berjalan warga belajar akan mendapatkan pelatihan keterampilan menjahit dan bengkel motor dan instruktur akan mengambil dari lembaga pendidikan kursus. Pertama saya sangat setuju dengan rencana itu. Kedua yang saya ingin tanyakan, sampai jenjang tingkatan apa mereka akan dilatih, apakah hanya sampai tingkat dasar, terampil atau sampai tingkat mahir. Saran saya, jika dananya mencukupi, sebaiknya sampai tingkat mahir saja sekalian, biar siap melaESIA permintaan konsumen”.

5. WSN (warga belajar)

“Pak’ seandainya dana yang ada tidak bisa membiayai dua keterampilan, mana yang akan diutamakan ? Jahit atau bengkel motor ?”.

6. Ibu ASH (pengurus PKK)

“Saya sangat setuju jika diantara pengurus organisasi diadakan pertemuan atau istilahnya Forum Rembug biar diantara kita tidak saling bentrok tentang kelompok sasaran program. Saya mohon kepada pihak LPM untuk mengkoordininya. mengenai jadwalnya mungkin sebaiknya satu bulan sekali, biar tidak terlalu sering”.

Tanggapan dari peserta diskusi ternyata juga ditanggapi secara beragam dari peserta termasuk dari fasilitator, baik dalam menjawab pertanyaan, maupun untuk

mendukung saran yang telah disampaikan :

1. Bapak OR (Ketua PKBM)

“Menjawab pertanyaan dari bapak Edi, bahwa kelompok sasaran dari KBU PKBM sebenarnya adalah mencakup seluruh warga Cinyasag yang berminat untuk mendapatkan keterampilan dan belajar usaha, akan tetapi daya tampung KBU memang terbatas untuk itu perlu ada semacam seleksi. Berdasarkan pengalaman yang telah lalu, aspek motivasi warga belajar untuk mengikuti KBU akan menjadi sorotan kami”. Kemudian saya juga setuju dengan pendapat Ibu Elsa, kalau dananya mencukupi kami akan melatih warga belajar minimal sampai dengan tingkat terampil dengan lama pelatihan empat bulan, dengan tiga kali pertemuan per minggunya”.

2. Bapak UJ (Pengurus LPM)

“Menanggapi aspirasi dari pengurus organisasi dan untuk kepentingan kita bersama, saya pada prinsipnya setuju untuk diadakan pertemuan atau Forum Rembug antar pengurus organisasi, nanti akan saya bicarakan dengan pak Lurah apakah bisa difasilitasi oleh pihak Desa”.

3. Bapak GT (fasilitator)

“Menanggapi pertanyaan dari Bapak Seklur, kita memang harus memikirkan bagaimana cara pengelolaan KBU yang berkelanjutan yang tidak selalu bergantung pada bantuan dari pemerintah. Untuk itu, dalam presentasi tadi saya usulkan atau saya sebutkan prinsip-prinsip dalam pengembangan KBU. Berkaitan dengan hal tersebut saya usul, sebaiknya warga belajar yang sudah mendapatkan pelatihan keterampilan wajib mengabdikan diri dulu untuk mengembangkan KBU selama antara enam bulan sampai satu tahun sebelum mereka memilih masuk perusahaan swasta atau membuka usaha sendiri. Pada saat itu mungkin kita tidak akan menerima warga belajar dulu, baru setelah terkumpul cukup biaya untuk pelatihan warga belajar selanjutnya, kita rekrut lagi warga belajar yang baru, sehingga lama-kelamaan semua warga di Desa Cinyasag memiliki kesempatan untuk ikut dalam program KBU”. Selanjutnya untuk dana pengembangan KBU, kita nanti akan membuat proposal sesuai dengan kebutuhan yang nantinya akan disampaikan ke Direktorat Jenderal PLS Depdiknas yang membuka program pelatihan kerja melalui Dana Bantuan Khusus (DBK), disamping itu kita cari juga dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis”.

4. Bapak EKS (Dinas tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Ciamis)

“Kebetulan pada tahun Anggaran 2008 nanti kita akan mengajukan usulan program Pelatihan Keterampilan Bengkel Motor, jika nanti dana yang diperoleh PKBM dari pengajuan propopsal tidak mencukupi, warga belajar bengkel motor bisa diikutkan dalam program pelatihan kerja bengkel motor di Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Ciamis ”atas rekomendasi dari PKBM :”Tresna Bhakti” yang dikuatkan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Ciamis . Selanjutnya saya juga sependapat pengelolaan KBU ke depan mengacu pada prinsip-prinsip pengembangan KBU yang berkelanjutan. Memang benar bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah sesungguhnya hanya sebagai perangsang saja, untuk itu diharapkan warga masyarakat dapat mengelolanya dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya”.

5. Bapak DD (Pembina PKBM Desa Cinyasag)

“Untuk lebih baiknya pengelolaan KBU dan demi tercapainya tujuan pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”, saya mengusulkan sebaiknya dalam pelaksanaan kegiatan KBU dibentuk pendamping yang terdiri dari pihak Desa sebagai pembina di tingkat wilayah, saya sendiri pembina dari Dinas Pendidikan dan LPM yang merupakan wakil dari masyarakat”.

Hasil diskusi

Dari hasil diskusi yang dilakukan dan berjalan cukup panjang, akhirnya diperoleh kesepakatan sebagai berikut:

1. KBU PKBM “Tresna Bhakti” disepakati akan mengembangkan keterampilan menjahit dan bengkel motor
2. Warga belajar direncanakan berjumlah 20 orang dengan masing-masing 10 orang KBU menjahit dengan 1 orang instruktur, dan 10 orang KBU bengkel motor dengan 1 orang instruktur dari LPK ESIA
3. Warga masyarakat yang berminat dapat mendaftarkan diri di KBU PKBM “Tresna Bhakti” secara langsung atau dengan rekomendasi dari kelembagaan/organisasi lokal yang untuk selanjutnya diseleksi oleh pihak PKBM berkoordinasi dengan BKM
4. Sebelum mengembangkan KBU, warga belajar akan mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit dan bengkel motor bekerjasama dengan LPK ESIA dan mendapatkan sertifikasi
5. Setelah mendapatkan pelatihan, warga belajar diwajibkan untuk mengembangkan KBU PKBM “Tresna Bhakti” minimal selama 6 bulan. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh dana dari hasil KBU untuk membiayai pendidikan dan pelatihan warga belajar angkatan berikutnya.
6. Bagi warga belajar yang telah bebas ikatan dengan KBU PKBM dan ingin membuka usaha, baik secara mandiri atau berkelompok bisa mendapatkan bantuan pinjaman modal untuk pengembangan usaha, melalui bantuan kredit KUKM dari Dinas Perekonomian dan Koperasi Kabupaten Ciamis atau bantuan KUBE dari Departemen Sosial RI melalui Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat atas rekomendasi dari PKBM yang dikuatkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
7. Perlu diadakan pertemuan rutin antara pimpinan kelembagaan/organsiasi lokal dalam rangka pertukaran informasi dan kerjasama dalam penanggulangan masalah sosial melalui kegiatan Forum Rembug. Kegiatan diadakan sebulan sekali
8. Pembuatan proposal untuk pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”
9. Pendampingan

F. Rancangan Program Rencana Aksi Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”

Dalam rangka mendapatkan strategi pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sebagaimana tujuan dari kajian ini,

telah dilakukan serangkaian kegiatan dimulai dari pemetaan sosial, evaluasi program dan penelitian yang menganalisis tentang permasalahan KBU PKBM “Tresna Bhakti”, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan KBU dan juga permasalahan yang dihadapi warga belajar yang telah mendapatkan pelatihan dalam menjalankan usaha produktifnya, sampai pada penyusunan pengambilan keputusan secara aspiratif dan partisipatif.

Pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah dan dihadiri oleh *stake holders* terkait, menunjukkan adanya kemauan dan itikad baik dari berbagai pihak untuk menjadikan KBU PKBM “Tresna Bhakti” sebagai salah satu wadah yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat di Desa Cinyasag.

Berdasarkan kesepakatan yang diperoleh dalam diskusi, maka perlu disusun rancangan program rencana aksi untuk pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” yang berkembang dan berkelanjutan sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dalam pengelolaannya melibatkan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta.

Latar Belakang

Desa Cinyasag merupakan salah satu daerah kantong kemiskinan di Kecamatan Panawangan, dimana penduduk miskin di wilayah itu mencapai 165 KK atau 23,69 % dari 9.452 KK yang ada di wilayah Desa Cinyasag (1.565 KK di antaranya adalah penerima BLT), atau 15,91 % dari jumlah seluruh keluarga miskin yang ada di Kabupaten Ciamis (14.078 KK). Selain penduduk miskin, di Desa Cinyasag juga terdapat 2.830 jiwa yang tidak mempunyai pekerjaan.

Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah telah mendorong terbentuknya Pusat Kegiatan Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan berbagai pembelajaran yang dibutuhkan masyarakat, termasuk di dalamnya Kelompok Belajar Usaha yang diharapkan dapat menjadi suatu wadah bagi masyarakat untuk memberdayakan dirinya. Pada kasus yang terjadi di PKBM “Tresna Bhakti”, KBU yang dibentuk ternyata belum berjalan sesuai yang diharapkan yang disebabkan karena pengelolaan yang tidak aspiratif dan perencanaan yang tidak partisipatif.

Tujuan

Tujuan rencana program pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” adalah agar KBU PKBM dapat dikelola dengan sebagaimana mestinya, yaitu pengelolaan KBU yang aspiratif dan partisipatif, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas warga masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Sasaran

Sasaran dari program Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” kelompok warga miskin dan pemuda pengangguran yang ada di Desa Cinyasag agar dapat memanfaatkan wadah KBU sebagai tempat untuk meningkatkan kapasitas dirinya, sementara pengelola PKBM hanya sebagai fasilitator dan pemerintah lokal sebagai pembina dan pengawas kegiatan KBU yang dilaksanakan oleh warga belajar.

Strategi

Strategi Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” yang digunakan adalah melalui Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) yang merupakan media untuk membahas permasalahan secara aspiratif. Strategi ini dianggap tepat untuk memberikan peluang kepada berbagai pihak terkait (*stake holders*) untuk mengemukakan gagasan, pemikiran dan keinginannya dalam rangka mendapatkan model pengelolaan KBU yang berkelanjutan.

Adapun rincian program rencana aksi Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” adalah sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Menjahit dan Bengkel Motor

Program Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Menjahit dan Bengkel Motor didasarkan pada aspirasi dari warga belajar dan alumni warga belajar, serta pendapat dari warga masyarakat lainnya, termasuk para tokoh dan aparat pemerintah Desa Cinyasag. Pendidikan dan latihan keterampilan menjahit dan Bengkel Motor dilakukan bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Kursus (LPK) ESIA. Dalam rencananya akan direkrut 10 orang warga belajar dari masing-masing jenis keterampilan. Atas usulan dari pengelola PKBM bahwa dengan pertimbangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” memiliki keterbatasan daya tampung dalam hal dana dan tempat, dan juga untuk melihat sejauh mana motivasi warga untuk mau mengikuti kegiatan KBU, maka dalam rekrutmen calon warga belajar, perlu diadakan seleksi bekerjasama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Menjahit dan Bengkel Motor direncanakan diberikan kepada warga belajar sampai dengan tingkat mahir (enam bulan) atau minimal sampai dengan tingkat terampil (empat bulan, tiga kali pertemuan dalam satu minggu) yang selanjutnya setelah mendapatkan pendidikan dan pelatihan nantinya warga belajar diharapkan sudah dapat mengembangkan usaha menjahit dan bengkel motor dalam KBU PKBM “Tresna Bhakti”. Untuk mendorong tumbuhnya semangat berwiraswasta dan memberikan pengalaman dunia usaha, maka dalam program pendidikan dan pelatihan ini juga dilengkapi dengan kegiatan Magang

atau PKL di perusahaan swasta, usaha penjahit lokal dan usaha bengkel motor lokal. Selain itu untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sosial warga belajar dalam upaya penanggulangan kemiskinan di komunitas Desa Cinyasag setelah mereka mampu membuka usaha mandiri, juga diberikan kegiatan bimbingan sosial.

Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah :

- a. Tersedianya warga belajar yang terampil dan profesional (menjahit dan bengkel sepeda motor) yang mampu membangun usaha dan mengembangkan KBU PKBM “Tresna Bhakti”.
- b. Tumbuhnya minat dan dimilikinya pengetahuan tentang *entrepreneur* (kewirausahawan), sehingga tidak menggantungkan diri pada lapangan kerja yang disediakan swasta dan pemerintah.
- c. Dimilikinya pengalaman kerja dalam dunia usaha (dari perusahaan tempat magang).
- d. Tumbuhnya kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk berpartisipasi dalam memberdayakan masyarakat miskin melalui peningkatan ekonomi.

2. Program Pengembangan Usaha KBU

Setelah warga belajar mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan menjahit dan bengkel sepeda motor (minimal sampai tingkat terampil), maka selanjutnya mereka diharapkan tidak bekerja di luar akan tetapi diharapkan dapat mengembangkan KBU PKBM “Tresna Bhakti” dengan membuka usaha menerima jahitan dan bengkel sepeda motor sekurangkurangnya selama enam bulan, agar mendapatkan proses pembelajaran dan pengalaman berwiraswasta secara kelompok.

Agar usaha produktif menjahit dan bengkel sepeda motor yang dijalankan warga belajar dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka perlu diadakan pendampingan, yaitu upaya pembinaan dan monitoring. Pendampingan dilaksanakan oleh pembina PKBM Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, aparat Desa, LPM dan juga BKM Desa Cinyasag.

Tujuan dari program ini adalah :

- a. Terbentuk dan berkembangnya Kelompok Belajar Usaha (KBU) menjahit dan bengkel sepeda motor yang ditangani oleh warga belajar yang terampil.

- b. Tersedianya tempat usaha bagi pengembangan KBU
- c. Adanya dukungan, pembinaan dan monitoring dari tim pendamping (Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, aparat Desa Cinyasag, dan BKM Desa Cinyasag)

3. Program Pengembangan Usaha Mandiri

Setelah sekurang-kurangnya enam bulan warga belajar aktif mengembangkan usaha dalam KBU PKBM “Tresna Bhakti”, maka bagi warga belajar yang ingin membuka usaha secara mandiri bisa diupayakan mendapatkan bantuan akses modal atas rekomendasi dari PKBM yang dikuatkan oleh Pemerintah Desa Cinyasag dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis . Bantuan Akses modal dan pemasaran direncanakan akan difasilitasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kabupaten Ciamis dan Dinas Perekonomian dan Koperasi Kabupaten Ciamis dalam bentuk bantuan KUKM berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, bantuan KUBE, dan fasilitasi untuk pengembangan pemasaran produk hasil keterampilan KBU dengan pihak swasta.

Melalui pemberian bantuan ini diharapkan warga belajar yang membuka usaha secara mandiri baik individu maupun kelompok dapat berjalan dan berkembang di ekonomi lokal sehingga mereka pada akhirnya memiliki sumber pendapatan, mampu menghidupi diri dan keluarganya, bahkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

Adapun tujuan dari program ini adalah:

- a. Terbentuknya kelompok-kelompok usaha mandiri yang dibangun oleh warga belajar yang telah berhasil mengembangkan KBU, baik dalam bentuk KUEP, KUBE, Kelompok Usaha Kecil maupun usaha perorangan.
- b. Terbuka dan berkembangnya jaringan pemasaran melalui dukungan dan pembinaan dari Dinas Perekonomian dan Koperasi Kabupaten Ciamis
- c. Tersedianya bantuan modal bagi warga belajar yang membuka usaha baik secara kelompok maupun perorangan dari pemerintah Kabupaten Ciamis atas rekomendasi dari PKBM “Tresna Bhakti” dan Pemerintah Desa Cinyasag

4. Program Peningkatan Pelayanan Informasi PKBM dan Kerjasama dengan Kelembagaan Lokal

Untuk meningkatkan pelayanan informasi tentang program-program kegiatan PKBM, khususnya KBU dilingkungan komunitas Desa Cinyasag dan kerjasama

dengan kelembagaan lokal, maka perlu dibentuk suatu kelembagaan baru yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi diantara pengurus lembaga atau organisasi lokal. Forum Rembug adalah kelembagaan yang diusulkan oleh para pengurus organisasi lokal, termasuk pihak pengelola PKBM “Tresna Bhakti” yang menginginkan ditingkatkannya pertukaran informasi dan kerjasama dalam hal sosialisasi program-program PKBM, dan penanggulangan masalah sosial yang ada di Desa Cinyasag , khususnya dalam hal penanggulangan kemiskinan. Melalui kegiatan Forum Rembug ini diharapkan sosialisasi program pemberdayaan masyarakat melalui PKBM “Tresna Bhakti”, khususnya melalui KBU dapat terserap ke masyarakat, sehingga minat masyarakat untuk mengikuti program KBU PKBM “Tresna Bhakti” menjadi lebih besar, dan melalui kegiatan Forum rembug ini diharapkan pintu masuk ke KBU PKBM juga bisa melalui kelembagan lokal atau organsiasi sosial yang ada di Desa Cinyasag yang terkait dengan masalah penanggulangan kemiskinan.

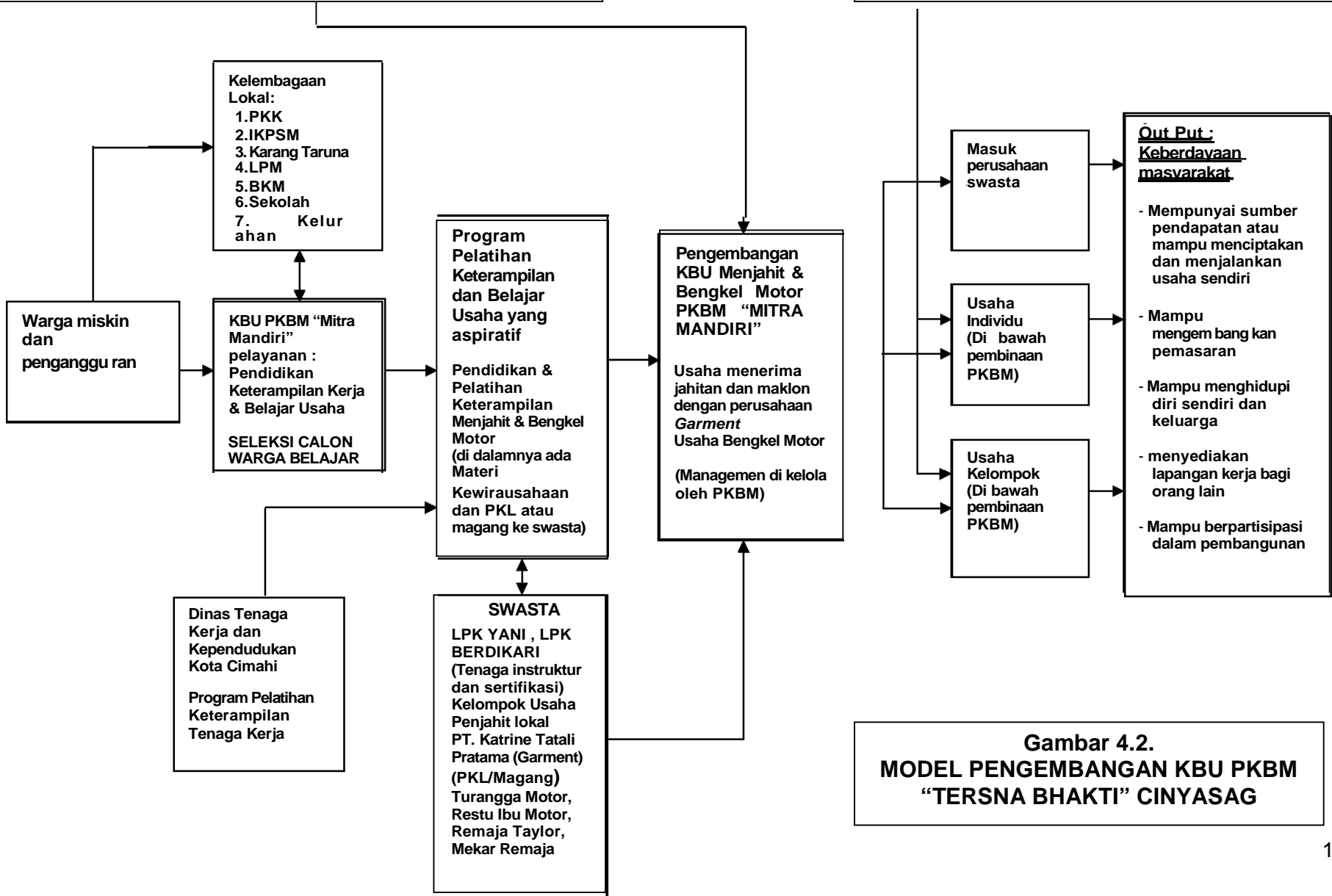
Tujuan dari program ini adalah:

- a. Terbentuknya kelembagaan yang dapat menjadi wadah bagi lembaga lokal dan PKBM dalam pertukaran informasi dan kerjasama dalam hal penanggulangan kemiskinan
- b. Tersosialisasikannya keberadaan PKBM dan program KBU secara merata di seluruh wilayah Desa Cinyasag

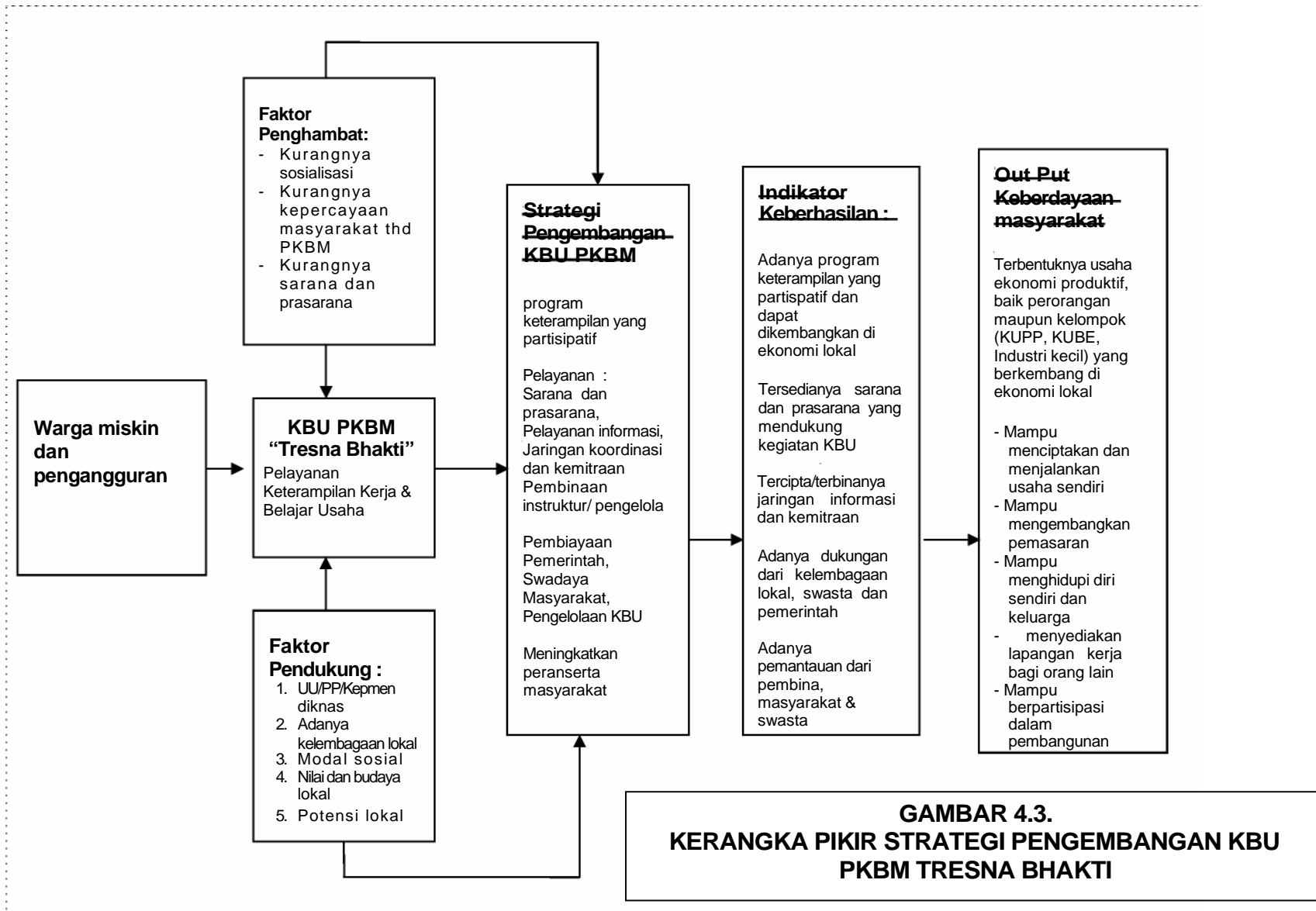
Adapun rincian dari model hasil diskusi dari rancangan program yang telah disepakati dapat dilihat dalam tabel dan Gambar Model 4.3 Pengembangan PKBM “Tresna Bhakti” berikut:

Depdikbud RI (PLS) Disdik Prop Jabar, Disdik Kab. Ciamis,
(dibawah binaan UPTD Pendidikan Kec. Panawangan)

Akses Modal dari Depsos, Dinas Sosial, Prop. Jabar
BPMKB&DisPereop Kab. Ciamis



Gambar 4.2.
MODEL PENGEMBANGAN KBU PKBM
"TERSNA BHAKTI" CINYASAG



Tabel 4.10
Program Pengembangan KBU PKBM "Tresna Bhakti" Di Desa Cinyasag

No	Program	Kegiatan	Pelaksana	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Dana
1	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Menjahit dan Bengkel Motor	Seleksi Calon Warga Belajar	PKBM, BKM	Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Pemerintah Desa Cinyasag	Pebruari 2008	Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Pemerintah Desa, Swadaya
		Pendidikan dan Pelatihan Menjahit dan Bengkel Motor	LPK ESIA dan Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan Kabupaten Ciamis	Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis, Pemerintah Desa Cinyasag, PKBM "Tresna Bhakti"	Maret s.d Agus 2008 (enam bulan)	Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis , Swadaya masyarakat
		Magang/PKL	PKBM, PT Katrine Tatali Pratama, Usaha penjahit lokal dan usaha Bengkel lokal	PKBM "Tresna Bhakti" Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	September 2008	
		Bimbingan Sosial (Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab sosial warga belajar dalam penanggulangan kemiskinan)	BPMKB Kabupaten Ciamis (Bagian sosial)	BPMKB Kabupaten Ciamis	September 2008	

No	Program	Kegiatan	Pelaksana	Penanggung jawab	Waktu pelaksanaan	Sumber Dana
2.	Pengembangan Usaha KBU	Usaha Menerima Jahitan dan Bengkel Sepeda Motor	Warga Belajar	PKBM, Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis	Oktober 2008 s.d Maret 2009	
		Pendampingan	Pembina PKBM Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Pemerintah Desa LPM dan BKM	Dinas Pendidikan Pemerintah Desa Cinyasag		
3	Pengembangan Mandiri	Mengusahakan pinjaman modal dari: PKBM, KUKM dan KUBE	Dinas Perekonomian dan Koperasi, BPMKB Kabupaten Ciamis	PKBM Pemerintah Desa Cinyasag	Mulai April 2009	
		Fasilitasi jaringan pema dengan swasta	Dinas Perekonomian dan Koperasi Kabupaten Ciamis	PKBM, Pemerintah Desa Cinyasag		
4	Peningkatan pelayanan informasi PKBM dan kerjasama dengan kelembagan lokal	Forum rembug	LPM	Pemerintah Desa Cinyasag	Setiap 1 bulan se mulai Pebruari 2008	Pemerintah Desa, Swadaya masyarakat

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa komunitas Desa Cinyasag merupakan salah satu daerah kantong kemiskinan yang ada di Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis dengan karakteristik permasalahan diantaranya tidak dimilikinya lahan untuk produksi, relatif rendahnya tingkat pendidikan dan tidak dimilikinya keterampilan kerja.

Kelompok Belajar Usaha (KBU) PKBM “Tresna Bhakti” adalah salah satu kelembagaan lokal yang dianggap dapat memberdayakan masyarakat karena memberikan pelayanan keterampilan kerja sekaligus pengalaman berwiraswasta. Beberapa permasalahan yang dihadapi KBU PKBM “Tresna Bhakti” yaitu masih relatif rendahnya motivasi warga belajar dalam mengikuti kegiatan KBU, sarana dan prasarana yang kurang menunjang, dan pemasaran yang tidak berkembang di ekonomi lokal. Sedangkan faktor–faktor yang menyebabkan KBU kurang berkembang adalah: Jenis keterampilan yang tidak aspiratif, kurangnya kerjasama dengan kelembagaan lokal dan swasta, kualitas instruktur yang tidak profesional, dan kurangnya partisipasi atau dukungan dari masyarakat.

Upaya pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” diawali dengan menampung aspirasi dari warga belajar, pengelola dan instruktur melalui suatu diskusi yang membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan KBU. Berdasarkan hasil diskusi kemudian disepakati untuk mengembangkan KBU yang aspiratif dan partisipatif yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan swasta sesuai dengan konsep *Good Governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang baik).

Adapun strategi yang dapat diterapkan atau program yang direncanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh *stake holder* terkait dalam pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” adalah meliputi: Program Pendidikan dan Pelatihan Menjahit dan Bengkel sepeda Motor yang merupakan aspirasi dari masyarakat, Program Pengembangan Usaha KBU yang berkelanjutan, Program Pengembangan Usaha Mandiri dan Program Peningkatan Pelayanan Informasi PKBM dan Kerjasama dengan Kelembagaan Lokal.

B. Rekomendasi

Sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan KBU yang berkelanjutan yang telah disepakati bersama bahwa, pada dasarnya bantuan pemerintah hanya bersifat stimulan yang diharapkan dapat dikembangkan secara berkelanjutan dalam

KBU. Untuk itu, keterikatan warga belajar yang telah selesai mendapatkan pendidikan dan pelatihan menjahit dan bengkel sepeda motor untuk mengembangkan KBU merupakan sesuatu yang sangat penting, dimana hasil dari KBU yang dikembangkan oleh warga belajar nantinya akan digunakan atau dipergilirkan untuk membiayai pendidikan dan pelatihan calon warga belajar berikutnya dalam rangka memerangi kemiskinan dan pengangguran. Berdasarkan hal tersebut , maka kepada pihak:

1. PKBM; agar dapat membuat suatu kebijakan secara tertulis mengenai kesediaan warga belajar untuk mengabdikan dirinya mengembangkan KBU menjahit dan bengkel sepeda motor dalam rangka ikut mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran di Desa Cinyasag .
2. Pemerintah Desa Cinyasag; hendaknya dapat benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai pembina, sekaligus sebagai pengawas yang memonitor pelaksanaan kegiatan KBU, sehingga kegiatan KBU dapat berjalan dengan baik dan produktif
3. Masyarakat; Warga masyarakat di sekitar PKBM hendaknya dapat memberikan dukungan kepada warga belajar dalam usahanya mengembangkan KBU menjahit dan bengkel sepeda motor. Dukungan penuh dari warga masyarakat akan mendorong semangat dan jiwa wiraswasta dari warga belajar, sehingga nantinya mereka akan lebih siap jika ingin mendirikan usaha secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Rukminto Isbandi. 1994. Psikologi, Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Alma Buchari. 2006. Kewirausahaan. Bandung: Alfabeta
- BPMKB. 2006. Pendataan Keluarga. Ciamis: BPMKB
- BPS Kabupaten Ciamis. 2011. Data Potensi Desa. Ciamis: BPS Kabupaten Ciamis
- Derick W. Brinkerhoff & Arthur A. Goldsmith. 1992. *Promoting the Sustainability of Development Institutions: A Framework for Strategy "in World Development, Vol 20. No. 3 pp 369 - 382*
- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. 2006. Direktori Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Bandung : Dinas Pendidikan (Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah)
- Felix M.T. Sitorus & Agusta Ivanovich. 2006. Metodologi Kajian Komunitas. Bogor: Program Kerjasama Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- Heryadi & Jati Sigit Waluyo. 2006. Galang Edisi Juli 2006 (Kewirausahaan Sosial LSM Bina Swadaya). Depok: PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*)
- Hikmat Harry. 2006. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora
- Huraerah Abu, 2006. Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Bandung: Pikiran Rakyat (Edisi Senin 2 Januari 2006).
- Komisi Nasional Indonesia Untuk Unesco (BP-PLSP Jaya Giri) & Sub Dinas PLS Propinsi Jawa Barat. 2006. Panduan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Bandung: BP-PLSP Regional II Jaya Giri
- Norman Uphoff. 1986. *"A Passionate Dialogue: Community and Sustainable Development" in Community and Sustainable Development: Participation in the Future*
- Rosmidi & Riyanti Riza. 2006. Pemberdayaan Masyarakat. Jatinangor: Alqa Print
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance*. (Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju *Good Governance*). Bandung: Mandar Maju.
- Suharto Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung: PT. Refika Ad ita ma
- Suhendra K. 2006. Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Alfabeta
- Sumardjo & Saharuddin. 2006. Metode-Metode Partisipatif Dalam Pengembangan Masyarakat. Bogor: Program Kerjasama Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- Sumarti, MC, Titik & Syaikat Yusman. Dan Nuryana Mu'man. 2006. Analisis Ekonomi Lokal. Program Kerjasama Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- Sularto St. 2000. Seandainya Aku Bukan Anakmu (Potret kehidupan Anak Indonesia). Jakarta: Kompas Media Nusantara,
- Syaikat Yusman & Hendrakusumaatmadja Sutara. 2006. Pengembangan Ekonomi Berbasis Lokal. Bogor: Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB.
- Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional & Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Bandung: Fokusmedia

Sumber dari Internet:

www.pikiran-rakyat.com/ Selamatkan Anak Usia Sekolah dengan Pendidikan Nonformal/ Kartika Ikka/diunduh 14 Januari 2013.

[http://www.bps.go.id/releases/files/Berita Resmi Statistik/Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006/](http://www.bps.go.id/releases/files/Berita%20Resmi%20Statistik/Tingkat%20Kemiskinan%20di%20Indonesia%20Tahun%202005-2006/)diunduh 30 Januari 2013.

Syaukat Yusman & Hendrakusumaatmadja Sutara. 2006. Pengembangan Ekonomi Berbasis Lokal. Bogor: Departemen Ilmu-Ilmu Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian IPB dan Sekolah Pascasarjana IPB.

Undang-Undang RI. No. 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional & Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Bandung: Fokusmedia

LAMP IRAN

Lampiran 1: INSTRUMEN PENELITIAN

I. PEDOMAN STUDI DOKUMENTASI

A. Dokumen PKBM:

1. Profil PKBM “Tresna Bhakti” Desa Cinyasag.
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan tujuan
 - c. Struktur Organisasi PKBM
 - d. Syarat-syarat menjadi warga belajar
 - e. Hak dan kewajiban warga belajar
2. Program kerja
 - a. Laporan kegiatan KBU terdahulu (2011-2012)
 - b. Rencana kegiatan KBU yang akan dilakukan dalam satu tahun
 - c. Sumber anggaran untuk kegiatan PKBM/KBU
 - d. Jadwal kegiatan PKBM/KBU
3. Sarana dan prasarana KBU/PKBM
4. SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola/Instruktur
 - a. Latar belakang pendidikan pengelola/instruktur
 - b. Pelatihan/kursus keterampilan yang pernah diikuti

B. Dokumen Desa Cinyasag

1. Profil Desa Cinyasag
2. Program-program pengembangan masyarakat yang ada di Desa Cinyasag

C. Dokumen BPMKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana) Kabupaten Ciamis

1. Program-program pemberdayaan/pengembangan masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis (yang dapat dikaitkan dengan pengembangan KBU PKBM)

D. Dinas Perekonomian dan Koperasi Kabupaten Ciamis

1. Program-program pengembangan ekonomi masyarakat
2. Pelatihan keterampilan yang diselenggarakan Disperekop Kabupaten Ciamis
3. Program-program bantuan kredit mikro

E. Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis

1. Program-program dukungan/bantuan untuk pengembangan PKBM/KBU.

II. PEDOMAN OBSERVASI PARTISIPAN

A. Pelaksanaan Kegiatan KBU di PKBM “Tresna Bhakti”

1. Kegiatan keterampilan yang dikembangkan KBU

2. Keaktifan dan kesungguhan warga belajar dalam mengikuti pendidikan keterampilan
3. Metode/proses belajar dan teknologi sederhana yang digunakan
4. Kondisi sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan KBU
5. Pemasaran/distribusi hasil KBU

B. Kemitraan dalam kegiatan KBU

1. Pihak luar yang terlibat dalam kegiatan KBU

C. Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif eks warga belajar

1. Kegiatan/jenis usaha ekonomi produktif yang dikembangkan
2. Motivasi atau kesungguhan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif
3. Kondisi sarana/tempat usaha yang digunakan.

III. PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara Dengan Warga Belajar (3 – 5 orang)

1. Karakteristik Responden:

- 1.1. Nama :
- 1.2. Umur :
- 1.3. Jenis kelamin : Pria/wanita
- 1.4. Pendidikan :
- 1.5. Pekerjaan :
- 1.6. Jenis keterampilan :
- 1.7. Alamat :

2. Karakteristik Keluarga Responden :

- 2.1 Nama orang tua :
- 2.2 Umur :
- 2.3 Pendidikan Terakhir :
- 2.4 Pekerjaan :
- 2.5 Penghasilan : Rp./bulan/minggu/hari
- 2.6 Jumlah tanggungan :
- 2.7 Alamat :

3. Sudah berapa lama adik/sdr mengikuti KBU di PKBM Tresna Bhakti ?
4. Apa alasan adik/sdr mengikuti pendidikan keterampilan di KBU ?
5. Manfaat apa yang adik/sdr peroleh dari KBU ?
6. Apakah keterampilan yang diikuti sesuai dengan keinginan adik/sdr ?
7. Jika tidak, jenis keterampilan apa yang sebenarnya adik inginkan ?
8. Apakah adik/sdr terlibat dalam memilih jenis keterampilan yang

- dikembangkan oleh pengelola KBU PKBM ?
9. Apakah adik/sdr selalu mengikuti kegiatan di KBU sesuai jadwal?
 10. Apakah adik/sdr mendapatkan upah dari kegiatan KBU ?
 11. Setelah mengikuti KBU di PKBM apakah adik/sdr nantinya berniat akan mengembangkan usaha secara mandiri atau berkelompok ?
 12. Menurut adik/sdr apakah instruktur keterampilan yang mengajar sudah sesuai harapan (ahli dibidangnya) ?
 13. Menurut adik permasalahan atau kesulitan apa saja yang ditemui dalam pengembangan KBU di PKBM “Tresna Bhakti”
 14. Apakah adik terlibat dalam usaha pemasaran hasil KBU ?

B. Wawancara dengan pengelola (Ketua PKBM)

1. Menurut bapak apakah sebagian besar komunitas Desa Cinyasag sudah mengenal PKBM dan program-program pelayanannya ?
2. Bagaimana sosialisasi tentang PKBM dilakukan ?
3. Menurut bapak bagaimana minat dan perhatian masyarakat terhadap kegiatan PKBM, khususnya KBU ?
4. Kegiatan keterampilan apa saja yang telah dikembangkan di KBU PKBM “Tresna Bhakti” ?
5. Ada berapa warga belajar yang mengikuti kegiatan KBU saat ini ?
6. Bagaimana cara bapak atau alasan dalam menentukan jenis keterampilan yang akan dikembangkan di KBU ?
7. Menurut bapak apakah keterampilan yang dikembangkan di KBU sesuai dengan keinginan warga belajar ?
8. Menurut pengamatan bapak apakah warga belajar mengikuti kegiatan KBU dengan antusias ?
9. Apa harapan bapak kepada warga belajar dalam mengikuti KBU ?
10. Selain keterampilan apakah warga belajar juga diberikan pelajaran atau pengetahuan tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*) ?
11. Bagaimana cara merekrut tenaga instruktur ?
12. Apakah tenaga instruktur yang ada sudah sesuai harapan ?
13. Bagaimana cara atau kemana saja hasil KBU dipasarkan ?
14. Apakah bapak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil KBU?
15. Menurut bapak apakah dalam mengembangkan KBU perlu berkoordinasi atau bekerjasama dengan kelembagaan lokal, pemerintah dan swasta ?
16. Jika ya, kerjasama seperti apa yang bapak inginkan ?
17. Apakah bapak sudah melakukan atau merintis jalinan koordinasi atau kerjasama ?
18. Dengan siapa saja bapak sudah menjalin kerja sama ?
19. Jika belum, kendala apa yang dihadapi ?

20. Apakah dalam mengembangkan KBU ada pemantauan dari pembina (disdik dan lurah) dan swasta secara berkala ?
21. Menurut bapak faktor apa saja yang menghambat warga belajar yang telah mendapatkan keterampilan dan pengalaman di KBU dalam mengembangkan usaha ekonomi produktifnya secara mandiri ?
22. Dukungan atau bantuan apa yang diberikan PKBM kepada mereka agar usahanya berjalan ?
23. Menurut bapak apakah mereka memiliki minat atau motivasi untuk menjadi seorang wirausahawan ?

C. Wawancara dengan instruktur

1. Ada berapa warga belajar yang mengikuti kegiatan keterampilan yang bapak pimpin ?
2. Menurut bapak bagaimana minat masyarakat terhadap kegiatan KBU ?
3. Menurut bapak apakah keterampilan yang dikembangkan ini sesuai dengan keinginan warga belajar ?
4. Menurut pengamatan bapak apakah warga belajar mengikuti pendidikan keterampilan dengan penuh antusias ?
5. Apa harapan bapak kepada warga belajar dalam mengikuti KBU?
6. Selain keterampilan apakah warga belajar juga diberikan pelajaran atau pengetahuan tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*) ?
7. Bagaimana cara atau kemana saja hasil KBU dipasarkan ?
8. Apakah bapak mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil KBU?
9. Menurut bapak apakah dalam mengembangkan KBU perlu berkoordinasi atau bekerjasama dengan kelembagaan lokal, pemerintah dan swasta ?
10. Jika ya, kerjasama seperti apa yang bapak inginkan ?
11. Apakah bapak sudah melakukan koordinasi atau kerjasama ?
12. Dengan siapa saja bapak sudah menjalin kerja sama ?
13. Jika belum, kendala apa yang dihadapi ?
14. Menurut bapak apakah instruktur yang ada di PKBM sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai ?
15. menurut bapak apakah pengetahuan keterampilan instruktur perlu ditingkatkan ?
16. Jika ya, pengetahuan apa yang bapak harapkan ?
17. Lembaga mana yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan tersebut ?

D. Wawancara dengan pengurus kelembagaan/organisasi lokal (LPM, IKPSM, Karang Taruna, PKK)

1. Apakah bapak/ibu/sdr mengenal PKBM “Tresna Bhakti” ?
2. Apakah bapak/ibu/sdr mengetahui program-program pelayanan di PKBM “Tresna Bhakti”
3. Menurut bapak/ibu/sdr apakah keberadaan dan program pelayanan PKBM “Tresna Bhakti” sudah banyak dikenal warga masyarakat
4. Menurut bapak/ibu/sdr apakah pengelola PKBM sudah cukup melakukan sosialisasi ke masyarakat ?
5. Menurut bapak/ibu/sdr bagaimana minat masyarakat terhadap program-program pemberdayaan masyarakat di PKBM, baik melalui program pendidikan kesetaraan maupun KBU ?
6. Menurut bapak/ibu/sdr apakah program-program PKBM memiliki kaitan dengan tujuan lembaga/organsiasi bapak/ibu/sdr ?
7. Jika ya, apakah perlu PKBM menjalin koordinasi dan kerjasama yang bersinergi dengan lembaga/organisasi lokal ?
8. Jika perlu, kerjasama dalam hal apa yang perlu diciptakan ?
9. Hambatan apa yang dihadapi dalam membangun koordinasi atau kerjasama antar lembaga lokal ?
10. Menurut bapak/ibu/sdr apa yang harus dilakukan oleh pengelola PKBM untuk mengembangkan KBU-nya ?

E. Wawancara dengan pembina (lurah dan aparat Disdik Kabupaten Ciamis)

1. Sebagai pembina apakah bapak melakukan pemantauan terhadap pengembangan KBU PKBM secara berkala ?
2. Apakah bapak memberikan dukungan dalam pengembangan KBU ?
3. Jika iya, apa bentuk dukungan tersebut ?
4. Menurut bapak, permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pengembangan KBU ?
5. Menurut bapak bagaimana cara pemecahannya ?
6. Apakah bapak memberikan saran kepada pengelola PKBM dalam upaya pengembangan KBU ?
5. Menurut bapak apakah PKBM perlu menjalin koordinasi atau kerjasama dengan kelembagaan lokal dalam mengembangkan KBU ?
6. Apa harapan bapak terhadap KBU PKBM “Tresna Bhakti”

F. Wawancara dengan Eks Warga Belajar

1. Karakteristik Responden :
 - 1.1 Nama :
 - 1.2 Umur :
 - 1.3 Jenis kelamin : Pria/wanita

- 1.4 Pendidikan :
- 1.5. Pekerjaan :
- 1.6 Alamat :
2. Apakah saudara pernah mengikuti pendidikan keterampilan di KBU PKBM “Tresna Bhakti” ?
 3. Manfaat apa yang saudara peroleh ?
 4. Apakah keterampilan yang saudara peroleh di PKBM sesuai dengan keinginan atau harapan saudara ?
 5. Jika tidak, keterampilan apa yang saudara inginkan ?
 6. Setelah mendapatkan keterampilan di KBU apakah pernah membuka usaha baik secara mandiri atau berkelompok ?
 7. Jika iya, apakah saudara merasa senang dengan usaha yang saudara lakukan ?
 8. Siapa yang mendorong saudara untuk melakukan usaha ekonomi ?
 9. Permasalahan apa saja yang saudara hadapi dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif ?
 10. Apakah saudara mendapatkan kesulitan dalam hal pemasara dan tempat usaha ?
 11. Apakah pengelola PKBM memberikan bantuan atau dukungan kepada saudara ?
 12. Jika iya, dalam bentuk apa ?
 13. Apakah saudara memerlukan dukungan atau kerjasama dari kelembagan lokal, pemerintah atau swasta dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif ?
 14. Jika iya, lembaga mana saja yang saudara harapkan dapat membantu ?
 15. Apa saran saudara bagi pengembangan KBU PKBM dimasa yang akan datang agar lebih memberdayakan masyarakat ?

IV. PEDOMAN DISKUSI KELOMPOK

A. Diskusi Kelompok I (pra penyusunan program/model KBU)

1. Topik diskusi:

Evaluasi kegiatan KBU yang telah dilaksanakan

2. Tujuan:

Mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan untuk pengembangan KBU dimasa yang akan datang

3. Peserta:

- a. Pengelola
- b. Instruktur
- c. Warga belajar
- d. Alumni warga belajar
- e. Penulis (fasilitator)

4. Tempat:

Ruang pertemuan PKBM “Tresna Bhakti” Desa Cinyasag

5. Alokasi waktu : 1 – 2 jam

6. Langkah-langkah pelaksanaan diskusi :

- a. Pengantar oleh Ketua PKBM
- b. Fasilitator menjelaskan tujuan diskusi, sekaligus presentasi tentang permasalahan di KBU PKBM “Tresna Bhakti”
- c. Diawali dengan review pelaksanaan KBU, peserta kemudian diajak untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan sebagai bahan untuk menyusun model pengembangan KBU dimasa yang akan datang
- d. Seluruh peserta diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan gagasan
- e. Setelah teridentifikasi permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan untuk pengembangan KBU dimasa yang akan datang, peserta kemudian diajak untuk merencanakan pertemuan Penyusunan Model Pengembangan KBU yang melibatkan *stake holders*.

B. Diskusi Kelompok II (FGD Penyusunan Program/Model KBU)

1. Topik :

Penyusunan Program/Model Pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” yang berkelanjutan

2. Tujuan :

Untuk mendapatkan suatu bentuk atau model pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” yang berkembang di ekonomi lokal dan berkelanjutan dalam rangka pemberdayaan masyarakat

3. Peserta :

- a. Pengelola
- b. Instruktur
- c. Warga belajar
- d. Penulis (fasilitator)
- e. Aparat (pembina) dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis
- f. Aparat dari Badan Pemberdayaan Masyarakat & KB Kabupaten

Ciamis

- g. Aparat Dinas Perekonomian dan Koperasi Kabupaten Ciamis
- h. Lurah/aparat Desa Cinyasag
- i. Ketua/pengurus kelembagaan/organisasi lokal (LPM, I KPSM, Karang Taruna, PKK)

4. Tempat:

Ruang pertemuan atau ruang kelas PKBM “Tresna Bhakti”

5. Alokasi Waktu : 2 – 3 jam

6. Langkah-langkah

- a. Pengantar oleh Ketua PKBM
- b. Pengantar oleh Lurah Desa Cinyasag
- c. Moderator menjelaskan tujuan diskusi,
- d. Diskusi diawali dengan presentasi (oleh penulis) tentang permasalahan KBU PKBM “Tresna Bhakti” dan pentingnya dibuat model yang tepat untuk pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti” yang berkembang dan berkelanjutan dimasa yang akan datang dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan yang akan dibahas dalam diskusi, meliputi :

- 1) Masalah rekrutment warga belajar
 - 2) Masalah menentukan jenis keterampilan yang akan dikembangkan KBU
 - 3) Materi dan metoda pembelajaran
 - 4) Tenaga instruktur.
 - 5) Masalah pembiayaan KBU
 - 6) Masalah distribusi hasil KBU
 - 7) Masalah bantuan dan dukungan (dari seluruh stake holders) bagi warga belajar yang ingin membuka usaha mandiri, baik secara perorangan maupun kelompok
- e. Setelah presentasi, peserta diskusi kemudian diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan gagasannya masing-masing hingga diperoleh kesepakatan dan kesamaan persepsi tentang program/model pengembangan KBU PKBM “Tresna Bhakti”
 - f. Hasil kegiatan diskusi direkam dalam catatan lengkap oleh seorang notulen yang ditunjuk, serta di dokumentasikan.

